KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DJPb
Indonesian Treasury

RCE Quarterly Report:

KAJIAN FISKAL REGIONAL

PROVINSI LAMPUNG

Triwulan I Tahun 2025

Kanwil DJPb Provinsi Lampung

Kajian Fiskal Regional (KFR) Lampung Triwulan I 2025

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Lampung

Penyusun:

Tim Kanwil DJPb Provinsi Lampung

http://bit.ly/KFRLampung

Tim Penyusun

Pengarah
Mohammad Dody Fachrudin
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung

Penanggung Jawab
Farhan Fatnanto
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Ketua Tim
Gwen Adhitya Amalkhan
Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C

Tim Penyusun
Silvi Yuniar
Romadhona Puspita Sari
Yossi Yulita
Lily Radhiya Ulfa
Grace R.M Hasibuan

New DJPb in Town
HANDAL
Harmonis Amanah Digital Akuntabel Loyal

Unduh Kajian Fiskal Regional Provinsi Lampung Triwulan I 2025 Secara Online

SCAN ME

Atau

Unduh Pada Tautan Berikut:

https://bit.ly/KFRLampung

Ekonomi Regional Lampung

Fiskal Regional Lampung

Outline of Sections

Pengembangan Koperasi di Daerah

Policy Responses

KORESPONDENSI

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung

Email: Kanwildjpb.lampung@kemenkeu.go.id

Kata Pengantar

Tabik pun, Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan semangat meningkatkan pembangunan di Lampung, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung telah menyusun Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I 2025. Kajian ini merupakan komitmen kami mendukung perkembangan kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini dilakukan melalui analisis dan rekomendasi terkait ekonomi, fiskal, serta pembangunan di regional Lampung. KFR merupakan hasil dari upaya kami untuk menggali isu-isu terkini dan mengantisipasi risiko terkait pelaksanaan kebijakan fiskal dalam menghadapi dinamika tantangan ekonomi dan pembangunan di level regional, serta ketidakpastian global.

Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur Provinsi Lampung, para Bupati dan Walikota, Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung, Kepala BPS Provinsi Lampung, Kepala OJK Provinsi Lampung, *regional expert*, *local expert*, serta *Community of Practice* yang telah memberikan masukan data dan pandangan yang memperkaya isi kajian ini. Apresiasi khusus kami tujukan kepada mitra utama Kemenkeu Satu Regional Lampung, yaitu Kepala Kanwil DJP Bengkulu Lampung, Kepala Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat, dan Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu atas kontribusi berharga dalam penyusunan KFR.

Kami berharap KFR dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam merumuskan dan melaksanakan strategi kebijakan ekonomi dan fiskal, serta menjadi sumber inspirasi bagi seluruh pemangku kepentingan. Kami terbuka terhadap saran, kritik yang membangun, dan masukan progresif guna terus meningkatkan kualitas kajian di masa mendatang.

Salam sejahtera untuk kita semua.

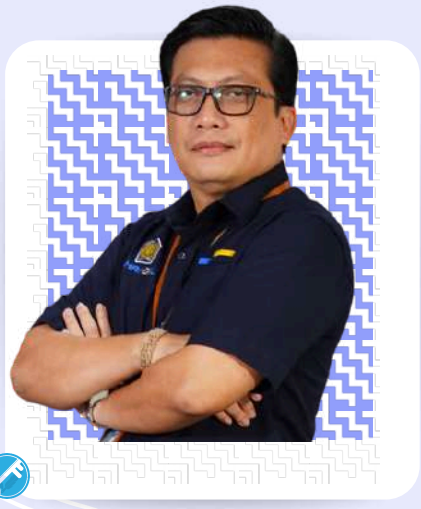

Bandar Lampung, 28 Mei 2025
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung

Ditandatangani secara elektronik
Mohammad Dody Fachrudin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GRAFIK v
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR ix
EXECUTIVE SUMMARY x
DASHBOARD MAKRO-FISKAL REGIONAL xvii
SUPLEMEN 1- A GLIMPSE OF LAMPUNG 1
SUPLEMEN 2- SKEMA SUBSIDI RESI GUDANG 2
BAB 1 ANALISIS EKONOMI REGIONAL 3
1.1 ANALISIS INDIKATOR MAKRO EKONOMI 3
1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Pengeluaran dan Lapangan Usaha 3
1.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 3
1.1.1.2 Nominal dan Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Pengeluaran 3
1.1.1.3 Nominal dan Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha 5
1.1.1.4 Kontribusi Fiskal (Pengeluaran Pemerintah) Terhadap Pembentukan PDRB 6
1.1.2 Suku Bunga 7
1.1.3 Inflasi 7
1.1.3.1 Pergerakan Inflasi di Lampung 7
1.1.3.2 Pengendalian Inflasi 9
1.1.4 Nilai Tukar 10
1.1.5 Risiko Ketidakpastian Global Terhadap Provinsi Lampung 11
1.2 ANALISIS INDIKATOR KESEJAHTERAAN 12
1.2.1 Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran 12
1.2.2 Nilai Tukar Petani (NTP) 13
1.2.3 Nilai Tukar Nelayan (NTN) 16
SUPLEMEN 3- ANALISIS ISU KOMODITAS: PENURUNAN PRODUKSI SINGKONG DI LAMPUNG 18
BAB 2 NALISIS FISKAL REGIONAL 19
2.1 PELAKSANAAN APBN 19
2.1.1 Pendapatan Negara 20
2.1.1.1 Penerimaan Perpajakan 20
2.1.1.2 Analisis *Tax Ratio* 22
2.1.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 23
2.1.1.4 Prognosis/*Outlook* Pendapatan Negara 23
2.1.2 Belanja Negara 24
2.1.2.1 Belanja Pemerintah Pusat (BPP) 24
2.1.2.2 Transfer ke Daerah 28
2.1.2.3 Prognosis/*Outlook* Belanja Negara 33
2.1.3 Surplus/Defisit APBN 34
2.1.4 Capaian Output Sektoral 34
2.1.5 Kinerja Penyaluran Kredit Program Pemerintah 35
2.1.5.1 Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 35
2.1.5.2 Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) 36
2.1.6 Isu Strategis Pelaksanaan APBN di Daerah 36
SUPLEMEN 4- PELUANG INVESTASI REGIONAL LAMPUNG: KAWASAN INDUSTRI WAY PISANG 38
2.2 PELAKSANAAN APBD 39
2.2.1 Pendapatan Daerah 39
2.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 40
2.2.1.2 Rasio Pajak Daerah (*Local Tax Ratio*) 40

2.2.1.3 Pendapatan Transfer 41
2.2.1.4 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 41
2.2.1.5 Analisis Tingkat Kemandirian Daerah 41
2.2.1.6 Prognosis/*Outlook* Pendapatan 42
2.2.1.7 Rekomendasi Kebijakan Pendapatan 42
2.2.2 Belanja Daerah 43
2.2.2.1 Berdasarkan Jenis Belanja 44
2.2.2.2 Berdasarkan Fungsi 46
2.2.2.3 Kontribusi Belanja Terhadap PDRB 46
2.2.2.4 Prognosis/*Outlook* Belanja Daerah 47
2.2.2.5 Rekomendasi Kebijakan Belanja 47
2.2.3 Perkembangan Surplus/Defisit APBD 47
2.2.4 Pembiayaan Daerah 48
SUPLEMEN 5- ANALISIS KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) 49
2.3 PROGRES IMPLEMENTASI PROGRAM PENYALURAN MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) 50
2.3.1 Pendahuluan 50
2.3.1.1 *Overview* Proses Pelaksanaan MBG 50
2.3.2 Progres Pelaksanaan MBG di Regional Lampung 51
2.3.2.1 Progres Implementasi 51
2.3.3 Analisis Indikasi Awal Dampak Program MBG Terhadap Outcome Jangka Pendek 53
2.3.3.1 Tinjauan Literatur Dampak Program Makan Bergizi 53
2.3.3.2 Asumsi dan Prinsip Kehati-hatian Dalam Interpretasi Analisis Dampak Awal 53
2.3.3.3 Dampak Awal MBG terhadap Pertanian 54
2.3.3.4 Dampak Awal MBG terhadap Peternakan 55
2.3.3.5 Dampak Awal Program MBG terhadap Nilai Tukar Nelayan 55
2.3.3.6 Dampak Awal Program MBG terhadap Inflasi/ Kenaikan Harga 56
2.3.3.7 Overview Keseluruhan Dampak MBG Terhadap Permintaan dan Penawaran Agregat 56
2.3.4 Isu Strategis Pelaksanaan MBG di Lampung 57
2.3.5 Simpulan dan Rekomendasi 58
SUPLEMEN 6- PEMANFAATAN DANA DESA: SUCCESS STORY DESA BUMI DAYA 60
BAB 3 ANALISIS PERAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI DI LAMPUNG 61
3.1 PENDAHULUAN 61
3.2 PERKEMBANGAN KONDISI KOPERASI DI REGIONAL LAMPUNG PERIODE 2021- 2023 61
3.3 DUKUNGAN PEMERINTAH BAGI KOPERASI DI REGIONAL LAMPUNG 63
3.3.1 Kebijakan Pemerintah terkait Pengembangan Koperasi 63
3.3.2 Dukungan Belanja Kementerian/Lembaga 64
3.3.3 Dukungan Belanja Transfer Ke Daerah 65
3.3.4 Dukungan Belanja APBD 65
3.3.5 Dukungan Pemerintah Lainnya Melalui Kredit Bersubsidi 66
3.4 TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DI DAERAH 66
3.5 STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI DI DAERAH 67
3.6 POTENSI PENGEMBANGAN KOPERASI DESA / KELURAHAN MERAH PUTIH 68
3.6.1 Latar Belakang Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih 68
3.6.2 Tujuan dan Manfaat Pembentukan 68
3.6.3 Dasar Hukum dan Tata Kelola 68
3.6.4 *Timeline* dan Target 68
3.6.5 Model Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 69
3.6.6 Progres Persiapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Lampung 69
3.6.7 Potensi Sektor Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Lampung 69
3.7 Simpulan dan Rekomendasi 70
BAB 4 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 72

4.1 KESIMPULAN 72
4.1.1 *Outlook* Makroekonomi Regional Lampung 72
4.1.2 Kinerja Fiskal Regional Lampung 73
4.1.2.1 Kinerja APBN 73
4.1.2.2 Kinerja APBD 74
4.1.3 Progres Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 75
4.1.4 Analisis atas Strategi dan Peran Koperasi 76
4.2 REKOMENDASI 76
4.2.1 Rekomendasi terkait Makroekonomi dan Fiskal 76
4.2.2 Terkait Progres Program Makan Bergizi Gratis 78
4.2.3 Terkait Strategi dan Pengembangan Koperasi 78
DAFTAR PUSTAKA 80
DAFTAR ISTILAH 82

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Lampung, Sumatera, dan Nasional Triwulan I 2021 – Triwulan I 2025 (% *yoy*) 3
Grafik 1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung, Sumatera, dan Nasional Triwulan I 2021 – Triwulan I 2025 (% *qtq*)....3
Grafik 1.3. Perkembangan Nominal PDRB ADHK dan PDRB ADHB Lampung....4
Grafik 1.4. *Share* dan Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Pengeluaran Triwulan I 2025 (%) 4
Grafik 1.5. *Share* dan Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha....5
Grafik 1.6. Kontribusi Fiskal terhadap sektor riil ekonomi Lampung Triwulan I Periode 2023 – 2025 (Rp Miliar) .6
Grafik 1.7. Perkembangan *BI 7-Day Repo Rate* dan Inflasi Lampung....7
Grafik 1.8. Perkembangan Inflasi Lampung Tahun 2023 – Triwulan I 2025 (% *yoy*)....8
Grafik 1.9. Pergerakan Laju Inflasi 8
Grafik 1.10. Perkembangan Inflasi Lampung Tahun 2023 – Triwulan I 2025 (% *mtm*)....8
Grafik 1.11. Tren Pergerakan rata-rata Kurs Tengah Rupiah terhadap US$1 dan Neraca Perdagangan Luar Negeri Lampung (juta USD) per bulan 10
Grafik 1.12. Tren Ekspor, Impor (juta USD) Lampung Tahun 2022 – Triwulan I 2025 11
Grafik 1.13. Perkembangan TPAK di Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional Februari 2021 – Februari 205 (persen).... 12
Grafik 1.14. Perkembangan Struktur Pekerja Formal dan Informal di Lampung.... 12
Grafik 1.15. Struktur Tenaga Kerja di Provinsi Lampung berdasarkan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Feb 2020 – Feb 2025 (Persen) 13
Grafik 1.16. TPT Provinsi Lampung Februari 2020 – Februari 2025 13
Grafik 1.17. Perkembangan TPT di Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional Februari 2020 – Februari 2025 (persen).... 13
Grafik 1.18. TPT Regional Sumatera Februari 2020 s.d. Februari 2025 (persen).... 13
Grafik 1.19. Perkembangan Rata-rata NTP Lampung, Regional Sumatera, dan Indonesia per triwulan Tahun 2020 – 2025 14
Grafik 1.20. Rata-rata NTP Regional Sumatera Triwulan I Tahun 2021 – 2025 14
Grafik 1.21. Perkembangan Rata-Rata NTN Lampung, Regional Sumatera dan Indonesia per Triwulan 2020 – 2025 16
Grafik 1.22. Rata-Rata NTN Regional Sumatera Triwulan I Tahun 2021 – 2025.... 16
Grafik 1.23. Perkembangan Rata-Rata NTN Lampung, Regional Sumatera dan Indonesia per Triwulan 2021 – 2025 17
Grafik 2.1. Tren Kontribusi Komponen Penerimaan Perpajakan s.d. 31 Maret Tahun 2024-2025 (miliar rupiah) 21
Grafik 2.2 Target, Realisasi, Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan di Lampung Triwulan I 2025 (miliar rupiah, persen).... 21

Grafik 2.3 Pertumbuhan Kumulatif PNBP Triwulan I 2025 (miliar rupiah) 23
Grafik 2.4 Tren PNBP Triwulan I Tahun 2024 dan 2025 (miliar rupiah) 23
Grafik 2.5. Realisasi Komponen Belanja Negara Provinsi Lampung Triwulan I 2023 – 2025 (miliar rupiah) 24
Grafik 2.6. Distribusi Komponen BPP Per Jenis Belanja Triwulan I 2023 – 2025 (miliar rupiah) 24
Grafik 2.7. Pagu, Realisasi, dan Pertumbuhan BPP per Jenis Belanja (miliar rupiah) 25
Grafik 2.8. Perbandingan Pagu dan Realisasi pada Sepuluh K/L Pagu Terbesar Provinsi Lampung Tahun 2025 (miliar Rp, persen) 26
Grafik 2.9. Pertumbuhan Realisasi Belanja pada Sepuluh K/L Pagu Terbesar (persen) 27
Grafik 2.10. Realisasi BPP Berdasarkan Fungsi Tahun 2025 27
Grafik 2.11. Tren Pertumbuhan BPP Berdasarkan Fungsi Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah) 27
Grafik 2.12. Perkembangan BPP Per Kapita Triwulan-I 2025 28
Grafik 2.13. Perkembangan Kontribusi BPP Terhadap PDRB 28
Grafik 2.14. Distribusi Penyaluran TKD Triwulan I 2023 – 2025 per Jenis (miliar rupiah, persen) 29
Grafik 2.15. Pagu, Realisasi dan Pertumbuhan Penyaluran TKD berdasarkan DTU, DTK, Dana IF, dan Dana Desa 29
Grafik 2.16. Pagu, Realisasi, dan Penyaluran TKD Triwulan I-2025 per Pemerintah Daerah (miliar Rp, persen) . 30
Grafik 2.17. Komponen Penyaluran DTU Triwulan I 2024 dan 2025 (miliar Rp, persen) 30
Grafik 2.18. Pagu, Realisasi, dan Pertumbuhan Penyaluran DTU Triwulan I 2024 dan 2025 (miliar Rp, persen) 30
Grafik 2.19. Pagu DAU Per Jenis Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah) 31
Grafik 2.20. Pagu, Realisasi, dan Pertumbuhan Penyaluran DBH Per Jenis Triwulan I-2024 (miliar Rp, persen). 31
Grafik 2.21. Pagu, Realisasi, dan Pertumbuhan Penyaluran DTK Triwulan I 2024 dan 2025 (miliar Rp, persen). 31
Grafik 2.22. Alokasi Pagu DAK Fisik Per Bidang Tahun 2024 dan 2025 (miliar, Rp) 32
Grafik 2.23. Pagu dan Realisasi Insentif Fiskal Lampung Tahun 2025 per 31 Maret 2025 (miliar Rp) 32
Grafik 2.24. Distribusi Pagu Dana Desa *Earmarked* dan Non-*Earmarked* Tahun 2025 (miliar Rp) 33
Grafik 2.25. Clustering Penyerapan Dana Desa Triwulan I-2025 (miliar Rp, persen) 33
Grafik 2.26. Proyeksi/Outlook Belanja Negara Regional Lampung Tahun 2025 (miliar, Rp) 34
Grafik 2.27. Surplus/Defisit APBN Regional Lampung Tahun 2023-2024 (miliar, Rp) 34
Grafik 2.28 Tren Penyaluran KUR di Provinsi Lampung Triwulan I Tahun 2023-2025 (miliar rupiah, debitur) 35
Grafik 2.29 Penyaluran UMi di Lampung Triwulan I Tahun 2023-2025 36
Grafik 2.30. Perbandingan Pagu-Realisasi Pendapatan Daerah (miliar rupiah) dan Pertumbuhannya (persen) Triwulan I 2024 dan 2025 39
Grafik 2.31. Perbandingan Komposisi PAD Lampung Triwulan I 2024 dan 2025 (miliar rupiah) 40
Grafik 2.32. Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer Lampung Triwulan I Tahun 2024 dan 2025 (miliar rupiah) 41
Grafik 2.33. Perbandingan Realisasi LLPDyS Lampung Triwulan I Tahun 2024 dan 2025 (miliar rupiah) 41

Grafik 2.34. Perbandingan Realisasi PAD (miliar rupiah) dan Rasio Kemandirian Fiskal (persen) Lampung Triwulan I Tahun 2024 dan 2025 41
Grafik 2.35. Rasio Kemandirian Fiskal dan Ketergantungan Fiskal Daerah per Pemda Triwulan I Tahun 2025 ... 42
Grafik 2.36. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Daerah (miliar rupiah) dan Pertumbuhannya (persen) s.d. Triwulan I Tahun 2024 dan 2025 43
Grafik 2.37. Komposisi Belanja Daerah per Pemda (miliar rupiah) Triwulan I-2025 44
Grafik 2.38. Perbandingan Realisasi Belanja Operasi tahun Triwulan I Tahun 2024 dan 2025 (miliar rupiah) 44
Grafik 2.39. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lampung Triwulan I Tahun 2024 dan 2025 (miliar rupiah) 45
Grafik 2.40. Pagu dan Realisasi Belanja per Fungsi Triwulan I Tahun 2025 (miliar rupiah) 46
Grafik 2.41. Proyeksi Ketercapaian Belanja s.d. Akhir Tahun 2025 47
Grafik 2.42.Perbandingan Realisasi Pembiayaan Daerah Lampung Triwulan I-2024 dan 2025 (miliar rupiah)... 48
Grafik 2.43. Jumlah SPPG Berdasarkan Kab/Kota (Per 31 Maret 2025) 51
Grafik 2.44. Jumlah Penerima MBG Berdasarkan Kabupaten/Kota 52
Grafik 2.45. Porsi Jumlah Penerima MBG berdasarkan Kategori Penerima (Per 31 Maret 2025) 52
Grafik 3.1. Perkembangan Koperasi Aktif di Lampung 2021-2023 62
Grafik 3.2. Perkembangan Komposisi Modal Koperasi di Lampung 2021-2023 (dalam Rp Miliar) 62
Grafik 3.3. Perkembangan Aset, Volume Usaha, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi di Lampung 2021-2023 (dalam Rp Miliar) 62
Grafik 3.4. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Pendukung Koperasi di Lampung 2021-2024 (Rp Miliar) 64
Grafik 3.5. Perkembangan TKD (DAK Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas KUMK) di Lampung Periode 2023-2024 (Rp Miliar) 65
Grafik 3.6. Perkembangan Belanja APBD Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM di Lampung 2023-2024 (Rp Miliar) 65
Grafik 3.7. Perkembangan Belanja APBD Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM di Lampung 2023-2024 Per Pemda (Rp Juta) 65
Grafik 3.8. Penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) oleh Koperasi yang Mendapatkan Subsidi Pemerintah di Lampung 2021-2024 (Rp miliar) 66
Grafik 3.9. Progress Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih di Lampung Hingga 13 Mei 2025 .. 69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Rincian Andil Inflasi Bulan Maret 2025 per Komoditas (% *yoy*) 8
Tabel 1.2. Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung Menurut Subsektor per Triwulan periode 2021 – 2025 15
Tabel 1.3. Perkembangan NTUP Lampung Menurut Subsektor per Triwulan Periode 2021 – 2025 15
Tabel 2.1 *I-Account* APBN di Provinsi Lampung Realisasi Triwulan I 2025 (dalam miliar Rp) 19
Tabel 2.2 Capaian Penerimaan Perpajakan s.d. 31 Maret 2025 (miliar rupiah) 20
Tabel 2.3. Realisasi dan Pertumbuhan Kumulatif Penerimaan Pajak Dalam Negeri di Lampung (di luar Cukai) Berdasarkan Sektor s.d. 31 Maret 2025 (miliar rupiah, persen) 22
Tabel 2.4 *Tax Ratio* Penerimaan Pajak Triwulan I Tahun 2024 dan 2025 di Lampung (miliar rupiah) 22
Tabel 2.5. Proyeksi Pendapatan Negara per Triwulan Tahun 2025 Provinsi Lampung (miliar rupiah) 24
Tabel 2.6. Pagu, Realisasi, dan Pertumbuhan Penyaluran DAK Non Fisik Per Jenis Tahun 2025 (miliar, Rp) 32
Tabel 2.7. Capaian Output Strategis Bidang Kesehatan Triwulan I-2024 (miliar Rp, persen) 34
Tabel 2.8 Capaian Output Strategis Bidang Pendidikan 34
Tabel 2.9. Capaian Output Strategis Bidang Infrastruktur 35
Tabel 2.10. I-Account Realisasi APBD Konsolidasi Provinsi Lampung Triwulan I Tahun 2024-2025 (miliar rupiah) 39
Tabel 2.11. Perbandingan *Local Tax Ratio* Lampung Triwulan I Tahun 2024 dan 2025 40
Tabel 2.12. Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal 42
Tabel 2.13. Proyeksi Ketercapaian Pendapatan s.d. Akhir Tahun 2025 42
Tabel 2.14. Perbandingan Kontribusi Belanja Daerah terhadap PDRB Triwulan I Tahun 2024 dan 2025 46
Tabel 2.15. Perkembangan Rasio Surplus/Defisit APBD Regional Lampung Triwulan I Tahun 2024 dan 2025 ... 48
Tabel 2.16. Perkembangan Keseimbangan Umum dan Primer Regional Lampung Triwulan I Tahun 2024 dan 2025 48
Tabel 2.17. Jumlah Penerima Manfaat MBG Berdasarkan Detail Jenis Penerima (Per 31 Maret 2025) 52
Tabel 3.1. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Pendukung Koperasi di Lampung 2021-2024 Per Jenis Kegiatan (Rp Miliar) 64
Tabel 3.2. Perkembangan TKD (DAK Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas KUMK) di Lampung Periode 2023-2024 Per Pemda (Rp juta) 65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan I Tahun 2025....3

EXECUTIVE SUMMARY

Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2025
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung

Outlook Ekonomi Regional Lampung

Ekonomi Lampung pada Triwulan I 2025 menunjukkan pertumbuhan yang solid, ditopang oleh kinerja positif sebagian besar lapangan usaha, kuatnya konsumsi rumah tangga, serta peningkatan aktivitas ekspor. Namun demikian, ketegangan perdagangan global masih menjadi tantangan yang dapat memicu disrupsi rantai pasok dan mendorong volatilitas harga komoditas.

Ekonomi Provinsi Lampung mencatatkan kinerja impresif pada triwulan I 2025 dengan pertumbuhan 5,47% (*yoy*), tertinggi dalam lima tahun terakhir dan melampaui capaian nasional (4,87%) maupun regional Sumatera (4,84%). Nilai PDRB tercatat sebesar Rp121,70 triliun (ADHB) dan Rp69,56 triliun (ADHK), mengindikasikan pertumbuhan riil yang solid. Capaian ini menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tahunan tertinggi di Pulau Sumatera. Meskipun secara triwulanan (*qtq*) ekonomi mengalami kontraksi sebesar 1,11%, tekanan tersebut relatif lebih ringan dibanding triwulan sebelumnya dan mencerminkan proses normalisasi pasca momen musiman.

Pertumbuhan ekonomi Lampung tetap solid, ditopang kuat oleh konsumsi rumah tangga yang menyumbang 64,79% terhadap PDRB. Ketergantungan yang tinggi terhadap konsumsi domestik menjadi motor utama pertumbuhan, namun sekaligus menciptakan risiko jika daya beli melemah. Kuatnya konsumsi didorong oleh momen musiman seperti Ramadan, Idulfitri, dan perayaan keagamaan lainnya, serta ditopang oleh peningkatan pendapatan masyarakat melalui pencairan THR.

Tekanan inflasi di Provinsi Lampung pada triwulan I 2025 menunjukkan tren yang terkendali dan cenderung menurun, dengan inflasi tahunan per Maret 2024 sebesar 1,58% (*yoy*), sedikit di atas rata-rata nasional. Inflasi bulanan rata-rata berada pada level moderat 0,20% (*mtm*). Pola inflasi bersifat musiman, meningkat saat momen keagamaan dan awal tahun ajaran baru, terutama pada kelompok makanan dan pendidikan. Pasca Idulfitri, tekanan harga mereda seiring normalisasi konsumsi. Tekanan utama pada triwulan ini berasal dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, khususnya bawang merah, akibat terbatasnya pasokan dari sentra produksi seperti Brebes yang terdampak panen rendah, cuaca buruk, dan tingginya biaya produksi.

Depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap USD menambah ketidakpastian bagi pelaku usaha, terutama terkait impor. Meskipun Rupiah tertekan pada triwulan I 2025, permintaan impor tetap tinggi, mencerminkan masih kuatnya permintaan domestik dan aktivitas industri yang tercermin dari impor Lampung tumbuh 39,53% (*qtq*).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung menunjukkan tren penurunan menjadi 4,07%, dibandingkan periode Februari 2024 yang tercatat sebesar 4,12%, mencerminkan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan ketahanan ekonomi seiring menguatnya aktivitas ekonomi. Capaian TPT Lampung juga lebih baik dibandingkan dengan capaian TPT nasional dan rata-rata TPT di regional Sumatera. Sejalan dengan struktur ekonomi Lampung, penyerapan tenaga didominasi oleh sektor Pertanian, Perikanan,

dan Kehutanan; sektor perdagangan; dan sektor industri pengolahan.

Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung menunjukkan tren yang positif meningkat. Pada Triwulan I 2025, NTP Lampung mencapai 133,28 atau tumbuh 10,53% (*yoy*), lebih tinggi dari nasional namun masih di bawah rata-rata Sumatera. Pemerintah Lampung terus mendorong kesejahteraan petani melalui berbagai program subsidi, Kredit Usaha Program (KUR), Kartu Petani Berjaya (KPB), dan stabilisasi harga, termasuk penetapan harga dasar singkong sebesar Rp1.350/kg. Di sektor perikanan, peningkatan produktivitas didorong melalui program budidaya dan penguatan kelembagaan, termasuk pengembangan BBL yang melibatkan 2.079 nelayan.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) Lampung mencatat capaian cukup baik. Pada triwulan I 2025, NTN Lampung mencapai 113,56, lebih tinggi dibandingkan nasional dan regional Sumatera. Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat kesejahteraan nelayan melalui pembangunan infrastruktur (SPBN), perlindungan sosial lewat Asuransi Nelayan, serta akses pembiayaan melalui KUR. Kebijakan ini mendorong produktivitas, memperkuat ketahanan sektor perikanan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi kelautan yang berkelanjutan.

Analisis Fiskal Regional: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Kinerja APBN Regional Lampung hingga 31 Maret 2025 melanjutkan tren pertumbuhan yang positif. Pendapatan Negara didorong oleh pertumbuhan akseleratif Bea Keluar, sementara Belanja Negara dikelola secara lebih efisien dengan percepatan penyaluran DBH, DAU, dan DAK Non Fisik.

Realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp2.705,16 miliar, tercapai 24,32% dari target dan berhasil tumbuh signifikan 44,68% (*yoy*). Hal ini didorong pertumbuhan kinerja Penerimaan Perpajakan (55,67%, *yoy*) yang mengalami pertumbuhan pada Pajak Perdagangan Internasional (435,56%, *yoy*) khususnya komponen Bea Keluar. Hal ini dikarenakan peningkatan ekspor akibat dari permintaan dan perubahan harga global. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mencatatkan pertumbuhan 8,22% (*yoy*) didorong pertumbuhan PNBP Lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Realisasi Belanja Negara sebesar Rp7.907,44 miliar, tercapai 24,88% dari pagu, tumbuh 3,34% (*yoy*). Hal ini didorong penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) yang mencatatkan pertumbuhan *double digit* 20,48% (*yoy*) dan percepatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Insentif Fiskal serta Dana Desa. Sementara itu, Belanja Pemerintah Pusat terkontraksi 34,17% (*yoy*) seiring kebijakan efisiensi anggaran. Belanja Barang dan Belanja Modal terkontraksi masing-masing 66,94% dan 80,76% (*yoy*).

Defisit anggaran regional Lampung hingga 31 Maret 2025 tercatat sebesar Rp5.202,28 miliar, menyempit sebesar 10,03% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan defisit ini mencerminkan kinerja positif penerimaan Bea Keluar serta pengelolaan belanja yang lebih efisien. Defisit menggambarkan peran APBN sebagai peredam gejolak (*shock absorber*) atas dampak ketidakpastian perekonomian global untuk menjaga daya beli masyarakat Lampung.

Hingga 31 Maret 2025, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Lampung mencapai Rp2.504,98 miliar kepada 47.466 debitur, tumbuh 8,26% (*yoy*). Sementara itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp52,39 miliar kepada 9.253 debitur. Hal ini mencerminkan bahwa peran kredit bersubsidi dari pemerintah terus memperluas akses keuangan inklusif serta mendorong

pertumbuhan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi di regional Lampung.

Analisis Fiskal Regional: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kinerja APBD Provinsi Lampung Triwulan I-2025 menunjukkan perbaikan signifikan pada sisi pendapatan, terutama dari PAD, namun masih dihadapkan pada tantangan rendahnya efektivitas belanja produktif dan tingginya dominasi belanja pegawai.

Realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar Rp3.839,29 miliar atau 11,80 persen dari pagu, tumbuh 0,91 persen (*yoy*). Belanja Operasi mencapai Rp3.283,40 miliar atau 13,91 persen dari pagu, meningkat 11,28 persen (*yoy*), dengan kontribusi dominan Belanja Pegawai sebesar 71,83 persen dari total Belanja Operasi. Di sisi lain, Belanja Modal hanya terealisasi Rp208,92 miliar atau 5,70 persen dari pagu, terkontraksi 37,48 persen (*yoy*), terutama pada komponen Jalan, Irigasi, dan Jaringan serta Gedung dan Bangunan. Perlambatan juga terjadi pada Belanja Barang dan Jasa yang turun 0,86 persen (*yoy*), menandakan adanya risiko keterlambatan pelaksanaan program produktif.

Realisasi Pendapatan Daerah hingga 31 Maret 2025 mencapai Rp5.412,00 miliar atau 16,66 persen dari target APBD, tumbuh signifikan 39,02 persen (*yoy*). Pertumbuhan didorong oleh akselerasi PAD yang tumbuh 86,14 persen (*yoy*) menjadi Rp1.047,54 miliar, khususnya dari Retribusi Daerah (184,16 persen *yoy*), Pajak Daerah (66,77 persen *yoy*), serta Lain-lain PAD yang Sah (115,52 persen *yoy*). *Local Tax Ratio* meningkat menjadi 0,67 persen, namun masih jauh dari ideal, mengindikasikan bahwa potensi fiskal daerah—terutama dari sektor-sektor informal dan pertanian—belum termanfaatkan secara optimal.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tetap menjadi kontributor utama, dengan realisasi sebesar Rp4.278,14 miliar atau 17,65 persen dari target, tumbuh 32,37 persen (*yoy*), dan menyumbang 79,05 persen terhadap total Pendapatan Daerah. Sementara itu, Pendapatan Transfer Antar Daerah justru menurun 27,11 persen (*yoy*), seiring penerapan kebijakan opsen pajak yang mengubah skema bagi hasil menjadi penerimaan langsung sebagai PAD di kabupaten/kota. Rasio kemandirian fiskal Provinsi Lampung meningkat dari 0,14 menjadi 0,19, namun masih dalam kategori "belum mandiri", dengan disparitas antar daerah yang signifikan.

Keseimbangan umum dan primer APBD di regional Lampung pada Triwulan I-2025 menunjukkan surplus, mengindikasikan kebijakan fiskal yang lebih konservatif, di mana belanja daerah lebih rendah daripada pendapatannya. Peningkatan belanja perlu diakselerasi agar dapat mendorong daya beli masyarakat, namun dengan tetap memastikan kapasitas fiskal daerah dan keberlanjutan fiskal.

Progres Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung pada Triwulan I 2025 menunjukkan komitmen pemerintah dalam peningkatan kualitas gizi dan stimulasi ekonomi lokal.

Meskipun masih dalam tahap awal dan memerlukan kehati-hatian dalam interpretasi data, indikasi awal menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan realisasi MBG berasosiasi positif dengan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perubahan harga. Hal ini mengisyaratkan adanya potensi peningkatan permintaan domestik dan pendapatan bagi produsen primer di Lampung. Namun, dari perspektif makroekonomi, peningkatan pengeluaran ini juga terasosiasi positif dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) secara umum dan kelompok makanan, minuman, tembakau, mengindikasikan potensi tekanan inflasi jika

penawaran agregat tidak dapat mengimbangi lonjakan permintaan.

Secara operasional, hingga 31 Maret 2025, program MBG telah menjangkau 13 kabupaten/kota dengan 34 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 97.687 penerima manfaat, didominasi oleh jenjang pendidikan dasar. Namun, terdapat disparitas cakupan antar wilayah dan fokus utama pada siswa sekolah, dengan proporsi kelompok rentan (balita dan ibu hamil) yang masih cukup minim.

Guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan program penting untuk secara proaktif dan berkelanjutan memitigasi isu yang muncul. Beberapa isu strategis yang muncul termasuk tantangan dalam desain program dan keselarasan kebijakan (seperti perbedaan fokus dengan Program Percepatan Stunting), isu operasional dan logistik (ketersediaan susu, standar dapur/supplier, komunikasi, keterlambatan pembayaran, dan keterbatasan jangkauan di wilayah 3T), isu dampak sosio-ekonomi dan fiskal (ketergantungan pada integrasi program lain dan potensi tekanan pada APBN/APBD), serta isu risiko dan mitigasi (sasaran, penggunaan *ultra-processed food*, belum memaksimalkan pengadaan dari agregator lokal, dan pengelolaan limbah).

Peran dan Strategi Pengembangan Koperasi

Koperasi di Lampung menunjukkan profitabilitas yang stabil meski menghadapi fluktuasi anggota dan modal, serta tantangan internal seperti tata kelola dan digitalisasi. Meskipun dukungan pemerintah cenderung menurun sejak 2023, inisiatif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menunjukkan progres signifikan di Lampung, berpotensi menjadi strategi baru untuk penguatan ekonomi kerakyatan.

Koperasi di Lampung menunjukkan peran dalam lanskap perekonomian regional melalui sekitar 2.476 koperasi pada tahun 2023 berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. Meskipun mengalami fluktuasi dalam jumlah koperasi aktif dan anggota serta penurunan total modal pada tahun 2023, kinerja aset dan volume usaha menunjukkan pola yang cenderung positif, dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang stabil dan cenderung meningkat, mengindikasikan kemampuan koperasi dalam mempertahankan profitabilitas operasionalnya bagi anggota.

Dukungan pemerintah, baik dari tingkat pusat maupun daerah, menunjukkan alokasi anggaran yang menurun sebelum 2025. Terjadi peningkatan belanja terkait koperasi dan UMKM pada tahun 2022 sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Namun, analisis data menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam alokasi belanja kementerian/lembaga, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada periode 2023–2024.

Secara internal, koperasi secara nasional dan di Lampung masih menghadapi beberapa tantangan. Dari sisi kelembagaan, meliputi kelengkapan legalitas, konsistensi pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta kapabilitas sumber daya manusia dan partisipasi generasi muda. Dalam aspek usaha, koperasi cenderung belum memiliki fokus bisnis yang jelas dan masih didominasi oleh unit simpan pinjam, serta pemanfaatan teknologi digital yang belum optimal menghambat daya saing. Tantangan keuangan meliputi pencatatan manual, minimnya analisis keuangan terstruktur, dan belum rutinnya audit. Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengimplementasikan strategi yang mencakup sosialisasi pendirian koperasi, peningkatan kapasitas SDM, penguatan tata kelola, serta pengawasan dan perlindungan koperasi.

Inisiatif strategis program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang

diamanatkan dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2025, diharapkan memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Progres pembentukan koperasi ini di Lampung hingga Mei 2025 menunjukkan percepatan yang signifikan. Hingga 13 Mei 2025, 1.486 dari 2.651 desa/kelurahan di Lampung (56,05%) telah melaksanakan Musyawarah Desa Khusus.

Policy Responses

Berdasarkan kondisi makroekonomi, fiskal, dan pembangunan di Lampung pada Triwulan I 2025, terdapat beberapa *policy responses* berikut:

1) ***Rekomendasi Terkait Makroekonomi dan Fiskal***
   a) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) agar bekerja sama dengan Ditjen Perdagangan Luar Negeri, dalam pembukaan pasar alternatif ekspor melalui perjanjian dagang bilateral, promosi produk unggulan daerah, dan diplomasi ekonomi untuk mewaspadai risiko penurunan Bea Keluar dan Bea Masuk di Lampung akibat dampak tarif resiprokal AS serta proyeksi penurunan Harga Batu Bara, Crude Palm Oil (CPO), dan Kopi.
   b) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dapat melakukan analisis *stress test* terhadap penerimaan bea masuk dan bea keluar yang terkait dengan kebijakan pembatasan impor beras dan gula. Pengujian ini dapat mencakup berbagai skenario, termasuk penurunan harga beras global, perubahan volume impor, dan dampak kebijakan perdagangan lainnya, guna memastikan kesiapan fiskal dan kebijakan mitigasi yang efektif secara regional.
   c) Pemerintah daerah dapat meningkatkan Pajak Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan langsung untuk belanja daerah, salah satunya melalui upaya peningkatan investasi swasta di sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), seperti hilirisasi industri asbes, batu tulis, dolomit, pasir, kerikil, marmer, dan tanah liat.
   d) Kementerian Kesehatan agar memberikan pendampingan atas kendala teknis keterbatasan vendor pengadaan pembangunan Labkesda pada Kabupaten Pringsewu, untuk mengejar keterlambatan realisasi DAK Fisik tahap I Sub Bidang Kesehatan.

2) ***Rekomendasi Terkait Progres Program Makan Bergizi Gratis***
   a) Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar dapat melakukan evaluasi berkala terhadap kriteria dan prioritas penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan cakupan yang lebih proporsional, khususnya peningkatan fokus pada kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil.
   b) BGN, Kementerian Sosial, dan Dinas Sosial di kab/kota agar meningkatkan koordinasi dan integrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan program kesehatan dan jaring pengaman sosial yang telah ada misalnya Program Percepatan Stunting (PPS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk menciptakan dampak kumulatif yang lebih besar dalam peningkatan gizi dan kesejahteraan.
   c) Pemerintah Desa, Kementerian Koperasi, dan Kementerian UMKM dapat memfasilitasi BUMDes, koperasi, serta UMKM lokal untuk memenuhi standar kualitas, kebersihan, dan sertifikasi yang diperlukan agar dapat menjadi pemasok utama bahan pangan. Hal ni dapat dilakukan melalui program pelatihan, pendampingan, dan bantuan sertifikasi.

d) Setiap SPPG di Lampung agar dapat segera memanfaatkan fitur Virtual Account untuk mengatasi permasalahan keterlambatan pembayaran gaji dan reimbursement vendor untuk menjaga motivasi dan kelancaran operasional.

3) ***Rekomendasi Terkait Strategi dan Pengembangan Koperasi***

a) Kementerian Koperasi serta Dinas Koperasi dan UMKM di daerah mengintensifkan program pelatihan dan pendidikan bagi pengurus dan anggota koperasi, dengan fokus pada literasi keuangan dan digital. Penting juga untuk mengembangkan strategi yang efektif guna menarik dan meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pengelolaan dan pengembangan koperasi.

b) Kementerian Koperasi serta Dinas Koperasi dan UMKM agar mendorong koperasi untuk mengidentifikasi dan mengembangkan fokus usaha (*core business*) yang lebih spesifik dan bervariasi di sektor riil, di luar unit simpan pinjam. Koperasi juga perlu didukung dan didampingi dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam operasional, pemasaran, dan penyediaan layanan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

c) Kementerian Koperasi serta Dinas Koperasi dan UMKM perlu memitigasi risiko keberlanjutan bisnis dengan cara memastikan bahwa Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) secara aktif melibatkan masyarakat dalam identifikasi potensi lokal dan penentuan fokus bisnis koperasi yang jelas, guna membangun desain bisnis yang benar-benar berkelanjutan ke depan.

d) Kementerian Koperasi, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Pemerintah Desa agar dapat memperpendek rantai pasok dan meningkatkan nilai tambah bagi produk-produk desa, sekaligus memperkuat inklusi keuangan di tingkat akar rumput. Dengan demikian, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi motor penggerak ekonomi kolektif, memberdayakan pelaku usaha kecil dan BUMDes yang ada, sehingga dapat memitigasi risiko saturasi pasar antara Koperasi, BUMDes, dan UMKM di daerah itu sendiri.

Terdapat rekomendasi lainnya yang dapat diakses pada bab IV kesimpulan dan rekomendasi.

DASHBOARD MAKRO-FISKAL PROVINSI LAMPUNG

Triwulan I 2025

Indikator Makro Ekonomi dan Kesejahteraan

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2025 (*yoy*)

Pertumbuhan Ekonomi Lampung 5,47% *yoy*

PDRB ADHB Rp121,70 Triliun

PDRB ADHK Rp69,56 Triliun

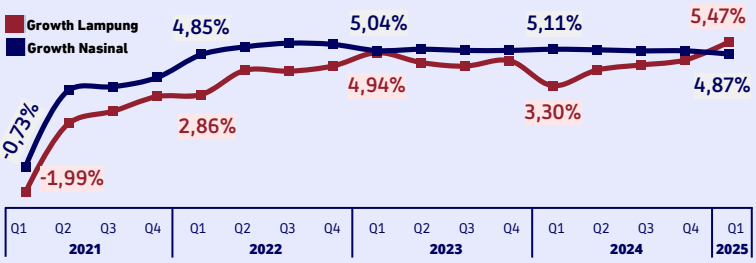

Ekonomi Provinsi Lampung mencatatkan kinerja impresif pada triwulan I 2025 dengan pertumbuhan 5,47% (*yoy*), tertinggi dalam lima tahun terakhir dan melampaui capaian nasional (4,87%) maupun regional Sumatera (4,84%). Capaian ini menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tahunan tertinggi di Pulau Sumatera.

Kontribusi 1,16% **JASA LAINNYA** 9,66% (*yoy*)

Kontribusi 55,27% **EKSPOR BARANG DAN JASA** 1,26% (*yoy*)

Pada triwulan I 2025 LU Jasa Lainnya serta Ekspor Barang dan Jasa mencatat pertumbuhan tertinggi, mencerminkan dinamika positif di sektor layanan dan daya saing produk Lampung di pasar global. Jasa Lainnya tumbuh seiring dengan pembukaan destinasi wisata baru, seperti *Kyokko Beach*. Sementara itu, ekspor terus menguat, ditopang oleh komoditas unggulan seperti kopi robusta, *crude palm oil* (CPO), dan rempah-rempah.

Distribusi PDRB Lampung di REGIONAL SUMATERA **9,68%**

Struktur PDRB Triwulan I 2025 (*yoy*)

Penopang Perekonomian Lampung dari sisi Produksi

Kontribusi 24,37% **PERTANIAN** 5,42% (*yoy*)

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Provinsi tumbuh seiring dengan normalisasi siklus panen padi pasca meredanya dampak fenomena El Nino.

Kontribusi 19,52% **INDUSTRI PENGOLAHAN** 8,79% (*yoy*)

Kinerja LU Industri Pengolahan mengalami peningkatan seiring meningkatnya permintaan baik dari pasar domestik maupun ekspor di sektor industri pengolahan.

Kontribusi 14,95% **PERDAGANGAN** 6,46% (*yoy*)

Kinerja LUPerdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan meningkat, didorong naiknya aktivitas perdagangan eceran, ekspor ke Taiwan & Filipina, serta impor dari Tiongkok & India.

Penopang Perekonomian Lampung dari sisi pengeluaran

Pengeluaran Konsumsi RT berkontribusi 64,79% terhadap PDRB Lampung, tumbuh 5,06% (*yoy*) dan 0,59% (*qtq*). Pertumbuhan didorong momen Ramadhan, hari besar keagamaan, dan gaji ke-14 yang meningkatkan konsumsi rumah tangga.

Kontribusi 64,79% **KONSUMSI RT** 5,06% (*yoy*)

PMTB berkontribusi 30,52% terhadap PDRB, menunjukkan peran investasi yang cukup besar dalam struktur ekonomi. Namun, pertumbuhannya hanya 1,26% (*yoy*) dan terkontraksi 6,75% (*qtq*) akibat turunnya belanja modal APBN dan APBD, meski didukung peningkatan realisasi PMDN.

Kontribusi 30,52% **PMTB** 1,26% (*yoy*)

Perkembangan Inflasi Provinsi Lampung

Laju Inflasi Lampung 1,58% *yoy*

IHK Mar-25 Lampung 109,05

IHK Mar-25 Nasional 107,22

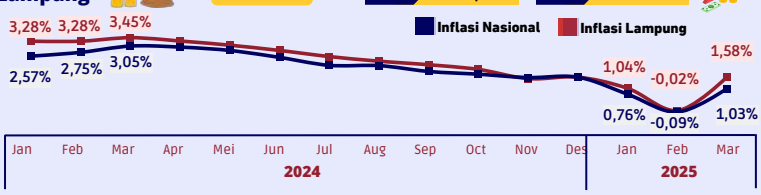

Kelompok dengan Andil Terbesar terhadap Inflasi

Makanan, Minuman, dan Tembakau 1,27% (*yoy*)

Pendidikan 0,36% (*yoy*)

Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 0,36% (*yoy*)

Highlights Inflasi Lampung Triwulan I 2025

Inflasi di Lampung triwulan I 2025 tetap terkendali dan menunjukkan tren menurun, dengan inflasi tahunan Maret 2025 sebesar 1,58% (*yoy*), sedikit di atas rata-rata nasional sebesar 1,03% (*yoy*). Tekanan inflasi bersifat musiman dan umumnya meningkat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta awal tahun ajaran baru, dengan kelompok makanan dan pendidikan menjadi kontributor utama. Untuk menjaga stabilitas harga, TPID Lampung menerapkan strategi 4K: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Kondisi Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka TPT Nasional 4,76% TPT Lampung 4,07%

3 *Terendah di Regional Sumatera*

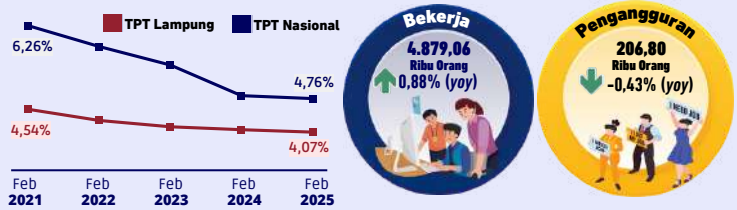

Highlights Kondisi Ketenagakerjaan Lampung 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung menunjukkan tren penurunan menjadi 4,07%, dibandingkan periode Februari 2024 yang tercatat sebesar 4,12%, mencerminkan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan ketahanan ekonomi seiring menguatnya aktivitas ekonomi. Capaian TPT Lampung juga lebih baik dibandingkan dengan capaian TPT nasional dan rata-rata TPT di regional Sumatera. Sejalan dengan struktur ekonomi Lampung, tenaga kerja terserap dominan di sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan.

Serapan Tenaga Kerja **PERTANIAN** 46,96% 0,77% poin

Serapan Tenaga Kerja **PERDAGANGAN** 17,52% -0,40% poin

Serapan Tenaga Kerja **INDUSTRI PENGOLAHAN** 8,04% -0,10% poin

Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani

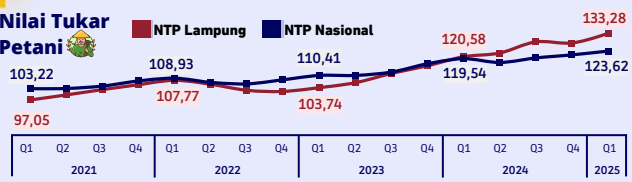

TANAMAN PANGAN 105,17 -6,67%(*yoy*)

HORTIKULTURA 114,11 -12,56% (*yoy*)

TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT 179,34 31,59% (*yoy*)

PETERNAKAN 100,54 4,43% (*yoy*)

PERIKANAN TANGKAP 113,56 3,01% (*yoy*)

PERIKANAN BUDIDAYA 96,63 -0,74% (*yoy*)

Highlights Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung Triwulan I 2025

Pada triwulan I 2025, rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung mencapai 133,28, tumbuh 10,53% (*yoy*),), lebih tinggi dari nasional namun masih di bawah rata-rata Sumatera. Pemerintah Lampung terus mendorong kesejahteraan petani melalui berbagai program subsidi, Kredit Usaha Program (KUR), Kartu Petani Berjaya (KPB), dan stabilisasi harga, termasuk penetapan harga dasar singkong sebesar Rp1.350/kg. Di sektor perikanan, peningkatan produktivitas didorong melalui program budidaya dan penguatan kelembagaan, termasuk pengembangan BBL yang melibatkan 2.079 nelayan.

Sumber data: Badan Pusat Statistik

DASHBOARD MAKRO-FISKAL PROVINSI LAMPUNG

Kinerja Fiskal Provinsi Lampung

Realisasi Pendapatan Negara

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Rp468,47 Miliar
43,01% dari target
8,22% (yoy)

Realisasi Penerimaan Perpajakan
Rp2.236,69 Miliar
22,29% dari target
55,67%% (yoy)

Total Realisasi Pendapatan Negara
24,32% dari target
Rp2.705,16 Miliar

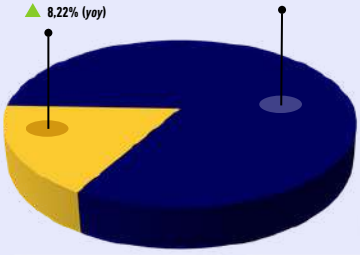

Realisasi Pendapatan Negara di Lampung

Pada triwulan I 2025, Pendapatan Negara mencatat pertumbuhan impresif sebesar 44,68% (yoy) dengan realisasi Rp2.705,16 miliar (24,32% dari target). Pencapaian ini terutama didorong naiknya harga komoditas ekspor unggulan Lampung sehingga berpengaruh pada penerimaan Bea Keluar.

Pajak Penghasilan Rp531,80 Miliar	Cukai Rp7,15 Miliar	Bea Keluar Rp843,92 Miliar
Pajak Pertambahan Nilai Rp644,43 Miliar	Pajak Lainnya Rp102,81 Miliar	PNBP Lainnya Rp247,13 Miliar
Pajak Bumi dan Bangunan Rp0,08 Miliar	Bea Masuk Rp106,51 Miliar	Pendapatan BLU Rp221,33 Miliar

Realisasi Belanja Negara

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Rp 1.579,66 Miliar
18,12% dari pagu
34,17% (yoy)

Realisasi Transfer Ke Daerah
Rp6.327,78 Miliar
27,44% dari pagu
20,48% (yoy)

Total Realisasi Belanja Negara
24,88% dari pagu
Rp7.907,44 Miliar

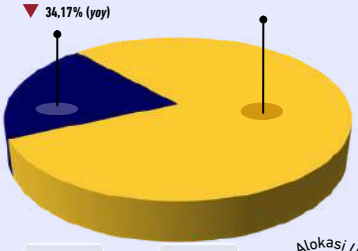

Realisasi Belanja Negara di Lampung

Pada triwulan I 2025, Belanja Negara di Lampung tumbuh 3,34% (yoy), didorong oleh peningkatan TKD yang tumbuh 20,48% (yoy) dan berkontribusi 80,02% terhadap total belanja. Sementara itu, Belanja Pemerintah Pusat terkontraksi 34,17% (yoy) akibat efisiensi pada Belanja Barang dan Modal.

Belanja Pegawai Rp1.145,36 Miliar	Belanja Barang Rp388,99 Miliar	Dana Alokasi Umum Rp4.102,21 Miliar	Dana Bagi Hasil Rp86,22 Miliar	DAK Fisik Rp0,00 Miliar
Belanja Modal Rp27,73 Miliar	Belanja Bansos Rp17,57 Miliar	DAK NonFisik Rp1.231,34 Miliar	Insentif Fiskal Rp3,67 Miliar	Dana Desa Rp904,34 Miliar

Realisasi Pendapatan Daerah

Total Realisasi Pendapatan Daerah
16,66% dari target
Rp5.412,00 Miliar

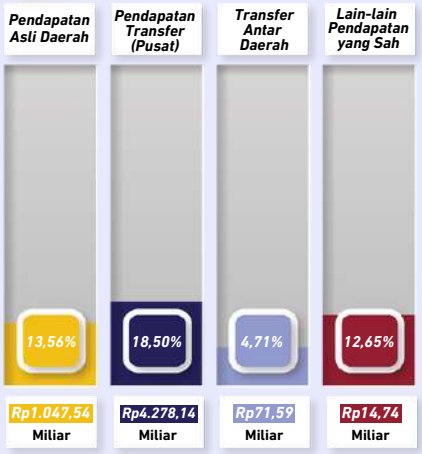

Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer (Pusat)	Transfer Antar Daerah	Lain-lain Pendapatan yang Sah
13,56%	18,50%	4,71%	12,65%
Rp1.047,54 Miliar	Rp4.278,14 Miliar	Rp71,59 Miliar	Rp14,74 Miliar

PAD Lampung mencatatkan pertumbuhan signifikan 86,14% (yoy), didorong peningkatan Pajak Daerah yang berhasil tumbuh 66,77% (yoy).

Pendapatan Transfer (Pusat) menjadi kontributor utama yaitu sebesar 79,05% dari total Pendapatan Daerah.

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah terkontraksi 27,11% (yoy) akibat perubahan skema bagi hasil menjadi opsen.

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tercatat sebesar Rp14,74 M, didominasi Pendapatan Hibah dan Dana Kapitasi JKN.

Realisasi Belanja Daerah

Total Realisasi Belanja Daerah
11,80% dari pagu
Rp3.839,29 Miliar

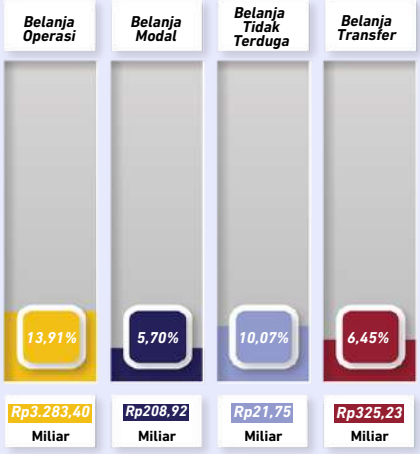

Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer
13,91%	5,70%	10,07%	6,45%
Rp3.283,40 Miliar	Rp208,92 Miliar	Rp21,75 Miliar	Rp325,23 Miliar

Belanja Operasi tumbuh 11,28% (yoy), didominasi Belanja Pegawai yang menyumbang 71,83% dari Belanja Operasi atau 61,43% dari total belanja daerah.

Realisasi Belanja Modal Provinsi Lampung sebesar Rp208,92 M atau 5,70% dari pagu, turun sebesar 37,48% (yoy) seiring penurunan alokasi pagu tahun 2025.

Realisasi Belanja Tidak Terduga mencapai 10,07% dari pagu, melonjak 579,38% (yoy), sehingga perlu dikelola secara cermat agar tetap tepat sasaran dan efisien.

Belanja Transfer terealisasi 6,45% dari pagu, turun 37,06% (yoy), terutama akibat penurunan Transfer Bagi Hasil 79,37% karena penerapan mekanisme Opsen.

Snapshot Analisis Tematik

Dukungan Pemerintah terhadap Koperasi

Belanja Pemerintah Pendukung Koperasi

Dukungan fiskal pemerintah berperan penting dalam memperkuat koperasi daerah melalui peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif.

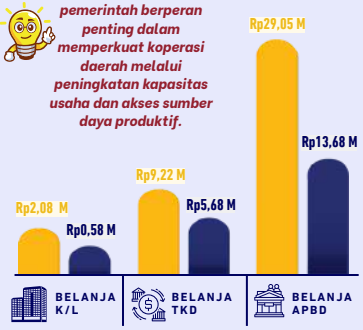

Kebijakan Strategis Pemerintah

- Program prioritas nasional dalam RPJMN
- *Grand Design* Perkoperasian Nasional
- *Road Map* Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Highlights Dukungan Pemerintah

Penurunan belanja pemerintah untuk koperasi pada 2024 menunjukkan perlunya optimalisasi efektivitas anggaran, terutama di tingkat daerah yang masih menjadi pilar utama dukungan melalui APBD. Sejalan dengan itu, pemerintah terus mendorong penguatan koperasi melalui berbagai kebijakan strategis.

Analisis Makan Bergizi Gratis (MBG)

Jumlah Penerima MBG per Kab/Kota

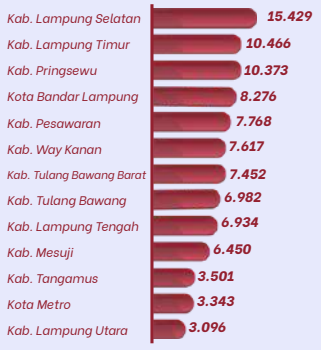

Data per 31 Maret 2025

Total Penerima MBG
97.687 Orang

Total Dukungan SPPG
34 SPPG

Anggaran per Porsi
Rp8.000 – Rp10.000

Highlights Dampak MBG

Program MBG di Lampung pada Triwulan I 2025 menunjukkan indikasi awal mendorong permintaan di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, tercermin dari kenaikan Nilai Tukar Petani di masing-masing subsektor. Lonjakan permintaan ini turut menimbulkan tekanan inflasi, terutama pada kelompok makanan, mencerminkan dampak ekspansi ekonomi yang positif namun perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi rantai pasok.

Halaman ini sengaja dikosongkan

SUPLEMEN 1
A Glimpse of Lampung

Provinsi Lampung terletak di ujung selatan Pulau Sumatera, dikenal sebagai gerbang Sumatera dengan posisi strategis yang menghubungkan Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni. Secara administratif, Lampung terdiri dari 15 Kabupaten/Kota, dengan Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota sekaligus pusat ekonomi. Luas wilayah Lampung mencapai 33.575,41 km^2, sebagian besar terdiri dari dataran rendah, pegunungan, dan kawasan pesisir. Secara ekonomi, Lampung merupakan salah satu penghasil utama komoditas pertanian, seperti kopi dan singkong, yang menjadi bagian penting dari ekspor Indonesia.

SUPLEMEN 2
Skema Subsidi Resi Gudang

DEFINISI

Sistem Resi Gudang (SRG) adalah kegiatan berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang

Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh penyalur SSRG kepada penerima SSRG dengan jaminan/agunan berupa resi gudang dan diberikan subsidi bunga/subsidi margin dari pemerintah.

TUJUAN

Jangka pendek : Penyediaan fasilitas kredit/pembiayaan untuk menjaga kesinambungan produksi (pertanian).

Jangka panjang : Stabilisasi pangan dan pengendalian inflasi.

KOMODITAS

Diberikan untuk 27 komoditas yang dapat disimpan di gudang sesuai Permendag Nomor 1 Tahun 2025 (gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, pala, ayam karkas beku, gula kristal putih, kedelai, tembakau, kayu manis, agar, karagenan, mocaf, pinang, dan tapioka).

Alur Pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang

SSRG memberikan opsi pembiayaan yang fleksibel bagi Petani dalam ekosistem pembiayaan dari Pemerintah

1 **Pemilik barang** membawa komoditi ke Gudang SRG dan mengajukan permohonan penyimpanan barang kepada Pengelola Gudang SRG

2 Pengelola Gudang melakukan penimbangan barang, lalu LPK Uji Mutumelakukan **pengujian kualitas barang.**

Jika telah memenuhi persyaratan mutu, maka barangakan dibebani **asuransi** dan dilanjutkan dengan serangkaian proses penerbitan Resi Gudang melalui *Information Sistem Warehouse Receipt* - ISWARE (Pusat Registrasi)

4 Pemilik barang/pemegang Resi Gudang dapat mengajukan **pembiayaan** ke Lembaga Keuangan dengan agunan Resi Gudang

5 Barang SRG **dijual** ke PASAR (pedagang besar, pabrikan, eksportir, dll), baik secara langsung maupuntidak langsung (lelang), baik secara *offline* maupun *online*.

Apabila barang sedang dijaminkan pada Lembaga Pembiayaan, maka pemilik barang/pemegang Resi Gudang terlebih dahulu melakukan pelunasan ke Lembaga Pembiayaan

Beban Penerima 6,00%

Subsidi Bunga 5,50%

Tenor Maksimal 12 Bulan

Batas Kredit 70% dari nilai RG Maksimal Rp500 juta

BAB 1
ANALISIS EKONOMI REGIONAL

> Melalui #UangKita untuk berbagai stimulus ekonomi, setiap keluarga mendapat kesempatan yang lebih adil untuk kesejahteraan
> **-@ditjenperbendaharaan-**

BAB 1 ANALISIS EKONOMI REGIONAL

1.1 ANALISIS INDIKATOR MAKRO EKONOMI

Indikator makro ekonomi berfungsi untuk membantu dan memprediksi perkembangan kinerja perekonomian suatu daerah. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa indikator makro ekonomi, antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Suku Bunga; Inflasi; dan Nilai Tukar.

1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Pengeluaran dan Lapangan Usaha

1.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Secara *year-on-year* (*yoy*), pada triwulan I 2025 perekonomian Lampung tumbuh sebesar 5,47%, mencatatkan pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Capaian ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,87% dan regional Sumatera sebesar 4,85%, sebagaimana ditunjukkan pada grafik 1.1.

Grafik 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Lampung, Sumatera, dan Nasional Triwulan I 2021 – Triwulan I 2025 (% *yoy*)

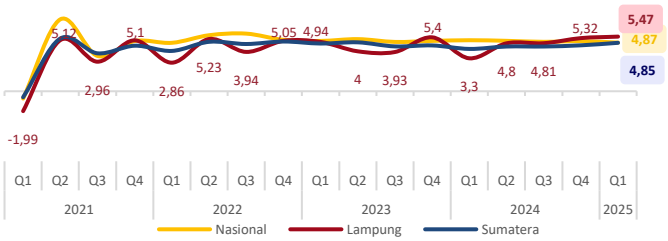

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi Lampung triwulan I 2025 ditopang oleh kinerja sejumlah lapangan usaha, terutama Jasa Lainnya yang tumbuh signifikan sebesar 9,66% seiring dengan peningkatan wisata selama libur lebaran, kemudian disusul Industri Pengolahan (8,79%) serta Transportasi dan Pergudangan (8,20%). Dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 12,96%, diikuti pengeluaran LNPRT yang tumbuh 5,06%. Kinerja positif ini mendorong Lampung mencatatkan pertumbuhan ekonomi tahunan (*yoy*) tertinggi di Pulau Sumatera, mencerminkan resiliensi dan momentum pemulihan yang kuat. Ke depan, pola musiman perlu diantisipasi, terutama di tengah ketidakpastian global akibat perang dagang yang berpotensi menekan kinerja ekspor.

Gambar 1.1. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan I Tahun 2025

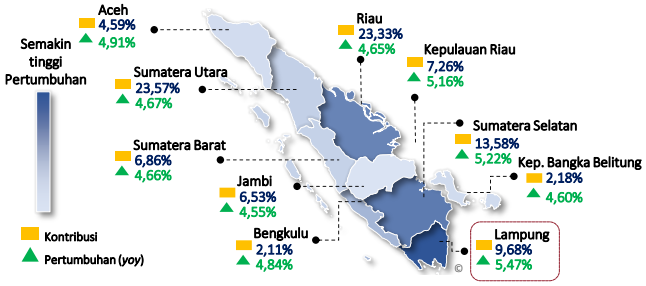

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Secara *quarter-to-quarter* (*qtq*), ekonomi Lampung pada triwulan I 2025 terkontraksi 1,11%, membaik dibanding kontraksi 1,24% pada triwulan sebelumnya, dan lebih baik dari capaian ekonomi Sumatera yang terkontraksi 1,34%. Namun, kinerja ini masih di bawah ekonomi nasional yang hanya terkontraksi 0,98%, sebagaimana terlihat pada grafik 1.2. Kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,65%, dipicu penurunan penyaluran gas kota. Dari sisi pengeluaran, kontraksi terbesar terjadi pada Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP), seiring penurunan realisasi belanja barang dan jasa baik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Grafik 1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung, Sumatera, dan Nasional Triwulan I 2021 – Triwulan I 2025 (% *qtq*)

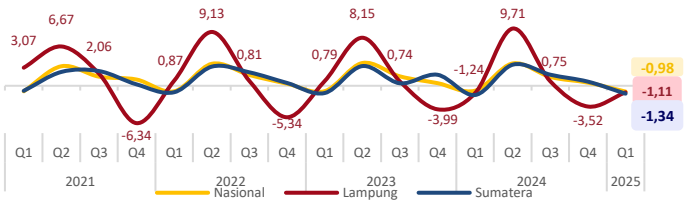

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

1.1.1.2 Nominal dan Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Pengeluaran

Pada Triwulan I 2025, PDRB Lampung tercatat sebesar Rp121,70 triliun (Atas Dasar Harga Berlaku

– ADHB) dan Rp69,56 triliun (Atas Dasar Harga Konstan – ADHK), meningkat signifikan dari Rp58,15 triliun pada Triwulan I 2021. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor harga, tetapi juga didorong oleh peningkatan volume output. Artinya, pertumbuhan ekonomi Lampung berlangsung secara lebih berkualitas dan berkelanjutan, tidak sekadar nominal.

Grafik 1.3. Perkembangan Nominal PDRB ADHK dan PDRB ADHB Lampung Triwulan I 2021 – Triwulan I 2025 (dalam Triliun Rupiah)

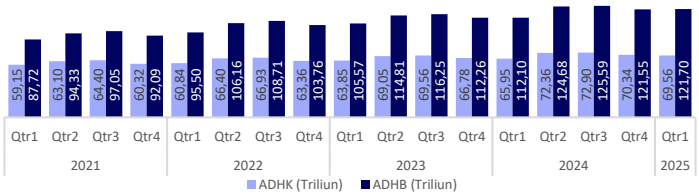

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

PDRB berdasarkan pengeluaran mengukur aktivitas ekonomi dari penjumlahan nilai barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pengguna akhir. Pada triwulan I 2025, struktur PDRB Lampung dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi terbesar sebesar 64,79%. Hal ini mencerminkan tingginya ketergantungan terhadap konsumsi domestik sebagai motor utama pertumbuhan, namun juga menunjukkan potensi risiko apabila daya beli masyarakat mengalami tekanan.

Grafik 1.4. *Share* dan Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Pengeluaran Triwulan I 2025 (%)

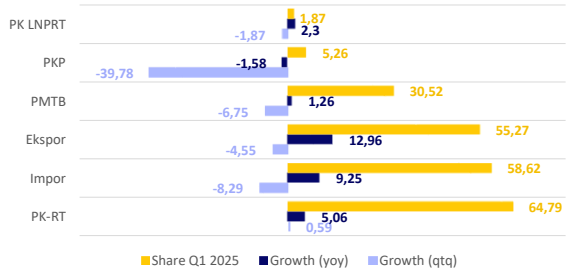

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Grafik 1.4 menunjukkan bahwa pertumbuhan tahunan komponen PDRB sebagian besar positif, sementara pertumbuhan kuartalan cenderung terkontraksi. Penurunan konsumsi antar kuartal umumnya disebabkan oleh faktor musiman dan dinamika perilaku konsumen dalam jangka pendek, sedangkan pertumbuhan tahunan merefleksikan tren jangka panjang, seperti bertambahnya jumlah pengguna serta perkembangan infrastruktur secara berkelanjutan.

a. *Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)*
Pada Triwulan I 2025, PK-RT berkontribusi sebesar 64,79% terhadap PDRB Lampung, dengan pertumbuhan 5,06% (*yoy*) dan 0,59% (*qtq*). Pertumbuhan ini didorong oleh momentum Ramadhan, perayaan hari besar keagamaan, penyaluran bansos tunai, serta pembayaran gaji ke-14 yang mendorong peningkatan konsumsi, khususnya pada kelompok makanan, perumahan, transportasi, dan rekreasi.

b. *Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT)*
Pada Triwulan I 2025, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) berkontribusi sebesar 1,87% terhadap PDRB Lampung dan tumbuh 2,30% (*yoy*), namun mengalami kontraksi 1,87% (*qtq*). Kontraksi ini sejalan dengan penurunan nilai penjualan listrik untuk golongan tarif sosial, yang tercatat menurun sebesar 8,70% dibandingkan triwulan IV 2024. Penurunan tersebut turut dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas partai politik, mengingat pada triwulan sebelumnya terdapat momentum pilkada yang menyebabkan lonjakan aktivitas pada lembaga-lembaga nonprofit, khususnya partai politik.

c. *Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P)*
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) mencatat kontraksi sebesar 1,58% (*yoy*) dan penurunan yang lebih dalam secara triwulanan sebesar 39,78% (*qtq*). Kontraksi ini dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi belanja barang dan jasa yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Meski mengalami tekanan, PKP tetap berkontribusi sebesar 5,26% terhadap ekonomi Lampung, menunjukkan peran pemerintah yang tetap signifikan dalam menjaga aktivitas perekonomian di tengah pengetatan anggaran.

d. *Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)*
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memberikan kontribusi sebesar 30,52%

terhadap PDRB, mencerminkan peran investasi yang cukup signifikan dalam struktur ekonomi daerah. Namun demikian, kinerjanya masih perlu dioptimalkan. PMTB tumbuh 1,26% (*yoy*) didorong oleh peningkatan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), tetapi terkontraksi 6,75% (*qtq*), antara lain disebabkan oleh penurunan belanja modal APBN dan APBD. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran PMTB sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah masih belum optimal dan memerlukan penguatan lebih lanjut.

e. *Ekspor / Impor Barang dan Jasa*

Pada Triwulan I 2025, Lampung mencatatkan net impor dengan kontribusi ekspor sebesar 55,27% dan impor 58,62%. Kondisi ini menegaskan perlunya strategi peningkatan daya saing ekspor guna menjaga kinerja perdagangan luar negeri. Ekspor tumbuh 12,96% (*yoy*), tertinggi di antara komponen lainnya, didorong oleh peningkatan ekspor lemak dan minyak hewan sebesar 57,75% (*yoy*) serta kopi, teh, dan rempah-rempah 573,42% (*yoy*). Namun, secara *qtq* ekspor terkontraksi 4,55% akibat penurunan volume dan nilai sejumlah komoditas utama. Sementara itu, impor tumbuh 9,25% (*yoy*), terutama berasal dari migas, pupuk, dan ampas/sisa industri makanan, namun melemah 8,29% (*qtq*) seiring menurunnya aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan.

1.1.1.3 Nominal dan Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha (LU) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dari kegiatan produksi barang dan jasa di suatu wilayah. Nilai tambah ini mencerminkan kontribusi masing-masing LU terhadap perekonomian daerah. Pada Triwulan I 2025, sebagian besar lapangan usaha di Provinsi Lampung menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan tahunan (*yoy*).

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan konsisten menjadi *leading sector* Lapangan Usaha (LU) dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Lampung, yaitu sebesar 24,37% pada Triwulan I 2025. Komponen LU lain dengan *share* kontribusi terbesar selanjutnya adalah Industri Pengolahan (19,52%), Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan (14,95%), serta Konstruksi (9,27%).

Grafik 1.5. *Share* dan Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Triwulan I 2025 (%)

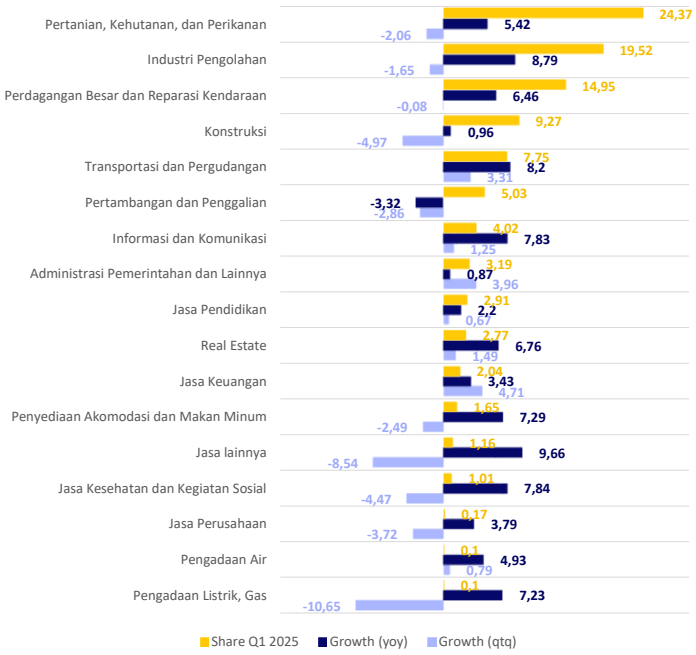

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

a. *Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan*

Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung pada Triwulan I 2025 masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dengan kontribusi mencapai 24,37%. Sektor ini tumbuh 5,42% (*yoy*), seiring dengan normalisasi siklus panen padi pasca meredanya dampak fenomena El Nino. Namun, terjadi kontraksi sebesar 2,06% (*qtq*) akibat penurunan produksi tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura yang dipengaruhi oleh curah hujan tinggi serta masa tutup giling tebu.

b. *Industri Pengolahan*

Pada Triwulan I 2025, sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi sebesar 19,52% terhadap nilai PDRB Provinsi Lampung dan mencatat pertumbuhan tahunan sebesar 8,76% (*yoy*). Pertumbuhan ini terutama didorong oleh aktivitas industri makanan dan minuman yang stabil serta mengalami peningkatan seiring

meningkatnya permintaan baik dari pasar domestik maupun ekspor di sektor industri pengolahan sebesar 33,69% (*yoy*). Namun, secara kuartal, sektor ini mengalami kontraksi sebesar 1,65% (*qtq*) yang terutama disebabkan oleh masa tutup giling pada industri pengolahan gula. Kondisi ini sejalan dengan kontraksi yang terjadi pada sektor pertanian, dimana terjadi penurunan tanaman perkebunan disebabkan curah hujan tinggi dan masa tutup giling tebu.

c. *Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan*

Sektor Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan menyumbang 14,95% terhadap total PDRB Lampung pada Triwulan I 2025, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 6,46% (*yoy*), didorong oleh peningkatan aktivitas perdagangan eceran, ekspor ke Taiwan dan Filipina, serta impor dari Tiongkok dan India. Namun, secara kuartalan sektor ini terkontraksi tipis sebesar 0,08% (*qtq*), dipengaruhi oleh melambatnya ekspor luar negeri serta penurunan penjualan mobil penumpang, mobil barang, kendaraan khusus dan sepeda motor.

d. *Konstruksi*

Lapangan Usaha Konstruksi menyumbang 9,27% terhadap PDRB Lampung pada Triwulan I 2025, dengan pertumbuhan tipis sebesar 0,96% (*yoy*) seiring meningkatnya realisasi pengadaan semen. Namun secara kuartalan, sektor ini terkontraksi 4,97% (*qtq*) akibat perlambatan aktivitas pengadaan bahan bangunan sejalan dengan efisiensi belanja modal.

1.1.1.4 Kontribusi Fiskal (Pengeluaran Pemerintah) Terhadap Pembentukan PDRB

Pengeluaran pemerintah memegang peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama melalui pengaruhnya terhadap sektor-sektor produktif. Dalam teori Keynesian, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh besarnya konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan net ekspor (NX), sebagaimana dirumuskan dalam persamaan:

$$Y = C + I + G + NX$$

Dimana Y mewakili pendapatan nasional sekaligus penawaran agregat, C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, dan NX (X-M) adalah net ekspor.

Di Provinsi Lampung, realisasi belanja pemerintah yang bersumber dari APBN dan APBD menunjukkan tren penurunan. Pada triwulan I 2025, total belanja tercatat sebesar Rp5.859,79 miliar, turun 22,4% dibandingkan triwulan I 2024 (Rp7.552,08 miliar) dan turun 5,7% dibandingkan triwulan I 2023 (Rp6.211,99 miliar). Penurunan ini mencerminkan berkurangnya peran fiskal dalam menopang aktivitas ekonomi daerah secara langsung.

Grafik 1.6. Kontribusi Fiskal terhadap sektor riil ekonomi Lampung Triwulan I Periode 2023 – 2025 (Rp Miliar)

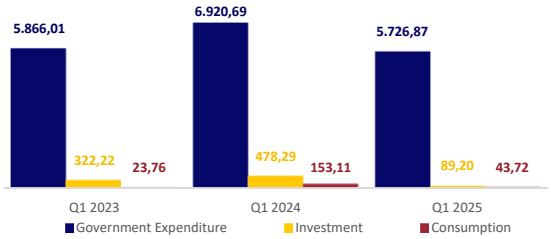

Sumber: ALCo Regional Lampung, 2025 (diolah)

Secara lebih rinci, konsolidasi belanja pemerintah di Lampung mencerminkan kontribusinya terhadap berbagai komponen dalam pendekatan pengeluaran sebagai berikut:

- *Kontribusi dalam Pengeluaran Pemerintah (G)*

  Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, belanja lain-lain, serta transfer ke daerah berperan dominan dalam mendukung pengeluaran pemerintah, dengan total realisasi mencapai Rp5.726,87 miliar atau 97,73% dari total belanja konsolidasi. Besarnya porsi ini mencerminkan peran strategis pemerintah dalam menjaga kelangsungan operasional sektor publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- *Kontribusi dalam Investasi (I)*

  Belanja modal berkontribusi pada investasi melalui pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor produktif, dengan nilai mencapai Rp89,19 miliar atau 1,52% dari total belanja. Meskipun porsinya relatif kecil, belanja ini penting dalam meningkatkan kapasitas

ekonomi daerah dan mendorong pertumbuhan jangka panjang.

- *Kontribusi dalam Konsumsi Pemerintah (C)*

  Belanja hibah dan bantuan sosial mendukung konsumsi pemerintah, yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Nilai belanja pada kategori ini sebesar Rp43,72 miliar atau 0,75% dari total belanja konsolidasi. Alokasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat melalui berbagai program.

1.1.2 Suku Bunga

BI 7-Day *Reverse Repo Rate* (BI7DRR) adalah instrumen operasi pasar terbuka Bank Indonesia yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi, memperkuat transmisi kebijakan moneter, dan mengatur jumlah uang beredar. Kenaikan suku bunga menekan permintaan kredit dan konsumsi, sedangkan penurunan suku bunga mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun suku bunga naik, Bank Indonesia tetap mendukung penyaluran kredit melalui kebijakan makroprudensial, termasuk insentif bagi sektor prioritas. Penetapan suku bunga dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah guna mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Grafik 1.7. Perkembangan *BI 7-Day Repo Rate* dan Inflasi Lampung Triwulan I 2021 – Triwulan I 2025

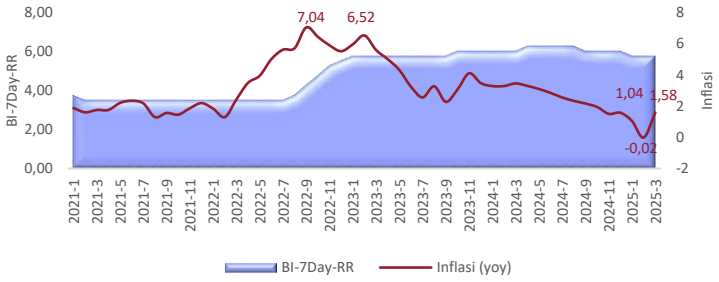

Sumber: Bank Indonesia dan BPS, 2025 (diolah)

BI-Rate cenderung stabil pada kisaran 3,50% hingga pertengahan 2022. Tren ini mencerminkan kebijakan moneter akomodatif Bank Indonesia guna mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Namun, memasuki paruh kedua tahun 2022, Bank Indonesia mulai menaikkan suku bunga secara bertahap sebagai respons terhadap lonjakan inflasi yang terjadi seiring dengan tekanan global dan domestik.

Puncak inflasi terjadi pada September 2022 dan Februari 2023, masing-masing mencapai level di atas 5%, didorong oleh tekanan harga energi, pangan, serta dampak penyesuaian harga yang bersifat *administered*. Kenaikan inflasi tersebut direspons oleh Bank Indonesia melalui kebijakan moneter yang lebih ketat dengan menaikkan BI-Rate secara bertahap hingga mencapai 5,75% pada awal 2023.

Sepanjang tahun 2024, *BI-Rate* tercatat stabil di level 6,00% pada triwulan I, kemudian naik menjadi 6,25% pada pertengahan tahun, sebelum kembali diturunkan ke level 6,00% pada akhir 2024 dan berada pada 5,75% di awal 2025. Pergerakan BI-Rate selama tahun 2024 mencerminkan strategi kebijakan moneter yang *prudent* dan *measured*, seiring upaya menjaga stabilitas harga dan nilai tukar di tengah tren penurunan inflasi.

Meskipun inflasi menunjukkan tren penurunan yang signifikan sepanjang 2024, bahkan sempat berada di bawah 1% pada awal 2025, Bank Indonesia tetap menjaga tingkat suku bunga acuan relatif tinggi. Hal ini mencerminkan komitmen Bank Indonesia dalam mengendalikan ekspektasi inflasi, menjaga stabilitas makroekonomi dan nilai tukar, serta memastikan agar inflasi tetap berada dalam kisaran target 2,5% ± 1% pada 2025, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi secara berkelanjutan.

1.1.3 Inflasi

1.1.3.1 Pergerakan Inflasi di Lampung

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan, yang berdampak pada penurunan nilai uang dan daya beli masyarakat (The Fed). Pergerakan inflasi (*yoy*) di awal triwulan I 2025 menunjukkan tren penurunan bahkan di bawah rentan sasaran sebesar 2,5 ± 1 persen. Pola inflasi tahunan di Provinsi Lampung relatif sejalan dengan tren nasional, yang umumnya dipengaruhi oleh harga pangan yang bergejolak karena multi faktor dan harga komoditas yang diatur pemerintah.

Pada Maret 2024, Provinsi Lampung mencatat inflasi tahunan sebesar 1,58% (*yoy*) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,05. Inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Mesuji sebesar 2,54% (*yoy*) dengan IHK 113,13, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Metro sebesar 1,39% (*yoy*) dengan IHK 107,25. Di Kota Bandar Lampung, inflasi mencapai 1,45% (*yoy*) dengan IHK 107,54, sementara Kabupaten Lampung Timur mencatat inflasi sebesar 1,71% (*yoy*) dengan IHK 111,86.

Grafik 1.8. Perkembangan Inflasi Lampung Tahun 2023 – Triwulan I 2025 (% *yoy*)

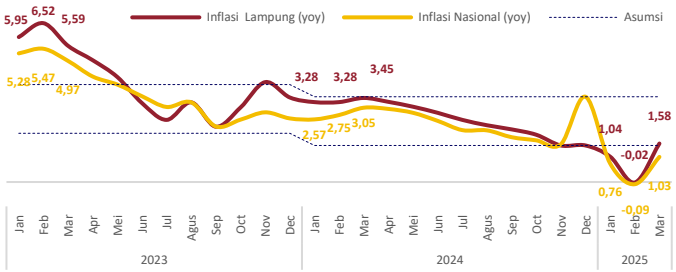

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi (*yoy*) pada Maret 2025 antara lain bawang merah sebesar 0,55%, emas perhiasan 0,32%, biaya akademi/perguruan tinggi 0,26%, kopi bubuk 0,23%, dan sigaret kretek mesin (SKM) sebesar 0,21%.

Tabel 1.1. Rincian Andil Inflasi Bulan Maret 2025 per Komoditas (% *yoy*)

Kelompok Pengeluaran	Andil Inflasi Mar 2025 (%yoy)	Inflasi Mar 2025 (%yoy)
Umum	**1,58**	**1,58**
Makanan, Minuman, dan Tembakau	1,27	3,76
Pakaian dan Alas Kaki	0,07	1,07
Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar RT	-0,74	-5,84
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	0,01	0,24
Kesehatan	0,03	1,36
Transportasi	0,08	0,73
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,04	-0,68
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,07	3,83
Pendidikan	0,36	5,64
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,11	1,40
Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya	0,36	5,97

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Secara lebih rinci, inflasi di Provinsi Lampung pada Maret 2024 dipicu oleh kenaikan harga pada delapan kelompok pengeluaran dalam Indeks Harga Konsumen (IHK). Tiga kelompok yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi tersebut adalah: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,27%; kelompok pendidikan sebesar 0,36%; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,36%. Sementara itu, terdapat kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan IHK yaitu Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar Rumah Tangga 5,84% dan Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 0,68%.

Grafik 1.9. Pergerakan Laju Inflasi Lampung, Provinsi di Regional Sumatera, dan Nasional (% *yoy*)

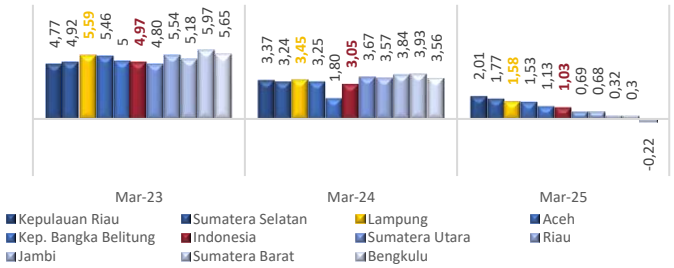

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Pada Maret 2025, inflasi tahunan Provinsi Lampung tercatat sebesar 1,57%, tertinggi ketiga di Sumatera. Meskipun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tekanan inflasi Lampung masih tergolong tinggi secara regional. Penurunan inflasi di Lampung dan wilayah Sumatera lainnya dipengaruhi oleh meredanya *administered prices*, terutama karena kebijakan diskon tarif listrik pascabayar yang diberlakukan secara nasional sebagai stimulus perekonomian.

Grafik 1.10. Perkembangan Inflasi Lampung Tahun 2023 – Triwulan I 2025 (% *mtm*)

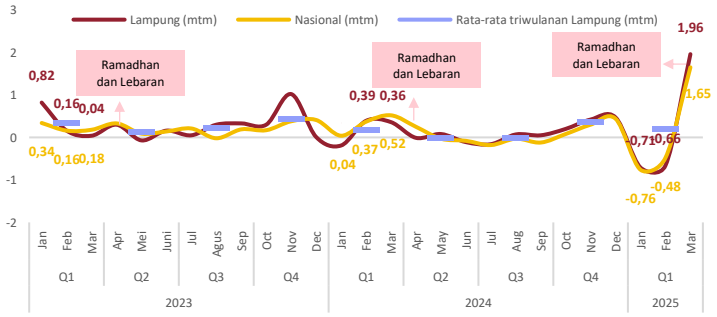

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Rata-rata inflasi bulanan Lampung pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 0,20% (*mtm*), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2024 yang mencapai 0,34% (*mtm*). Pola inflasi di Indonesia, termasuk Lampung, cenderung bersifat musiman, di mana momen-momen tertentu seperti Ramadan dan Idulfitri, libur Natal dan Tahun Baru, serta awal tahun ajaran baru sering mendorong kenaikan harga, khususnya pada kelompok makanan dan pendidikan. Setelah periode Idul fitri, tren inflasi bulanan (*mtm*) umumnya menunjukkan

kecenderungan menurun seiring normalisasi aktivitas konsumsi masyarakat.

Di triwulan I 2025, Provinsi Lampung mengalami deflasi pada bulan Januari dan Februari masing-masing sebesar 0,71% (*mtm*) dan 0,66% (*mtm*), yang didominasi oleh penurunan tarif listrik. Deflasi ini sejalan dengan kebijakan diskon 50 persen yang diberikan oleh PT PLN (Persero) kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA, 900 VA, dan 1.300 VA selama Januari hingga Februari 2025. Kebijakan tersebut memberikan keringanan yang signifikan bagi masyarakat dan berkontribusi langsung terhadap tren deflasi di wilayah Lampung. Namun, pada Maret 2025, Lampung kembali mencatat inflasi bulanan sebesar 1,96% (*mtm*), terutama disebabkan oleh kenaikan tarif listrik pasca berakhirnya program diskon, dengan kontribusi inflasi dari komponen ini mencapai 1,25% (*mtm*).

Secara keseluruhan, *administered prices* memiliki peran yang sangat signifikan terhadap pergerakan inflasi di triwulan I 2025. Dinamika harga yang dipengaruhi kebijakan pemerintah, khususnya terkait energi, terbukti mampu membentuk pola inflasi bulanan yang fluktuatif, dari deflasi di awal triwulan hingga lonjakan inflasi di bulan berikutnya.

1.1.3.2 Pengendalian Inflasi

Pengendalian inflasi merupakan prasyarat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang rendah dan stabil menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Stabilitas harga mempermudah rumah tangga dan pelaku usaha dalam menyusun perencanaan keuangan, sekaligus menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah yang paling rentan terhadap lonjakan harga.

Karakteristik inflasi di Indonesia dan Lampung cenderung dipengaruhi oleh fluktuasi harga pangan serta komoditas yang diatur pemerintah (*administered prices*). Oleh karena itu, menjaga inflasi pada tingkat yang terkendali tidak cukup hanya dengan instrumen moneter. Diperlukan sinergi kebijakan antara otoritas moneter dan fiskal, serta koordinasi lintas sektor yang mencakup aspek pasokan, distribusi, infrastruktur, struktur pasar, hingga pengelolaan ekspektasi masyarakat.

Urgensi pengendalian inflasi juga berkaitan erat dengan dimensi sosial dan politik. Inflasi yang tidak terkendali dapat meningkatkan angka kemiskinan, memperburuk distribusi pendapatan, menurunkan kepercayaan dunia usaha, hingga mengganggu stabilitas politik. Dalam konteks ini, pengendalian inflasi menjadi komoditas politik yang mencerminkan kredibilitas pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Sejalan dengan kebutuhan akan sinergi lintas sektor dan konsistensi kebijakan pengendalian inflasi, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung bersama *counterparts* Kemenkeu Satu regional Lampung, BI, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengimplementasikan strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yaitu: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

a. Keterjangkauan Harga: Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Bulog di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dan operasi pasar, serta pasar murah sebanyak 10 kali. Kegiatan pasar murah tersebut dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Peternakan Provinsi Lampung, Halaman Apel Kantor Pemerintah Provinsi, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pringsewu, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, dan Polda Lampung. Selain itu, pemerintah juga mendorong penyaluran bantuan sosial dan subsidi untuk memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Upaya ini tidak berdiri sendiri, melainkan turut diperkuat oleh alokasi fiskal dari kementerian/lembaga (K/L), dengan realisasi belanja hingga Triwulan I 2025 mencapai Rp30 juta (12,03% dari pagu Rp249,40 juta), mencerminkan peran fiskal dalam memperkuat konsumsi rumah tangga, khususnya kelompok rentan;
b. Ketersediaan Pasokan: Melaksanakan pemantauan secara intensif dan menyeluruh guna memastikan ketersediaan stok bahan

pangan di seluruh lini, mulai dari gudang Bulog, distributor, hingga lapisan pasar, sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan mengantisipasi potensi gejolak harga. Selain itu, melanjutkan perluasan akseptasi Kartu Petani Berjaya (KPB) dan perluasan adopsi teknologi dalam budidaya pertanian untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian dan UMKM Dukungan terhadap aspek ini juga tercermin dari alokasi belanja K/L yang hingga triwulan I 2025 telah terealisasi sebesar Rp2,19 miliar (0,51% dari pagu Rp430,60 miliar). Ini menunjukkan masih luasnya ruang fiskal yang tersedia untuk memperkuat ketahanan pangan dan efisiensi sistem pasok secara berkelanjutan;

c. Kelancaran Distribusi: Dilakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan kelancaran arus transportasi, antara lain melalui, pengaturan lalu lintas yang lebih tertib, peningkatan frekuensi penerbangan, serta optimalisasi Pelabuhan Panjang sebagai alternatif untuk mendistribusikan kepadatan arus di Pelabuhan Bakauheni secara lebih merata dan efisien. Sejalan dengan itu, belanja K/L yang mendukung aspek ini telah terealisasi sebesar Rp371,44 juta (10,26% dari pagu Rp3,62 miliar) pada triwulan I 2025. Ini mencerminkan komitmen dalam meningkatkan konektivitas wilayah serta memastikan kelancaran arus barang untuk menopang stabilitas harga;

d. Komunikasi yang efektif: Penguatan koordinasi dan sinergi dilakukan melalui kegiatan *High Level Meeting* (HLM) TPID di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Selain itu, pengelolaan ekspektasi masyarakat turut diperkuat dengan penyampaian informasi yang transparan terkait kecukupan pasokan dan kewajaran harga berbagai komoditas, yang disampaikan secara luas melalui media resmi pemerintah daerah, serta berbagai saluran komunikasi publik seperti Lampung Post, Antara, dan TVRI. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi juga dilaksanakan setiap minggu, dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri bersama kementerian/lembaga terkait, guna membahas langkah-langkah konkret yang dapat ditempuh secara kolektif dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di tingkat regional. Langkah ini juga didukung oleh alokasi belanja K/L, dengan realisasi hingga triwulan I 2025 sebesar Rp160,79 juta (2,22% dari pagu Rp7,24 miliar). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan ekspektasi melalui komunikasi yang transparan merupakan bagian integral dari strategi pengendalian inflasi yang komprehensif.

1.1.4 Nilai Tukar

Nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan dengan unit mata uang negara lain. Analisis nilai tukar penting untuk menilai dampaknya terhadap indikator makroekonomi, termasuk kinerja Neraca Perdagangan Luar Negeri di Provinsi Lampung.

Grafik 1.11. Tren Pergerakan rata-rata Kurs Tengah Rupiah terhadap US$1 dan Neraca Perdagangan Luar Negeri Lampung (juta USD) per bulan Tahun 2022 – Triwulan I 2025

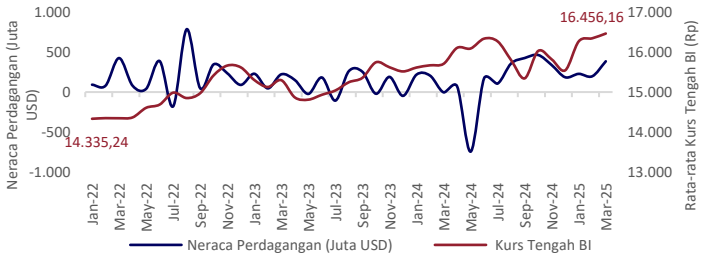

Sumber: Bank Indonesia dan Kanwil DJBC Sumbagbar, 2025 (diolah)

Pada periode Januari 2022 hingga Maret 2025, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat mengalami tren depresiasi secara umum, bergerak dari Rp14.335,24 pada Januari 2022 hingga mencapai Rp16.456,16 pada Maret 2025. Kenaikan rata-rata nilai tukar menunjukkan pelemahan Rupiah terhadap Dolar AS. Kondisi nilai tukar ini berpotensi meningkatkan daya saing ekspor, karena pelemahan Rupiah menjadikan harga produk domestik relatif lebih murah di pasar internasional. Namun, volatilitas nilai tukar juga dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha, terutama dalam hal pembiayaan impor dan fluktuasi biaya produksi.

Kinerja ekspor Lampung pada Triwulan I 2025 mencatatkan pertumbuhan yang terbatas sebesar 1,19% (*qtq*). Kenaikan ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekspor pada triwulan sebelumnya, yang mencapai 15,57% (*qtq*). Meskipun demikian, secara tahunan (*yoy*), ekspor mengalami peningkatan sebesar 53,12%, ditopang oleh komoditas utama seperti *Crude Palm Oil* (CPO) dan kopi robusta yang permintaannya tetap kuat di pasar global.

Grafik 1.12. Tren Ekspor, Impor (juta USD) Lampung Tahun 2022 – Triwulan I 2025

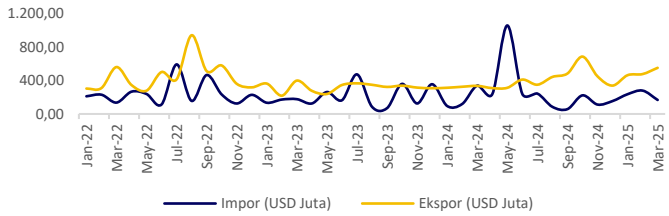

Sumber: Bank Indonesia dan Kanwil DJBC Sumbagbar, 2025 (diolah)

Impor Lampung pada Triwulan I 2025 tercatat meningkat sebesar 39,53% (*qtq*), didorong oleh naiknya impor bahan baku dan barang konsumsi. Sementara itu, impor barang modal justru turun tajam sebesar 70,11% (*qtq*). Secara tahunan, total impor tumbuh 23,18% (*yoy*), terutama akibat lonjakan impor barang konsumsi sebesar 278,23% (*yoy*). Kenaikan impor bahan baku sebesar 32,11% (*yoy*) juga mencerminkan aktivitas industri yang mulai menggeliat, meskipun impor barang modal masih terkontraksi 61,78% (*yoy*).

Pergerakan nilai tukar Rupiah yang cenderung melemah pada Triwulan I 2025 dapat memberikan tekanan pada nilai impor dalam Rupiah, namun secara umum tidak menghambat tren peningkatan permintaan barang impor, khususnya barang konsumsi dan bahan baku. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor struktural seperti permintaan domestik dan siklus produksi industri memiliki pengaruh yang cukup kuat.

1.1.5 Risiko Ketidakpastian Global Terhadap Provinsi Lampung

Ketidakpastian global meningkat seiring dengan diberlakukannya kebijakan tarif perdagangan oleh Amerika Serikat yang dikenal sebagai *Tarif Trump* 2.0 pada 1 Februari 2025. Kebijakan ini menaikkan tarif perdagangan terhadap Kanada, Meksiko, dan Tiongkok, sehingga menimbulkan sentimen negatif di pasar global.

Tiongkok merespons pada 4 Februari 2025 dengan tarif balasan, yaitu 15% untuk impor batu bara dan LNG, serta 10% untuk minyak mentah, mesin pertanian, kendaraan, dan truk dari AS. Tidak lama setelah itu, AS menetapkan tarif impor 25% untuk produk baja dan aluminium dari seluruh negara. Selanjutnya, pada 4 Maret 2025, Kanada juga memberlakukan tarif balasan sebesar 25% terhadap produk dari AS.

Ketegangan makin meningkat saat Tiongkok kembali menambah tarif 10–15% untuk produk pertanian dan makanan asal AS pada 10 Maret 2025, serta membatasi ekspor dan investasi pada 25 perusahaan AS. Terakhir, pada 11 Maret 2025, AS kembali menaikkan tarif 25% terhadap impor baja dan aluminium dari Kanada. Kondisi ini mencerminkan rentannya sistem perdagangan global terhadap kebijakan sepihak, yang disebut sebagian pengamat sebagai "*the world game*". Amerika Serikat secara eksplisit menargetkan negara-negara yang memiliki surplus perdagangan terhadapnya, termasuk Indonesia yang tercatat sebagai salah satu dari 15 negara dengan surplus perdagangan tertinggi terhadap AS.

Dampak dari kebijakan *Tarif Trump 2.0* terhadap Indonesia antara lain:

a. Pengenaan tarif kepada negara dengan surplus dagang terhadap AS;
b. Kenaikan biaya sektor manufaktur dan digital;
c. Disrupsi rantai pasok global yang menuntut relokasi dan rekonfigurasi;
d. Volatilitas harga komoditas dan gejolak pasar keuangan.

Sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama dunia, kebijakan perdagangan AS memiliki dampak luas terhadap ekonomi global, termasuk Indonesia. Meskipun *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur Indonesia pada Maret 2025 tetap ekspansif di angka 52,4, tekanan harga komoditas masih terasa dan berdampak pada penerimaan negara, baik dari PNBP maupun pajak.

Di Lampung, yang mengandalkan ekspor komoditas seperti *Crude Palm Oil* (CPO), fluktuasi harga menjadi tantangan utama. Per Maret 2025, harga CPO naik 21,5% (*yoy*), namun turun 13,3% (*ytd*) dan 10,9% (*mtm*), yang berpotensi menurunkan pendapatan negara dan daya saing produk unggulan di pasar global.

1.2 ANALISIS INDIKATOR KESEJAHTERAAN

Bagian ini akan menjelaskan beberapa indikator kesejahteraan, antara lain Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Nilai Tukar Petani (NTP), serta Nilai Tukar Nelayan (NTN). Informasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Ketimpangan (Gini Rasio) telah dijelaskan dalam Kajian Fiskal Regional Provinsi Lampung pada seri sebelumnya dan dapat diakses melalui tautan berikut https://bit.ly/KFRLampung.

1.2.1 Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang menunjukkan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (PUK). Indikator ini mencerminkan Semakin tinggi nilai TPAK, semakin besar pula proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi dalam suatu wilayah.

Grafik 1.13. Perkembangan TPAK di Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional Februari 2021 – Februari 205 (persen)

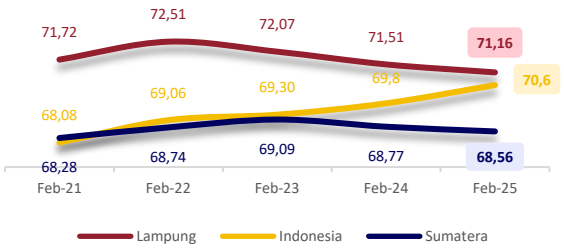

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Pada Februari 2025, TPAK Provinsi Lampung tercatat sebesar 71,16%, lebih tinggi dari TPAK nasional (70,6%) maupun rata-rata Sumatera (68,57%), sebagaimana ditampilkan pada grafik 1.13. Namun, dibandingkan tahun sebelumnya, TPAK Lampung mengalami penurunan yang terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk usia kerja yang tergolong bukan angkatan kerja, seperti pelajar, ibu rumah tangga, dan pensiunan. Penurunan ini mencerminkan bahwa tantangan utama bukan pada pengangguran terbuka, melainkan sebagian besar penambahan penduduk usia kerja belum dapat dikategorikan sebagai angkatan kerja karena alasan Pendidikan atau pilihan peran domestik, sehingga tidak serta-merta mencerminkan melemahnya pasar tenaga kerja.

Grafik 1.14. Perkembangan Struktur Pekerja Formal dan Informal di Lampung Februari 2020 – Februari 2025

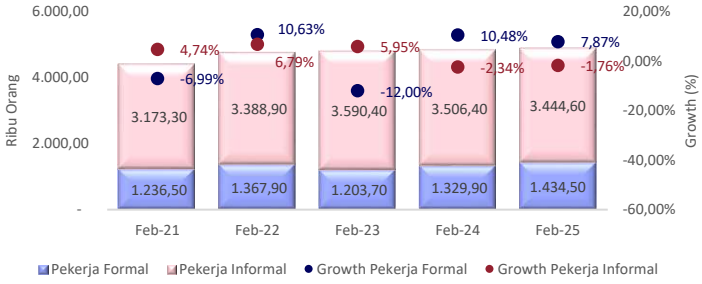

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Struktur ekonomi Provinsi Lampung yang didominasi oleh sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan turut memengaruhi distribusi tenaga kerja di wilayah ini. Pada Februari 2025, sektor pertanian menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan kontribusi sebesar 46,96% dari total 4.879,1 ribu orang. Sektor perdagangan menyerap 17,52%, sedangkan sektor industri pengolahan dan pertambangan menyerap 8,04%.

Dominasi sektor pertanian yang padat karya turut memperkuat keberadaan sektor informal dalam struktur ketenagakerjaan Lampung. Pada Februari 2025, sekitar 70,60% tenaga kerja masih berada di sektor informal, mencerminkan tantangan struktural yang signifikan dalam hal perlindungan tenaga kerja, upah rendah, dan kondisi kerja yang kurang ideal. Namun, terjadi penurunan 1,76% dalam jumlah pekerja informal dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara pekerja formal meningkat sebesar 7,87%. Tren ini menunjukkan adanya perbaikan lapangan kerja formal.

Tantangan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja masih cukup besar. Hal ini tercermin dari komposisi tenaga kerja yang masih didominasi oleh pekerja dengan tingkat pendidikan rendah. Pada

Februari 2025, sebanyak 38,54% tenaga kerja atau sekitar 1.880,4 ribu orang berpendidikan SD ke bawah, sedangkan tenaga kerja dengan pendidikan tinggi (Diploma dan Universitas) hanya mencakup 9,3% atau sekitar 453,9 ribu orang. Rendahnya tingkat pendidikan ini turut memengaruhi produktivitas dan keterbatasan mobilitas tenaga kerja menuju sektor formal yang lebih kompetitif.

Grafik 1.15. Struktur Tenaga Kerja di Provinsi Lampung berdasarkan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Feb 2020 – Feb 2025 (Persen)

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Di tengah berbagai tantangan tersebut, kondisi pasar tenaga kerja Lampung menunjukkan perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mengukur persentase pengangguran terhadap total angkatan kerja tercatat sebesar 4,07% pada Februari 2025, turun dari 4,12% pada tahun sebelumnya, dan lebih rendah dari TPT nasional yang mencapai 4,76%.

Grafik 1.16. TPT Provinsi Lampung Februari 2020 – Februari 2025

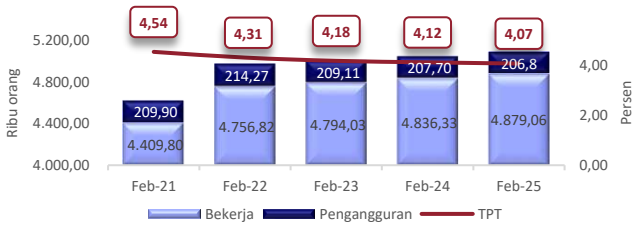

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Penurunan ini mencerminkan penguatan ketahanan ekonomi daerah dan perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja, seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan terbukanya peluang kerja, khususnya di sektor-sektor produktif.

Provinsi Lampung menempati posisi strategis di kawasan Sumatera dengan TPT yang relatif rendah. Pada Februari 2025, Lampung berada di urutan ketiga TPT terendah di Sumatera, setelah Bengkulu dan Sumatera Selatan. Capaian ini menunjukkan daya saing ekonomi daerah yang kuat serta kemampuan dalam menciptakan kondisi pasar kerja yang lebih stabil dibandingkan banyak provinsi lainnya.

Grafik 1.17. Perkembangan TPT di Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional Februari 2020 – Februari 2025 (persen)

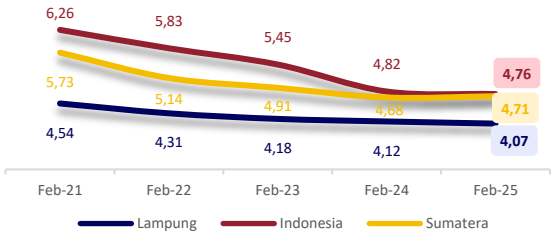

Sumber: BPS , 2025 (diolah)

Namun, ketersediaan tenaga kerja yang tidak seimbang dengan permintaan dapat menekan nilai tawar pekerja dan meningkatkan risiko pengangguran. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung terus mengupayakan penurunan pengangguran melalui berbagai strategi.

Grafik 1.18. TPT Regional Sumatera Februari 2020 s.d. Februari 2025 (persen)

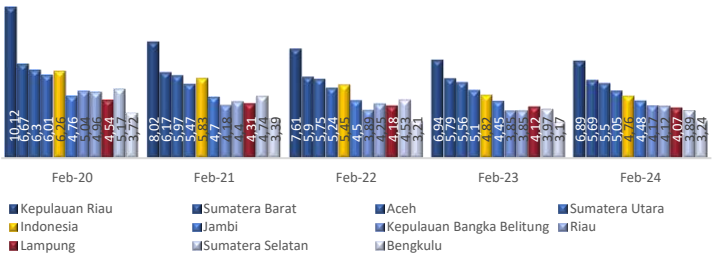

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Langkah-langkah yang ditempuh antara lain penguatan daya saing UMKM melalui insentif fiskal dan non-fiskal, kemudahan perizinan, serta dukungan pembiayaan. Di sisi lain, peningkatan kualitas tenaga kerja juga dilakukan melalui pelatihan, *job fair*, dan fasilitasi penempatan kerja melalui aplikasi *Sigajahlampung*. Upaya ini diarahkan untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif serta memperluas peluang kerja di sektor formal dan informal.

1.2.2 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan daya beli petani berdasarkan hasil usahanya di sektor pertanian. NTP dihitung sebagai rasio antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib). Indikator ini

mencerminkan daya tukar produk pertanian terhadap barang dan jasa konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi pertanian. Semakin tinggi NTP pada suatu periode, semakin besar pendapatan yang diterima petani dibandingkan dengan pengeluarannya, yang mencerminkan semakin kuatnya daya beli petani secara relatif.

Grafik 1.19. Perkembangan Rata-rata NTP Lampung, Regional Sumatera, dan Indonesia per triwulan Tahun 2020 – 2025

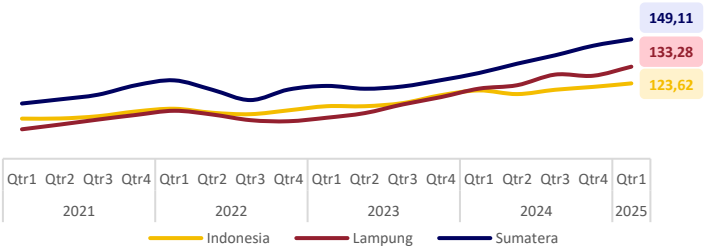

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Pada triwulan I 2025, rata-rata NTP di Provinsi Lampung tercatat sebesar 133,28, meningkat 10,53% (*yoy*). Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional, namun masih di bawah rata-rata NTP regional Sumatera sebagaimana ditunjukkan pada grafik 1.19 yang menggambarkan perkembangan rata-rata NTP Lampung, regional Sumatera, dan Indonesia selama lima tahun terakhir.

Grafik 1.20. Rata-rata NTP Regional Sumatera Triwulan I Tahun 2021 – 2025

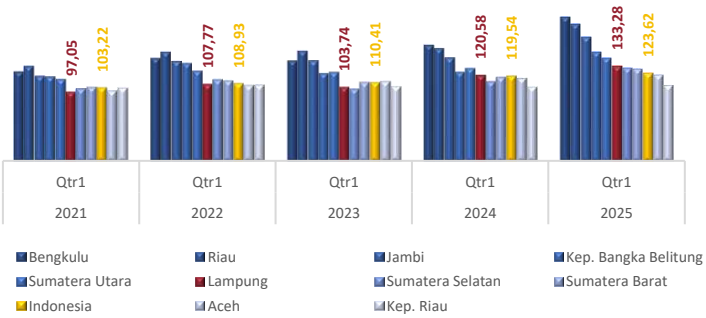

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Pada triwulan I 2025, seluruh provinsi di regional Sumatera mencatatkan NTP di atas 100 dengan pertumbuhan tahunan (*yoy*) yang positif. Namun demikian, pertumbuhan NTP Lampung yang hanya mencapai 10,53% (*yoy*) tergolong rendah dibandingkan provinsi lainnya, dan berada di urutan ke-8 dari 10 provinsi di Sumatera. Capaian ini berada di bawah rata-rata pertumbuhan regional Sumatera sebesar 15,03% (*yoy*), serta tertinggal jauh dari provinsi seperti Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung dengan pertumbuhan NTP masing-masing 24,05% (*yoy*) dan 22,46% (*yoy*). Posisi ini mengindikasikan bahwa meskipun daya beli petani Lampung membaik, laju pertumbuhannya belum sekuat sebagian besar provinsi lain di Sumatera.

Data terkait perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) menurut subsektor di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 1.2, yang menyajikan tren triwulanan selama periode 2021 hingga triwulan I 2025. Berdasarkan data tersebut, peningkatan NTP Lampung pada triwulan I 2025 tidak terlepas dari kinerja subsektor-sektor penyusunnya.

Perkembangan NTP Provinsi Lampung menurut subsektor pada triwulan I 2025 menunjukkan dinamika yang bervariasi antar kelompok usaha tani. **Secara triwulanan**, peningkatan NTP secara agregat didorong terutama oleh subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 7,68% (*qtq*), Hortikultura 6,28% (*qtq*), Perikanan Tangkap 2,23% (*qtq*), dan Peternakan 0,56% (*qtq*). Sementara itu, Tanaman Pangan mengalami sedikit penurunan sebesar 0,20% (*qtq*), dan Perikanan Budidaya mencatat kontraksi sebesar 0,90% (*qtq*). **Secara tahunan**, subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat menjadi kontributor utama peningkatan NTP Lampung dengan pertumbuhan mencapai 31,59% (*yoy*), diikuti oleh Peternakan 4,43% (*yoy*), dan Perikanan Tangkap 3,01% (*yoy*). Sementara itu, Hortikultura mengalami kontraksi 12,56% (*yoy*), disusul oleh Tanaman Pangan dan Perikanan Budidaya masing-masing sebesar 6,67% (*yoy*) dan 0,74% (*yoy*).

Variasi kinerja antar subsektor menunjukkan bahwa peningkatan NTP masih didominasi oleh beberapa subsektor tertentu, sementara subsektor lainnya memberikan kontribusi yang relatif terbatas. Kontribusi terbesar berasal dari subsektor perkebunan rakyat, sementara sejumlah subsektor lainnya masih mengalami tekanan akibat fluktuasi harga komoditas dan peningkatan biaya produksi. Kondisi ini menegaskan urgensi perumusan kebijakan sektoral yang lebih spesifik dan berbasis data untuk mengakselerasi penguatan subsektor-sektor yang peranannya terhadap peningkatan daya beli petani masih relatif terbatas.

Tabel 1.2. Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung Menurut Subsektor per Triwulan periode 2021 – 2025

Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)	2021				2022				2023				2024				2025	Tren	Perubahan	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	21-25	%qtq	%yoy
Nilai Tukar Petani																				
Tanaman Pangan	90,90	90,54	93,43	94,44	96,79	94,31	93,10	94,47	97,81	98,33	103,42	109,18	112,68	101,25	106,43	105,38	105,17		-0,20%	-6,67%
Hortikultura	99,92	95,45	94,81	96,70	97,96	105,67	118,99	107,16	105,68	105,87	112,65	126,82	130,49	127,66	117,04	107,36	114,11		6,28%	-12,56%
Tanaman Perkebunan Rakyat	102,85	110,21	114,03	119,70	123,12	119,00	110,38	109,56	111,99	117,92	124,21	127,15	136,29	153,95	165,73	166,55	179,34		7,68%	31,59%
Peternakan	99,01	102,10	104,25	104,24	104,37	104,58	102,61	100,48	98,46	100,06	100,36	98,53	96,28	99,83	100,49	99,98	100,54		0,56%	4,43%
Perikanan Tangkap	103,57	104,95	106,22	108,14	109,23	110,04	108,26	106,28	108,25	110,85	111,61	111,74	110,24	109,11	109,51	111,08	113,56		2,23%	3,01%
Perikanan Budidaya	100,57	101,68	101,40	101,28	100,98	100,02	98,98	99,65	96,88	97,17	98,86	99,42	97,35	97,33	96,93	97,50	96,63		-0,90%	-0,74%
Gabungan																				
Nilai Tukar Petani	**97,05**	**99,79**	**102,69**	**105,36**	**107,77**	**105,59**	**102,32**	**101,70**	**103,74**	**106,42**	**111,45**	**115,66**	**120,58**	**122,56**	**128,71**	**128,04**	**133,28**		**4,09%**	**10,53%**
Indeks Harga yang diterima Petani (%)	**104,58**	**107,74**	**111,00**	**114,16**	**118,74**	**119,11**	**117,43**	**117,17**	**120,99**	**124,77**	**131,31**	**137,85**	**145,45**	**149,53**	**156,31**	**155,90**	**163,24**		**4,71%**	**12,23%**
Indeks Harga yang dibayar Petani (%)	**107,75**	**107,97**	**108,10**	**108,34**	**110,17**	**112,82**	**114,78**	**115,20**	**116,63**	**117,24**	**117,82**	**119,18**	**120,62**	**122,01**	**121,44**	**121,76**	**122,49**		**0,60%**	**1,54%**

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Pada triwulan I 2025, subsektor Tanaman Pangan mengalami penurunan indeks NTP menjadi 105,17 akibat turunnya harga gabah dan ketela pohon karena pasokan melimpah saat panen. Subsektor Hortikultura tumbuh 6,28% (*qtq*) namun terkontraksi 12,56% (*yoy*) akibat fluktuasi harga cabai merah. Kinerja terbaik dicatatkan oleh subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat dengan indeks NTP 179,34, didorong oleh kenaikan harga kopi dan kakao seiring tren global dan terbatasnya pasokan. Subsektor Peternakan menunjukkan peningkatan menjadi 100,54 berkat naiknya harga ayam ras pedaging. Perikanan Tangkap juga mencatatkan kenaikan menjadi 113,56 disebabkan pasokan ikan teri dan kembung yang menurun. Sebaliknya, subsektor Perikanan Budidaya mengalami penurunan menjadi 96,63 karena harga udang, ikan mas, dan bandeng turun saat panen berlimpah tanpa diiringi peningkatan permintaan.

Secara umum, dinamika pasar dan variabilitas kondisi cuaca menjadi tantangan utama dalam pengelolaan pasokan komoditas pertanian di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan pasokan yang lebih adaptif dan responsif guna menjaga stabilitas harga serta mendukung ketahanan pangan.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat terkait keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran usaha pertanian. Berbeda dengan NTP yang mencakup seluruh pengeluaran rumah tangga petani, termasuk biaya produksi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. NTUP hanya memperhitungkan biaya produksi serta penambahan barang modal (BPPBM). Oleh karena itu, NTUP dianggap lebih relevan dalam mengevaluasi efisiensi dan keberlanjutan usaha pertanian.

Tabel 1.3. Perkembangan NTUP Lampung Menurut Subsektor per Triwulan Periode 2021 – 2025

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)	2021				2022				2023				2024				2025	Tren	Perubahan	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	21-25	%qtq	%yoy
Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)	**98,55**	**101,10**	**103,67**	**104,63**	**108,53**	**107,26**	**104,03**	**101,40**	**103,96**	**107,01**	**112,31**	**117,65**	**123,19**	**125,77**	**131,00**	**130,50**	**135,56**		**3,87%**	**10,04%**
Tanaman Pangan	92,61	92,22	94,68	95,31	97,89	96,31	95,54	95,09	98,74	99,57	104,91	111,55	115,08	104,25	108,74	107,70	107,44		-0,24%	-6,64%
Hortikultura	102,75	98,10	97,31	104,06	100,70	109,87	123,64	110,25	109,04	109,68	117,19	133,28	137,12	134,59	122,57	112,63	119,94		6,49%	-12,53%
Tanaman Perkebunan Rakyat	103,99	110,90	114,48	115,70	123,09	120,12	111,16	107,46	110,68	117,03	123,62	128,06	138,57	156,90	166,99	168,12	180,03		7,08%	29,92%
Peternakan	100,05	102,83	104,70	103,24	104,71	104,96	102,70	100,16	98,81	100,57	101,02	100,08	98,56	101,87	102,49	102,36	103,16		0,79%	4,67%
Perikanan Tangkap	104,82	105,99	107,22	108,68	110,60	111,91	76,48	106,03	108,44	111,29	112,32	113,09	112,32	111,57	111,77	113,50	115,99		2,19%	3,27%
Perikanan Budidaya	102,76	103,86	103,39	102,57	102,83	102,76	102,06	101,94	99,58	100,17	102,10	103,09	101,16	102,09	101,25	101,91	100,66		-1,23%	-0,50%

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Berdasarkan data pada tabel 1.3, NTUP Provinsi Lampung pada triwulan I tahun 2025 tercatat sebesar 135,56. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 10,04% (*yoy*) dan 3,87% (*qtq*), mencerminkan perbaikan efisiensi usaha petani di tingkat provinsi. Secara umum, pola perkembangan NTUP di masing-masing subsektor relatif sejalan dengan dinamika pada indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Peningkatan NTUP secara agregat mencerminkan adanya perbaikan efisiensi dalam

usaha pertanian, terutama di subsektor yang mencatatkan pertumbuhan signifikan. Meskipun demikian, masih terdapat subsektor yang mengalami tekanan, sehingga dibutuhkan strategi penguatan dan intervensi kebijakan yang tepat untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan dan meningkatkan daya saing petani secara merata di seluruh subsektor pertanian.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas harga komoditas strategis, Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat berbagai program dan kebijakan sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pada tahun 2025, Pemerintah daerah Provinsi Lampung membuat kebijakan penetapan harga dasar singkong sebesar Rp1.350 per kilogram dengan potongan maksimal 30% tanpa mempertimbangkan kadar pati, sebagai bentuk perlindungan terhadap fluktuasi harga yang merugikan petani. Pemerintah daerah juga mendukung program swasembada pupuk guna menekan biaya produksi dan memperkuat kemandirian petani terhadap input strategis.

Di sektor perikanan budidaya, pengembangan Kampung Perikanan Budidaya seperti kampung nila di Pringsewu, rumput laut di Lampung Selatan, dan bawal bintang di Pesawaran dilakukan untuk meningkatkan produktivitas melalui bantuan benih, pendampingan teknologi, serta pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan. Pembangunan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut di Pesawaran turut mendukung pengelolaan benih bening lobster (BBL) melalui 19 Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang melibatkan 2.079 nelayan, sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.2.3 Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur daya beli nelayan terhadap barang dan jasa, baik yang dibutuhkan dalam proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga. NTN mencerminkan keseimbangan antara pendapatan yang diperoleh dari hasil tangkapan ikan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan produksi serta kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, NTN menjadi salah satu parameter penting dalam menilai kesejahteraan nelayan dan ketahanan ekonomi sektor perikanan.

Grafik 1.21. Perkembangan Rata-Rata NTN Lampung, Regional Sumatera dan Indonesia per Triwulan 2020 – 2025

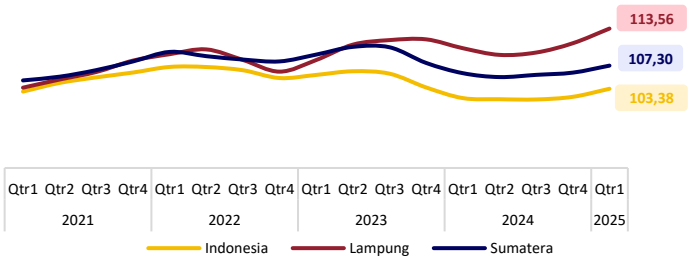

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Pada triwulan I 2025, Lampung mencapai rata-rata NTN tertinggi sebesar 113,56, diikuti oleh Sumatera sebesar 107,30, dan Indonesia sebesar 103,38. Tren pertumbuhan di semua wilayah menunjukkan pola fluktuasi, dengan Lampung mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan wilayah lainnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli nelayan di Lampung yang relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional dan regional Sumatera.

Grafik 1.22. Rata-Rata NTN Regional Sumatera Triwulan I Tahun 2021 – 2025

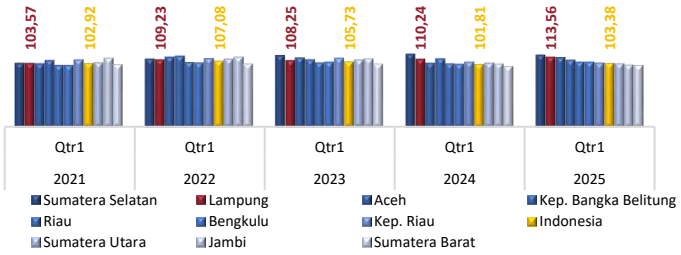

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Pada triwulan I 2025, Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Provinsi Lampung berada pada posisi kedua tertinggi di regional Sumatera dari 10 provinsi, setelah Sumatera Selatan yang mencatatkan nilai 117,24. Sementara itu, rata-rata nasional hanya sebesar 103,38, sebagaimana ditampilkan pada grafik 1.22. Hal ini mencerminkan daya beli nelayan Lampung yang relatif kuat, sekaligus menegaskan

posisi strategis provinsi ini dalam mendukung sektor perikanan regional.

Grafik 1.23 menggambarkan tren perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Provinsi Lampung dari Januari 2021 hingga Maret 2025. Pada triwulan I tahun 2025, NTN menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Grafik 1.23. Perkembangan Rata-Rata NTN Lampung, Regional Sumatera dan Indonesia per Triwulan 2021 – 2025

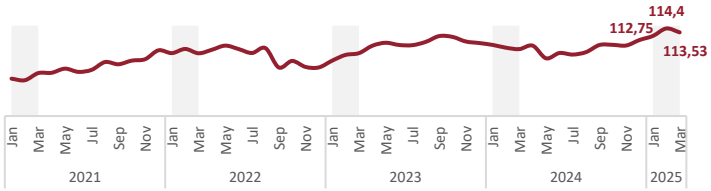

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Salah satu faktor utama yang memengaruhi fluktuasi NTN adalah perubahan harga komoditas perikanan, khususnya ikan teri dan ikan kembung, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi musim dan cuaca. Ketergantungan terhadap faktor musiman ini menyebabkan volatilitas pendapatan bagi nelayan di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan, seperti diversifikasi usaha nelayan dan penguatan sistem logistik perikanan.

Pemerintah Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui kebijakan strategis yang mendukung produktivitas dan keberlanjutan sektor perikanan. Salah satu langkah nyata adalah peningkatan akses bahan bakar dengan membangun empat SPBN di Lempasing, Kalianda, Labuan Maringgai, dan Kota Agung. Saat ini, pembangunan SPBN tambahan juga sedang berlangsung di beberapa lokasi. Pembangunan fasilitas ini sepenuhnya dibiayai melalui investasi pihak swasta, tanpa menggunakan dana dari APBN maupun APBD. Namun demikian, proses perizinan dan pengelolaan penyaluran bahan bakar bersubsidi tetap berada di bawah koordinasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung. Pola ini mencerminkan sinergi positif antara pemerintah dan swasta dalam mendukung efisiensi dan keberlanjutan perikanan tangkap.

Selain membangun infrastruktur energi, Pemerintah Provinsi Lampung juga memperhatikan perlindungan sosial bagi nelayan melalui program Asuransi Nelayan yang telah berjalan sejak 2020 bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Program ini melindungi nelayan dari risiko kerja saat melaut. Di bidang permodalan, pemerintah mendorong akses nelayan terhadap pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk meningkatkan kapasitas usaha dan produktivitas. Kombinasi kebijakan infrastruktur, perlindungan sosial, dan akses permodalan ini mencerminkan pembangunan ekosistem perikanan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendorong kesejahteraan nelayan dan pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan.

SUPLEMEN 3
Analisis Isu Komoditas

Penurunan Produksi Singkong Di Lampung Sebagai Salah Satu Sentra Utama Indonesia

Penurunan Produksi Singkong Lampung

2021
9 Juta ton

-22% (*yoy*)

2022
7 Juta ton

Tantangan

- **Penurunan Produktivitas.** Produksi singkong di Lampung menurun dari 9 juta ton pada 2010 menjadi kurang dari 7 juta ton pada 2022, bahkan sempat di bawah 5 juta ton pada 2019, dengan produktivitas rata-rata hanya 22 ton/hektare, jauh di bawah potensi optimal 30–40 ton/hektare.
- **Isu Serapan Hasil Panen.** Sekitar 90% produksi singkong di Lampung diserap industri tapioka. Namun, aktivitas on-farm belum optimal sehingga kualitas hasil panen tidak selalu memenuhi standar industri. Akibatnya, sebagian hasil panen tidak terserap / dibeli dengan harga rendah.
- **Harga Singkong Tidak Disepakati Petani dan Industri.** Harga singkong telah disepakati sebesar Rp1.400/kg dengan refaksi maksimal 15%, namun industri tapioka keberatan karena harga pasar global menurun. Beberapa pabrik berhenti produksi, pembelian singkong menurun, dan petani merugi.

Rekomendasi Kebijakan

- **Reformasi Sistem Distribusi dan Kebijakan Harga.** Diperlukan restrukturisasi rantai distribusi singkong yang lebih berkeadilan dengan mendorong terciptanya hubungan simbiosis antara petani dan pelaku industri. Penetapan harga minimum yang bersifat wajib perlu dilakukan untuk melindungi petani dari fluktuasi pasar yang merugikan.
- **Akselerasi Peningkatan Produktivitas.** Upaya peningkatan hasil panen dilakukan melalui penyediaan varietas unggul, penerapan teknik budidaya berbasis riset, serta kemudahan akses terhadap sarana produksi seperti pupuk, alat mesin pertanian, dan pendampingan intensif.
- **Percepatan Hilirisasi Berbasis Komunitas.** Investasi pada sektor pengolahan lanjutan—seperti produksi tepung mocaf, bioetanol, dan pakan ternak—diperkuat melalui skema berbasis desa atau koperasi, sehingga menciptakan nilai tambah di tingkat lokal dan memperkuat ekonomi masyarakat.
- **Penguatan Kelembagaan Usaha Tani.** Dukungan terhadap transformasi kelompok tani menjadi lembaga ekonomi yang tangguh, seperti koperasi atau gabungan kelompok tani (Gapoktan), diiringi dengan perluasan akses pada pendanaan, pelatihan manajerial, dan pemanfaatan teknologi digital dalam operasionalnya.

Referensi: MSI, Gapmmi, ISEI Lampung, Dinas KPTPH Provinsi Lampung

BAB 2
ANALISIS FISKAL REGIONAL

> “Sinergi antara APBN dan APBD sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional”
>
> **-Sri Mulyani Indrawati -**

BAB 2 ANALISIS FISKAL REGIONAL

2.1 PELAKSANAAN APBN

Dalam menghadapi dinamika perekonomian global yang penuh ketidakpastian, kebijakan fiskal hadir sebagai *shock absorber* atas dampak tersebut bagi ekonomi domestik dan masyarakat.

APBN Tahun 2025 merupakan APBN transisi yang mempertimbangkan faktor perekonomian global serta bauran kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang. Desain APBN untuk mendorong pencapaian visi Indonesia Emas 2045 serta memberikan ruang untuk pelaksanaan program pemerintahan selanjutnya.

Pada tahun 2025, belanja negara diperkuat dengan berbagai program yang fokus meningkatkan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan, serta mendorong industrialisasi bernilai tambah melalui hilirisasi. Meskipun terjadi penyesuaian alokasi belanja negara, efisiensi tersebut mencerminkan strategi konsolidasi fiskal yang hati-hati, dengan tetap mengedepankan efektivitas dan ketepatan sasaran belanja sebagai landasan penguatan ketahanan fiskal dan keberlanjutan pembangunan jangka menengah.

Pada APBN Tahun 2025 Provinsi Lampung, Pagu Belanja Negara dialokasikan sebesar Rp31.779,10 miliar, menurun dari alokasi Belanja Negara pada tahun 2024 sebesar 6,37% (*yoy*). Penurunan alokasi Belanja Negara khususnya pada alokasi Belanja Pemerintah Pusat yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal seiring dengan kebijakan efisiensi yang efektif sejak awal tahun 2025.

Tabel 2.1 *I-Account* APBN di Provinsi Lampung Realisasi Triwulan I 2025 (dalam miliar Rp)

I-Account (Miliar Rupiah)	T.A. 2024			T.A. 2025			*% Growth* 2024-2025	
	Pagu-P	Realisasi	% Real	Pagu	Realisasi	% Real	Pagu	Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	11.813,41	1.869,72	15,83	11.121,49	2.705,16	24,32	(5,86)	44,68
1. Pendapatan Perpajakan	**10.762,21**	**1.436,83**	**13,35**	**10.032,30**	**2.236,69**	**22,29**	**(6,78)**	**55,67**
a. Pajak Dalam Negeri	9.273,35	1.259,36	13,58	9.196,13	1.286,27	13,99	(0,83)	2,14
i. Pajak Penghasilan	3.892,64	551,72	14,17	3.569,36	531,80	14,90	(8,30)	(3,61)
ii. Pajak Pertambahan Nilai	5.084,81	696,41	13,70	5.552,28	644,43	11,61	9,19	(7,46)
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	135,55	0,08	0,06	34,14	0,08	0,24	(74,82)	5,69
v. Cukai	7,03	2,58	36,72	6,05	7,15	118,15	(13,93)	176,94
vi. Pajak Lainnya	153,32	8,57	5,59	34,30	102,81	299,77	(77,63)	1.099,42
b. Pajak Perdagangan Internasional	1.488,86	177,47	11,92	836,17	950,42	113,66	(43,84)	435,56
i. Bea Masuk	559,83	123,83	22,12	454,21	106,51	23,45	(18,87)	(13,99)
ii. Bea Keluar	929,03	53,63	5,77	381,96	843,92	220,94	(58,89)	1.473,50
2. Pendapatan Negara Bukan Pajak	**1.051,20**	**432,89**	**41,18**	**1.089,19**	**468,47**	**43,01**	**3,61**	**8,22**
a. PNBP Lainnya	423,41	229,82	54,28	413,80	247,13	59,72	(2,27)	7,53
b. Pendapatan Badan Layanan Umum	627,80	203,07	32,35	675,38	221,33	32,77	7,58	8,99
B. BELANJA NEGARA	33.942,76	7.651,98	22,54	31.779,10	7.907,44	24,88	(6,37)	3,34
1. Belanja Pemerintah Pusat (BPP)	**11.187,35**	**2.399,67**	**21,45**	**8.718,85**	**1.579,66**	**18,12**	**(22,07)**	**(34,17)**
a. Belanja Pegawai	4.298,82	1.058,53	24,62	4.169,88	1.145,36	27,47	(3,00)	8,20
b. Belanja Barang	5.469,68	1.176,66	21,51	3.202,27	388,99	12,15	(41,45)	(66,94)
c. Belanja Modal	1.375,08	144,13	10,48	1.301,59	27,73	2,13	(5,34)	(80,76)
d. Bantuan Sosial	43,77	20,35	46,49	45,11	17,57	38,96	3,06	(13,65)
2. Transfer Ke Daerah (TKD)	**22.755,41**	**5.252,31**	**23,08**	**23.060,26**	**6.327,78**	**27,44**	**1,34**	**20,48**
a. Dana Transfer Umum (DTU)	**14.584,63**	**3.593,95**	**24,64**	**15.010,97**	**4.188,43**	**27,90**	**2,92**	**16,54**
i. Dana Alokasi Umum	13.954,49	3.520,37	25,23	14.309,67	4.102,21	28,67	2,55	16,53
ii. Dana Bagi Hasil	630,14	73,58	11,68	701,30	86,22	12,29	11,29	17,19
b. Dana Transfer Khusus (DTK)	**5.580,96**	**1.011,30**	**18,12**	**5.644,49**	**1.231,34**	**21,81**	**1,14**	**21,76**
i. Dana Alokasi Khusus Fisik	1.453,58	0,00	-	1.123,95	0,00	-	(22,68)	-
ii. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	4.125,51	1.011,30	24,51	4.520,55	1.231,34	27,24	9,58	21,76
iii. Hibah Daerah	1,87	0,00	-	0,00	0,00	-	(100,00)	-
c. Insentif Fiskal	**253,93**	**10,66**	**4,20**	**126,72**	**3,67**	**2,89**	**(50,09)**	**(65,61)**
d. Dana Desa	**2.335,89**	**636,40**	**27,24**	**2.278,08**	**904,34**	**39,70**	**(2,47)**	**42,10**
C. SURPLUS (DEFISIT)	(22.129,35)	(5.782,26)	26,13	(20.657,62)	(5.202,28)	25,18	(6,65)	(10,03)

Sumber: OM-SPAN, SIKD, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar, ALCo (data diolah)

Di sisi lain, Pendapatan Negara ditargetkan sebesar Rp11.121,49 miliar menurun tipis sebesar 5,86% (*yoy*) yang bersumber dari target Penerimaan Perpajakan yang menurun 6,78% (*yoy*). Namun, PNBP ditargetkan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,61% (*yoy*). Penetapan target tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan prospek perekonomian ke depan dan menjaga daya beli masyarakat tetapi tetap optimal dalam mendukung Belanja Negara.

Pendapatan Negara pada triwulan I-2025 secara nominal sebesar Rp2.705,16 miliar atau 24,32% dari target, melonjak sebesar 44,68% (*yoy*) yang utamanya disebabkan oleh naiknya harga komoditas yang menjadi sektor utama di provinsi Lampung pada kinerja penerimaan negara. Fluktuasi harga komoditas ini mengalami perbaikan sejak akhir tahun 2024 setelah sebelumnya mengalami penurunan.

Sementara itu, realisasi Belanja Negara di Provinsi Lampung hingga akhir Maret 2025 mencapai Rp7.907,44 miliar atau 24,88% dari pagu anggaran, mengalami pertumbuhan 3,34% secara tahunan. Peningkatan ini didorong oleh penyaluran tunjangan hari raya, subsidi energi, dan program perlindungan sosial. Percepatan realisasi belanja tersebut mencerminkan peran aktif APBN dalam menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

2.1.1 Pendapatan Negara

Sampai dengan Triwulan I-2025, Pendapatan Negara telah terkumpul Rp2.705,16 miliar atau setara dengan 24,32% dari target tahun 2025 yakni sebesar Rp11.121,49 miliar. Secara kumulatif, pendapatan negara mencatatkan kinerja positif dengan pertumbuhan *double digit* sebesar 44,68% (*yoy*), utamanya disebabkan oleh Pendapatan Perpajakan pada komponen penerimaan Bea Keluar yang meningkat tajam akibat perubahan harga komoditas di pasar global.

Penerimaan Negara Bukan Pajak turut mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 8,22% (*yoy*). Besaran realisasi PNBP sampai dengan Maret 2025 sebesar Rp468,47 miliar atau 43,01% dari target. Realisasi yang positif ini menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat terutama di bidang Pendidikan dan Kesehatan yang menjadi kontributor utama PNBP Provinsi Lampung.

2.1.1.1 Penerimaan Perpajakan

Target Penerimaan Perpajakan di Provinsi Lampung pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp10,03 triliun. Realisasi sampai dengan 31 Maret 2025 mencapai Rp2.236,69 miliar atau sebesar 22,29% dari target APBN 2025. Rincian capaian penerimaan triwulan I-2025 sebagaimana pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Capaian Penerimaan Perpajakan s.d. 31 Maret 2025 (miliar rupiah)

Uraian	2025		
	PAGU	REALISASI	%REAL
A. Pajak Dalam Negeri	**9.196,13**	**1.286,27**	**13,99**
Pajak Penghasilan	3.569,36	531,80	14,90
Pajak Pertambahan Nilai	5.552,28	644,43	11,61
Pajak Bumi dan Bangunan	34,14	0,08	0,24
Cukai	6,05	7,15	118,15
Pajak Lainnya	34,30	102,81	299,77
B. Pajak Perdagangan Internasional	**836,17**	**950,42**	**113,66**
Bea Masuk	454,21	106,51	23,45
Bea Keluar/Pungutan Ekspor	381,96	843,92	220,94
Total	10.032,30	2.236,69	22,29

Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar, 2025 (diolah)

Penerimaan Pajak Dalam Negeri mencapai 13,99% dari target, sedangkan Pajak Perdagangan Internasional menunjukkan kinerja yang amat baik dengan capaian sebesar 113,66% dari target.

Grafik 2.1 menunjukkan pertumbuhan signifikan realisasi Penerimaan Perpajakan tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun penerimaan PPN dan PPh tetap menjadi kontributor penerimaan utama, tetapi Bea Keluar berhasil menyumbang penerimaan tertinggi sampai dengan akhir Maret 2025. Hal ini disebabkan karena Bea Keluar atau pungutan ekspor sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas di pasar global, khususnya CPO yang menopang ekspor dari Lampung. Pada triwulan I-2024, terjadi penurunan harga referensi minyak kelapa sawit (CPO) dan dampak penurunan permintaan global. Namun, di triwulan I-2025 terjadi kenaikan harga CPO yang menyebabkan harga referensi pengenaan Bea Keluar menjadi lebih tinggi dan membawa penerimaan yang positif bagi Pajak Perdagangan Internasional Lampung.

Grafik 2.1. Tren Kontribusi Komponen Penerimaan Perpajakan s.d. 31 Maret Tahun 2024-2025 (miliar rupiah)

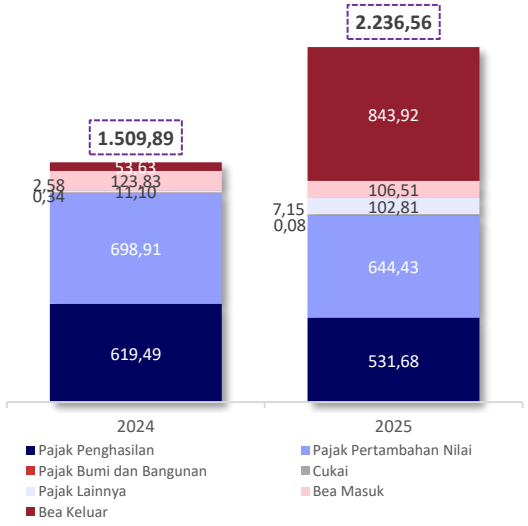

Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar, OM-SPAN, 2025 (diolah)

Pada triwulan I-2025, realisasi penerimaan perpajakan pemerintah pusat di regional Lampung secara agregat tumbuh positif sebesar 55,67% (*yoy*) dengan capaian Rp2.236,69 miliar atau sebesar 22,29% dari target. Penerimaan Perpajakan di Lampung didominasi oleh penerimaan Pajak Perdagangan Internasional yang terakselerasi hingga 435,56% (*yoy*). Kinerja baik ini selaras dengan penerimaan Bea Keluar yang membaik pada tahun 2025 akibat kenaikan harga referensi CPO dibandingkan tahun lalu. Di sisi lain, Pajak Dalam Negeri juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,14% (*yoy*), didukung oleh pertumbuhan pada sebagian besar komponen penerimaan Perpajakan Dalam Negeri. Capaian Realisasi dan Pertumbuhan pada setiap komponen Penerimaan Perpajakan ditunjukkan sebagaimana Grafik 2.2.

Grafik 2.2 Target, Realisasi, Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan di Lampung Triwulan I 2025 (miliar rupiah, persen)

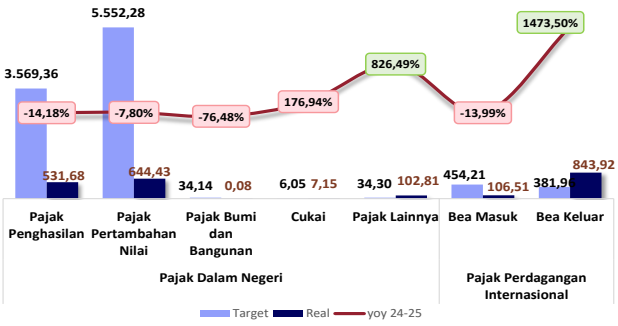

Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar, 2025 (diolah)

Kontributor utama Penerimaan Pajak Dalam Negeri pada triwulan I-2025 bersumber dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan proporsi sebesar 50,10%. Total PPN yang berhasil dikumpulkan hingga 31 Maret 2025 senilai Rp644,43 miliar atau 11,61% dari target. Penerimaan PPN mengalami perlambatan sebesar 7,46% (*yoy*) terutama disebabkan dalamnya kontraksi PPN Impor yang turun hingga 62,09% (*yoy*). Meski demikian, PPN Dalam Negeri yang menjadi kontributor terbesar dari total PPN dengan proporsi 88,43%, tumbuh positif sebesar 13,29% (*yoy*). Capaian ini menjadi sinyal positif bahwa aktivitas ekonomi dalam negeri masih tetap terjaga.

Penyumbang Pajak Dalam Negeri tertinggi kedua, yaitu Pajak Penghasilan mencatatkan realisasi sebesar Rp531,80 miliar atau sebesar 14,90% dari target APBN, terkontraksi 3,61% (*yoy*). Hal ini utamanya berasal akibat penurunan pada penerimaan PPh 21 sebesar 42,64% (*yoy*). Penurunan tersebut sebagai dampak pemungutan PPh 21 yang mulai tahun 2025 terpusat untuk beberapa satuan kerja seperti Polda Lampung, Universitas Lampung, dan UIN Raden Intan. Meski demikian, hal ini tidak berpengaruh bagi penerimaan perpajakan secara nasional karena hanya terjadi perpindahan lokus pencatatan penerimaan. Namun, PPh 25/29 Badan dan OP yang menyumbang penerimaan tinggi untuk PPh menunjukkan pertumbuhan masing-masing sebesar 11,58% (*yoy*) dan 56,80% (*yoy*).

Pajak Lainnya juga mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 1.099,42% (*yoy*), terutama didorong oleh implementasi fitur Deposit Pajak pada aplikasi Coretax yang mulai diberlakukan sejak tahun 2025. Fitur ini memberi kemudahan bagi Wajib Pajak (WP) dalam melakukan pembayaran pajak sekaligus meminimalkan risiko sanksi bunga akibat keterlambatan pembayaran. Peningkatan pemanfaatan fitur ini dapat menjadi indikasi awal adanya kenaikan kepatuhan WP di Provinsi Lampung untuk memenuhi kewajiban pembayaran dan meminimalisasi risiko denda.

Di sisi lain, Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional menyumbang penerimaan yang sangat tinggi hingga mencapai 435,56% (*yoy*),

didukung oleh Bea Keluar yang turut tumbuh 1.473,50% (*yoy*) akibat naiknya harga referensi CPO beserta turunannya, khususnya minyak kelapa sawit yang menduduki peringkat pertama komoditas terbesar ekspor dari Lampung. Bea Masuk mengalami perlambatan sebesar 13,99 (*yoy*) dipengaruhi turunnya importasi komoditas pangan beras dan gula. Pada tahun 2025, pemerintah mencanangkan kebijakan untuk menutup keran impor bahan pangan seperti jagung, beras dan gula guna mendukung program ketahanan pangan.

Tabel 2.3. Realisasi dan Pertumbuhan Kumulatif Penerimaan Pajak Dalam Negeri di Lampung (di luar Cukai) Berdasarkan Sektor s.d. 31 Maret 2025 (miliar rupiah, persen)

Sektor	Realisasi/ Kontribusi	Pertumbuhan Kumulatif (yoy)
Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	Rp 358,24 28,01%	-19,58% 35,35%
Industri Pengolahan	Rp 340,23 26,60%	-11,72% -32,00%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	Rp 212,27 16,60%	-9,97% 31,71%
Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	Rp 102,88 8,04%	-0,05% -39,83%
Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	Rp 81,96 6,41%	24,62% -34,36%
Pejabat Negara, Karyawan, Pensiunan, Tidak/Belum Bekerja	Rp 60,61 4,74%	69,43% 1,00%
Pengangkutan Dan Pergudangan	Rp 47,55 3,72%	-29,88% -26,57%
Sektor Lainnya	Rp 75,39 5,89%	-23,57% -23,94%

Growth % 2024 -2025 Growth % 2023 - 202

Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, 2025 (diolah)

Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana pada Grafik 2.3, tiga sektor yang menyumbang penerima Pajak terbesar di Lampung adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Industri Pengolahan, dan Administrasi Pemerintahan dengan kontribusi masing-masing 28,01%, 26,60%, dan 16,60% terhadap total penerimaan Pajak Dalam Negeri di luar Cukai.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran mencatat pertumbuhan yang tajam sebesar 35,35% (*yoy*), terutama ditopang oleh peningkatan kinerja pada sub sektor yang mendominasi yakni perdagangan besar kopi, teh dan kakao, perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, dan perdagangan besar buah yang mengandung minyak.

Sementara itu, Industri Pengolahan terkontraksi sebesar 11,72% (*yoy*). Hal tersebut terjadi akibat penurunan kegiatan ekonomi pada industri pati ubi kayu dan industri gula pasir. Sektor Administrasi Pemerintahan juga mengalami perlambatan sebesar 9,97% (*yoy*) yang dipengaruhi oleh penurunan setoran PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 seiring dengan pemusatan pembayaran belanja pegawai dan pemungutan pajak penghasilannya serta kebijakan efisiensi belanja baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di tahun 2025.

Di luar ketiga sektor utama tersebut, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang merupakan *leading sector* Lapangan Usaha di Lampung menyumbang pertumbuhan yang impresif dengan dominasi sub sektor yaitu Perkebunan Buah Kelapa Sawit, Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong serta Budidaya Ayam Ras Petelur.

Secara keseluruhan, hingga 31 Maret 2025, Pajak Dalam Negeri di Provinsi Lampung menunjukkan kinerja yang solid. Di tengah fluktuasi harga komoditas dan dinamika perdagangan global, kontribusi sektor-sektor strategis regional Lampung menunjukkan ketahanan yang mendorong pertumbuhan penerimaan pajak secara berkelanjutan.

2.1.1.2 Analisis *Tax Ratio*

Tax ratio digunakan untuk melihat seberapa besar porsi pajak dalam perekonomian suatu daerah dengan mengukur perbandingan antara penerimaan perpajakan dengan PDRB suatu daerah pada periode tertentu. Penerimaan Perpajakan dihitung dengan menjumlahkan Penerimaan Pajak Dalam Negeri dan Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional. Tabel 2.4 menyajikan perhitungan *tax ratio* s.d. 31 Maret 2025 di Lampung.

Tabel 2.4 *Tax Ratio* Penerimaan Pajak Triwulan I Tahun 2024 dan 2025 di Lampung (miliar rupiah)

Komponen (miliar Rupiah)	Triwulan I-2024	Triwulan I-2025
Pajak Dalam Negeri	1.259,36	1.286,27
Pajak Perdagangan Internasional	177,47	950,42
Total Pendapatan Perpajakan	1.436,83	2.236,69
PDRB (ADHB)	112.092,92	121.701,75
Tax Ratio	1,28%	1,84%

Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar, BPS, 2025 (diolah)

Tax ratio pemerintah pusat sampai dengan 31 Maret 2025 sebesar 1,84%, meningkat dibandingkan dengan *tax ratio* sampai dengan 31 Maret 2024 yang sebesar 1,28%. Kenaikan angka *tax ratio* ini didorong oleh realisasi Pajak Perdagangan Internasional tumbuh seiring dengan peningkatan harga CPO yang merupakan komoditas utama ekspor di Lampung, Penerimaan Pajak Dalam Negeri juga mengalami pertumbuhan sejalan dengan peningkatan PDRB yang mengindikasikan bahwa kontribusi Penerimaan Perpajakan sejalan dengan aktivitas ekonomi Provinsi Lampung.

2.1.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp468,47 miliar, dengan capaian 43,01% dari target APBN 2025. Kinerja positif ini juga selaras dengan pertumbuhan kumulatif yang menunjukkan peningkatan sebesar 8,22% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik 2.3 Pertumbuhan Kumulatif PNBP Triwulan I 2025 (miliar rupiah)

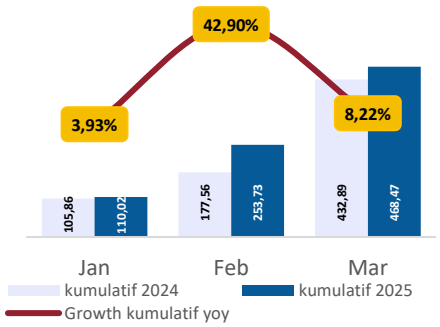

Sumber: OM-SPAN, 2025 (diolah)

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi PNBP mengalami lonjakan signifikan di bulan Februari, dengan pertumbuhan kumulatif mencapai 42,90% (*yoy*). Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh lebih cepatnya proses pengesahan pendapatan jasa pelayanan pendidikan pada Satker Badan Layanan Umum (BLU) UIN Raden Intan Lampung, yang pada tahun sebelumnya baru disahkan di bulan Maret. Penerimaan dari Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya juga memberikan kontribusi besar pada awal tahun. Percepatan pendapatan ini mencerminkan perbaikan dalam tata kelola keuangan BLU serta meningkatnya efektivitas penegakan hukum.

Grafik 2.4 Tren PNBP Triwulan I Tahun 2024 dan 2025 (miliar rupiah)

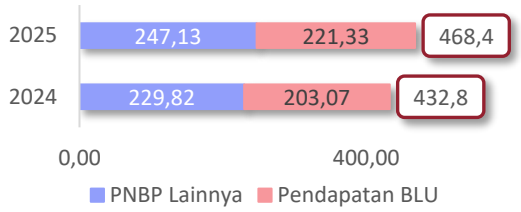

Sumber: OM-SPAN, 2025 (diolah)

Sampai dengan akhir Maret 2025, komponen PNBP Lainnya berkontribusi 52,75% dari total PNBP. PNBP Lainnya terealisasi sebesar Rp247,13 miliar atau 59,72% dari target. Realisasi PNBP Lainnya utamanya bersumber dari penerimaan Pendapatan Biaya Pendidikan pada Perguruan Tinggi yang sebagian besar merupakan penerimaan Satker Institut Teknologi Sumatera (ITERA). Selain itu, penerimaan PNBP Lainnya disumbang oleh Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan pada Satker Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Pendapatan Jasa Kepelabuhanan khususnya Pelabuhan Panjang yang merupakan Pelabuhan Internasional sebagai pintu utama arus barang dan logistik ekspor-impor di Provinsi Lampung.

Selanjutnya, Pendapatan BLU yang membawa kontribusi 47,52% dari total PNBP mencatatkan realisasi sebesar Rp221,33 miliar atau 32,77% dari target APBN dan tumbuh sebesar 8,99% (*yoy*). Realisasi ini sebagian besar berasal dari Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan pada Satker BLU, dengan pendapatan tertinggi berasal dari Universitas Lampung dan UIN Raden Intan. Selain itu, Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung turut menyumbang penerimaan pada bidang layanan kesehatan. Pertumbuhan BLU mencerminkan semakin baiknya kinerja keuangan BLU yang dapat meningkatkan ruang fiskal bagi BLU untuk melakukan belanja yang semakin efektif dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

2.1.1.4 Prognosis/*Outlook* Pendapatan Negara

Proyeksi Pendapatan Negara di Lampung hingga akhir tahun 2025 disusun dengan memperhatikan

realisasi kinerja Triwulan I-2025 dan tren historis penerimaan lima tahun terakhir. Penerimaan yang berasal dari Perpajakan dan PNBP diperkirakan akan terus tumbuh dan melampaui target APBN 2025, dengan pgraroyeksi capaian Rp11,32 triliun atau mencapai 101,79% dari target. Optimisme ini didukung oleh beberapa faktor utama di antaranya kinerja solid ekspor komoditas unggulan Lampung dan diprediksi berlanjut hingga akhir tahun, penguatan aktivitas ekonomi yang mendorong konsumsi domestik serta semakin optimalnya PNBP atas layanan publik. Namun, penurunan belanja pemerintah dan potensi dampak kebijakan tarif resiprokal AS tetap perlu diwaspadai untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan Pendapatan Negara di Provinsi Lampung.

Tabel 2.5. Proyeksi Pendapatan Negara per Triwulan Tahun 2025 Provinsi Lampung (miliar rupiah)

Triwulan	Pajak	PNPB	Total
Realisasi Q1	2.236,69	468,47	2.705,16
Proyeksi Q2	2.085,07	361,27	2.446,34
Proyeksi Q3	2.498,53	421,65	2.920,18
Proyeksi Q4	2.715,47	533,78	3.249,25
Total	9.535,76	1.785,17	11.320,92

Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar, OM-SPAN, 2025 (diolah)

2.1.2 Belanja Negara

Pada tahun 2025 alokasi Belanja Negara di Lampung sebesar Rp31.779,10 miliar, turun sebesar 6,37% (*yoy*). Alokasi ini terdiri dari alokasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp8.718,85 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp23.060,26 miliar. Sampai dengan akhir 31 Maret 2024, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp7.907,44 miliar atau 24,88% dari pagu, dan mencatat pertumbuhan 3,34% (*yoy*).

Grafik 2.5. Realisasi Komponen Belanja Negara Provinsi Lampung Triwulan I 2023 – 2025 (miliar rupiah)

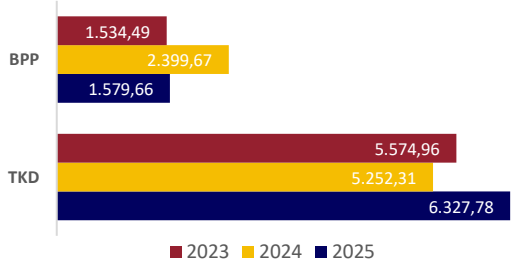

Sumber: OM-SPAN, 2025 (diolah)

Realisasi Belanja Negara didominasi oleh penyaluran TKD dengan kontribusi 80,02% dari total Belanja Negara atau secara nominal Rp6.327,78 miliar. Sementara, untuk realisasi BPP memiliki kontribusi 19,98% atau secara nominal Rp1.579,66 miliar.

2.1.2.1 Belanja Pemerintah Pusat (BPP)

Hingga 31 Maret 2025, realisasi BPP di Provinsi Lampung mencapai Rp1.579,66 miliar atau 18,12% dari pagu. Realisasi ini menggambarkan terjadinya kontraksi yang cukup signifikan yakni 34,17% dari periode yang sama tahun sebelumnya, disebabkan melemahnya penyerapan pada Belanja Barang dan Belanja Modal.

Grafik 2.6. Distribusi Komponen BPP Per Jenis Belanja Triwulan I 2023 – 2025 (miliar rupiah)

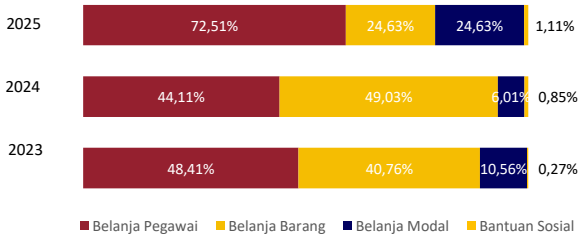

Sumber: OM-SPAN, 2025 (data diolah)

Melihat kontribusi dari jenis BPP terhadap total realisasi BPP, pada Triwulan I-2023, komponen Belanja Pegawai menjadi kontributor terbesar realisasi BPP. Kemudian pada periode Triwulan I-2024 kontribusi Belanja Pegawai menurun seiring peningkatan realisasi pada Belanja Barang. Namun, pada Triwulan I-2025 realisasi belanja pegawai mendominasi seiring dengan turunnya realisasi Belanja Barang disebabkan efisiensi anggaran. Realisasi Belanja Pegawai mendominasi dengan realisasi sebesar 72,51% dari total realisasi BPP, diikuti oleh Belanja Barang (24,63%), Belanja Modal (1,76%), dan Bantuan Sosial (1,11%).

2.1.2.1.1 Berdasarkan Jenis Belanja

Realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2025 menggambarkan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025. Dari seluruh komponen belanja, hanya belanja pegawai yang tumbuh positif secara tahunan, didorong oleh

penyesuaian gaji serta komponen belanja rutin yang bersifat rigid. Sebaliknya, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial mengalami kontraksi. Tren ini mencerminkan pergeseran orientasi kebijakan fiskal menuju konsolidasi, dengan penekanan pada optimalisasi belanja prioritas, pengendalian belanja operasional, serta penguatan disiplin anggaran dalam rangka menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah.

Hingga 31 Maret 2025, kinerja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) berdasarkan jenis belanja menunjukkan bahwa Belanja Pegawai, sebagai komponen terbesar dalam struktur BPP, terealisasi sebesar Rp1.145,36 miliar atau 27,47% dari total pagu, dengan pertumbuhan 8,20% (*yoy*). Kinerja positif ini didorong oleh sejumlah kebijakan, antara lain peningkatan tunjangan kinerja dan tunjangan profesi pada beberapa Kementerian/Lembaga. Realisasi Tunjangan Hari Raya (THR) atau gaji dan tunjangan ke-14 yang dibayarkan pada bulan Maret 2025 juga memperkuat lonjakan belanja pegawai pada triwulan I, karena telah mengakomodasi besaran penyesuaian terbaru baik dari sisi gaji pokok maupun tunjangan.

Hal tersebut menggambarkan bahwa APBN melalui belanja pegawai terus berkontribusi dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi, mengingat komponen ini langsung mengalir ke konsumsi rumah tangga. Dengan demikian, belanja pegawai memiliki efek *multiplier* terhadap pergerakan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan fungsi *countercyclical* APBN dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika global dan domestik.

Grafik 2.7. Pagu, Realisasi, dan Pertumbuhan BPP per Jenis Belanja (miliar rupiah)

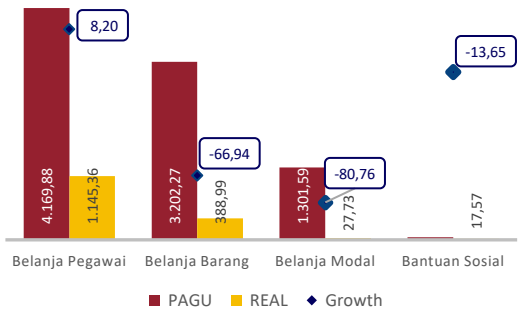

Sumber: SINTESA, 2025 (data diolah)

Belanja Barang sebagai komponen terbesar kedua dalam struktur Belanja Pemerintah Pusat mencatatkan realisasi sebesar Rp388,99 miliar atau 24,63% dari pagu, namun mengalami kontraksi tajam sebesar 66,94% (*yoy*). Penurunan ini sejalan dengan turunnya alokasi pagu Belanja Barang pada tahun 2025 sebesar 41,45% (*yoy*), sebagai implikasi langsung dari kebijakan efisiensi anggaran yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025. Penyesuaian belanja difokuskan pada belanja non-operasional guna menjaga stabilitas fiskal dan mengarahkan pembiayaan pada program-program prioritas. Realisasi Belanja Barang terutama didorong oleh pelaksanaan belanja operasional kantor pada satuan kerja pelayanan pemerintah, serta belanja pemeliharaan yang ditujukan untuk memastikan kebermanfaatan dan memperpanjang umur pakai aset/barang milik negara. Selain itu, kontribusi signifikan juga berasal dari belanja jasa, termasuk pembayaran honorarium bagi pegawai pemerintah non-pegawai negeri seperti tenaga pengamanan, pengemudi, dan petugas kebersihan, yang mendukung kelancaran operasional instansi pemerintah.

Sementara itu, Belanja Modal menunjukkan kontraksi paling signifikan, yakni sebesar 80,76% (*yoy*), dengan realisasi hanya Rp144,13 miliar atau 10,48% dari pagu. Penurunan ini dipengaruhi oleh kebijakan pemblokiran anggaran sebagai bagian dari pengendalian/efisiensi fiskal. Blokir terbesar terjadi pada belanja modal gedung dan bangunan, serta peralatan dan mesin. Tidak seperti belanja rutin, belanja modal memerlukan tahapan perencanaan dan pengadaan yang lebih panjang. Oleh karena itu, pemblokiran pada awal tahun menyebabkan tertundanya proses kontrak dan lelang, yang berdampak pada rendahnya realisasi belanja hingga potensi kegagalan pelaksanaan di tahun anggaran berjalan.

Dari sisi alokasi, hanya Belanja Bantuan Sosial yang mengalami peningkatan pagu, yakni sebesar 3,06% dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran tersebut direalisasikan melalui program Bantuan Pendidikan Tinggi berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, yang disalurkan melalui Satuan Kerja

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Namun demikian, hingga 31 Maret 2025, realisasi belanja bansos tercatat sebesar Rp17,57 miliar atau 38,96% dari pagu, menunjukkan kontraksi sebesar 13,65% secara tahunan (*yoy*). Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya jumlah mahasiswa penerima KIP Kuliah di UIN Raden Intan Lampung, yang secara langsung memengaruhi tingkat penyerapan anggaran bansos di wilayah tersebut.

2.1.2.1.2 Berdasarkan Kementerian Negara/ Lembaga

Grafik 2.8. Perbandingan Pagu dan Realisasi pada Sepuluh K/L Pagu Terbesar Provinsi Lampung Tahun 2025 (miliar Rp, persen)

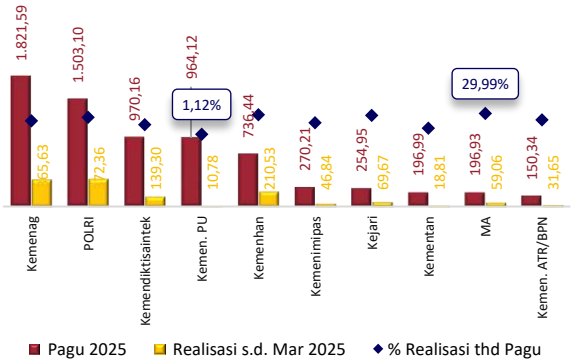

Sumber: SINTESA, 2025 (data diolah)

Capaian kinerja BPP pada Triwulan I-2025 tentunya tidak terlepas dari kinerja sepuluh Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki alokasi pagu APBN terbesar di Provinsi Lampung yang berkontribusi sebesar 83,39% dari total pagu BPP Tahun 2025 di Provinsi Lampung. Kementerian Agama memiliki alokasi anggaran terbesar di Lampung TA 2025 mencapai Rp1.821,59 miliar yang didominasi oleh Belanja Pegawai yang salah satunya dialokasikan untuk membayar Gaji dan Tunjangan PPPK. Selanjutnya, POLRI merupakan urutan kedua dari sepuluh K/L dengan pagu terbesar dengan total alokasi Rp1.503,10 miliar, diikuti oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan total alokasi Rp970,16 miliar di urutan ketiga.

Melihat kinerja sepuluh K/L dengan pagu terbesar berdasarkan tingkat penyerapan terhadap pagu pada Triwulan I-2025,persentase realisasi tertinggi terdapat pada Mahkamah Agung sebesar 29,99% dari pagu. Hal ini utamanya disumbang oleh penyerapan Belanja Barang yang mendominasi total alokasi anggaran, yang dimanfaatkan untuk kantor pelayanan di lingkup Mahkamah Agung, seperti Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Di sisi lain, tingkat serapan yang belum optimal terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum yang hanya mencapai 1,12% dari pagu. Hal ini utamanya disebabkan Belanja Modal yang belum mencatat realisasi hingga 31 Maret 2025 karena masih dalam tahap persiapan pelaksanaan lelang, selain itu 38% dari alokasi Belanja Modal tersebut dalam status diblokir dalam rangka pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran.

Lebih lanjut, apabila dilihat dari persentase pertumbuhan realisasi BPP dari 10 K/L dengan Pagu terbesar di Provinsi Lampung, tingkat pertumbuhan terbesar terjadi pada Satker Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan persentase 21,82% (*yoy*). Kemudian diikuti oleh Satker Kementerian ATR/BPN dengan peningkatan 15,53% (*yoy*). Pertumbuhan realisasi belanja juga menunjukkan angka peningkatan dari tahun 2024 pada Satker Mahkamah Agung seiring dengan pelaksanaan kebijakan kenaikan tunjangan hakim, juga didukung kebijakan pengecualian dalam pelaksanaan efisiensi anggaran bagi beberapa K/L termasuk Mahkamah Agung. Grafik 2.9 menunjukkan pertumbuhan realisasi belanja pada periode Triwulan I Tahun 2024 dan 2025 pada sepuluh K/L dengan alokasi pagu terbesar.

Grafik 2.9. Pertumbuhan Realisasi Belanja pada Sepuluh K/L Pagu Terbesar (persen)

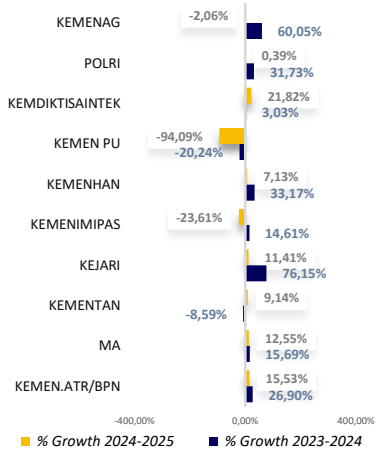

Sumber: SINTESA, 2025 (data diolah)

Pertumbuhan realisasi belanja Triwulan I juga tercatat pada Kejaksaan RI (11,41%), Kementerian Pertanian (9,14%) Kementerian Pertahanan (7,13%), dan Kepolisian RI (0,39%). Sementara, penurunan realisasi Belanja tercatat pada tiga K/L yakni Kementerian Pekerjaan Umum (sebelumnya Kementerian PUPR) sebesar 94,09%, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (sebelumnya Kementerian Hukum dan HAM) sebesar 23,61%, dan Kementerian Agama (2,06%).

2.1.2.1.3 Berdasarkan Fungsi

Sebaran BPP berdasarkan Fungsi ditunjukkan sebagaimana pada Grafik 2.10.

Grafik 2.10. Realisasi BPP Berdasarkan Fungsi Tahun 2025 (miliar Rp, persen)

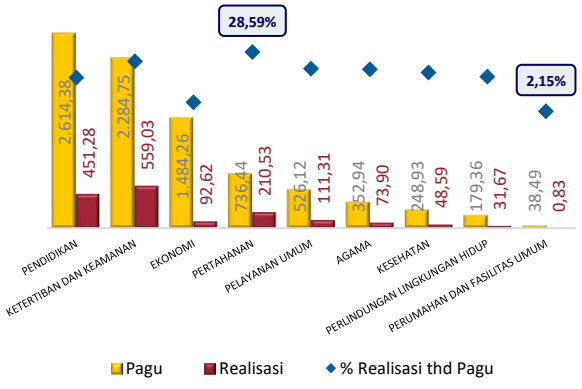

Sumber: SINTESA, 2025 (data diolah)

Alokasi belanja terbesar terdapat pada Fungsi Pendidikan dengan porsi 30,88% dari total APBN di Provinsi Lampung Tahun 2025, secara urut diikuti oleh fungsi Ketertiban dan Keamanan (26,99%), Ekonomi (17,53%), Pertahanan (8,70%), Pelayanan Umum (6,21%), Agama (4,17%), Kesehatan (2,94%), Pelindungan Lingkungan Hidup (2,12%), dan Perumahan dan Fasilitas Umum (0,45%). Alokasi terbesar pada Fungsi Pendidikan terdapat pada Sub Fungsi Pendidikan Tinggi dan Sub Fungsi Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya. Alokasi Belanja pada fungsi pendidikan ini sejalan dengan visi APBN Tahun 2025 nasional untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta mendukung Visi Indonesia Maju 2045.

Sampai dengan 31 Maret 2025,persentase penyerapan pada Fungsi Pendidikan mencapai 17,26% dari total pagu, yang diantaranya dimanfaatkan untuk pembangunan sarana prasarana, dan penyelenggaraan pendidikan, serta tata kelola kelembagaan publik Bidang Pendidikan. Alokasi belanja pada Fungsi Ketertiban dan Keamanan telah terserap 24,47% dari total pagu, yang diantarnya dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Aparat Hukum, modernisasi almatsus dan sarana dan prasarana POLRI, penegakan dan pelayanan hukum, dan program lainnya yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Grafik 2.11. Tren Pertumbuhan BPP Berdasarkan Fungsi Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)

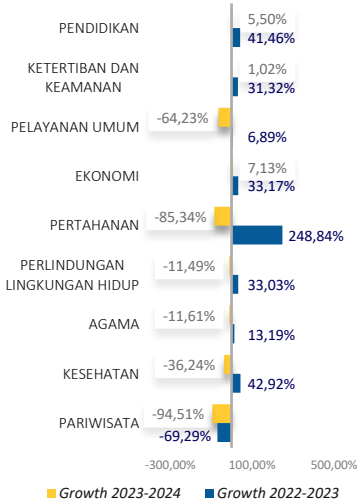

Sumber: SINTESA, 2025 (data diolah)

Selanjutnya, apabila dilihat dari pertumbuhan realisasi belanja, Fungsi Pelayanan Umum melanjutkan pertumbuhan yang signifikan dari tahun lalu hingga 247,28% (*yoy*), termasuk di dalamnya merupakan realisasi belanja untuk mendukung penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya,

pertumbuhan tertinggi kedua berasal dari Fungsi Pendidikan dengan pertumbuhan 41,46% (*yoy*) yang antara lain dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Guru/PNS/PPPK serta operasional penyelenggaraan pendidikan. Di sisi lain, realisasi belanja pada Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum mengalami pertumbuhan negatif disebabkan karena alokasi pagu yang mengalami penurunan dari tahun 2023, serta terdapat pagu yang masih terblokir untuk pemberian bantuan ke masyarakat berupa infrastruktur air minum yang direncanakan terealisasi pada triwulan berikutnya.

2.1.2.1.4 Belanja Pemerintah Pusat Per kapita

Perhitungan BPP Per Kapita dilakukan menggunakan realisasi BPP sampai dengan Maret 2023-2025 dibagi dengan jumlah penduduk tahun berkenaan yang diperoleh dari portal resmi BPS. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, jumlah penduduk di provinsi Lampung pada tahun 2025 mencapai 9,52 juta jiwa, angka ini naik 1,10% (*yoy*) dari jumlah penduduk pada tahun 2024. Perkembangan BPP Per Kapita Triwulan I tahun 2023 s.d. 2025 ditunjukkan pada grafik 2.12.

Grafik 2.12. Perkembangan BPP Per Kapita Triwulan-I 2025 (rupiah, jiwa)

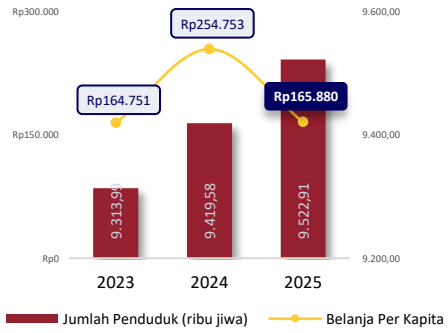

Sumber: OM-SPAN, BPS Provinsi Lampung, 2025 (diolah)

Pada periode Triwulan I-2025, BPP Per Kapita di Lampung mencapai sebesar Rp165.880 tumbuh negatif sebesar 34,89% (*yoy*) seiring dengan realisasi BPP yang terkontraksi. Hal ini mencerminkan rata-rata pengeluaran pemerintah untuk setiap penduduk menjadi lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya sebagai salah satu konsekuensi dijalankannya kebijakan penghematan. Namun demikian, penurunan pengeluaran pemerintah tersebut tidak selalu mengindikasikan berkurangnya bantuan pemerintah kepada masyarakat maupun penurunan kualitas layanan publik, melainkan dapat menunjukkan adanya penajaman prioritas dan pergeseran alokasi belanja ke program yang lebih prioritas, strategis, dan berdampak langsung.

2.1.2.1.5 Kontribusi BPP Terhadap PDRB

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Provinsi Lampung hingga 31 Maret 2025 tercatat memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulan I sebesar 1,30%. Namun, kontribusi ini mengalami kontraksi sebesar 0,84% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik 2.13. Perkembangan Kontribusi BPP Terhadap PDRB 2023 – 2025 (miliar Rp, persen)

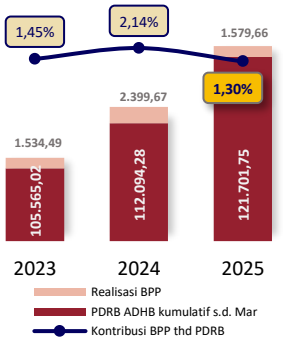

Sumber: OM-SPAN, SINTESA, BPS Provinsi Lampung, 2025 (diolah)

Penurunan kontribusi tersebut mencerminkan pelemahan peran belanja pemerintah terhadap PDRB Lampung melalui komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP). Kontraksi ini terutama disebabkan oleh penurunan signifikan pada komponen Belanja Barang dan Belanja Modal yang masing-masing terkontraksi sebesar 66,94% dan 80,76% secara tahunan (*yoy*). Meskipun demikian, kontraksi yang lebih dalam berhasil tertahan berkat pertumbuhan Belanja Pegawai yang meningkat sebesar 8,20% (*yoy*), sehingga tetap memberikan stimulus positif terhadap PKP di tengah penurunan belanja lainnya.

2.1.2.2 Transfer ke Daerah

Kebijakan TKD pada Tahun 2025 menitikberatkan pada peningkatan sinergi dan harmonisasi fiskal antara pusat dan daerah. Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui optimalisasi penggunaan TKD pada sektor-sektor prioritas dan produktif seperti kebijakan *earmarking* yang

diperluas dari tahun sebelumnya dan menyesuaikan dengan prioritas nasional, serta perbaikan tata kelola TKD yang berkelanjutan, sehingga pada gilirannya dapat memberikan *multiplier effect* yang tinggi bagi perekonomian di daerah.

Alokasi TKD pada tahun 2025 di Provinsi Lampung sebesar Rp23.060,26 miliar, meningkat 1,34% (*yoy*), yang terdiri dari Dana Transfer Umum (DTU), Dana Transfer Khusus (DTK), Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa. DTU terdiri dari komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sementara DTK terdiri dari Komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik.

Peningkatan alokasi TKD utamanya berasal dari peningkatan DTU alokasi berupa DAU dan DBH naik sebesar 2,55% dan 11,29, sedangkan kenaikan DTK berupa DAK Non Fisik sebesar 9,58%. Sementara, kinerja penyaluran TKD sampai dengan 31 Maret 2025 secara nominal telah tersalurkan sebesar Rp6.327,78 miliar atau 27,44% dari pagu, tercatat tumbuh 20,48% (*yoy*). Pertumbuhan ini didorong oleh percepatan penyaluran di hampir seluruh semua komponen belanja, kecuali Insentif Fiskal.

Grafik 2.14. Distribusi Penyaluran TKD Triwulan I 2023 – 2025 per Jenis (miliar rupiah, persen)

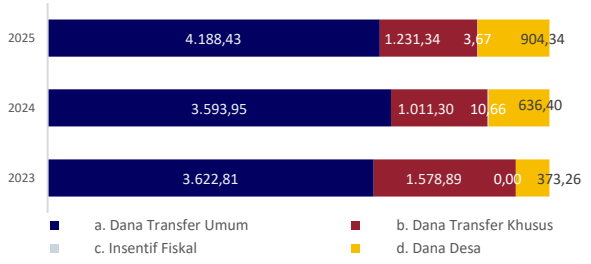

Sumber: SIMTRADA, SINTESA, 2025 (diolah)

Dalam kurun empat tahun terakhir, Penyaluran DTU masih mendominasi penyaluran TKD di Provinsi Lampung, dan secara proporsi menggambarkan kenaikan di tahun 2024 dan kembali meningkat pada tahun 2025. Distribusi penyaluran TKD Triwulan I pada tahun 2023 s.d. 2025 ditunjukkan sebagaimana Grafik 2.14.

Pada Triwulan I-2025, penyaluran DTU memiliki porsi 66,19% dari total penyaluran TKD, dikuti oleh DTK 19,46%, Dana Desa 14,29%, dan Dana Insentif Fiskal 0,05%. Penyaluran DTU utamanya bersumber dari komponen DAU, sedangkan DTK didominasi oleh DAK Non Fisik. Sampai dengan 31 Maret 2025, penyaluran DTU yang mendominasi TKD secara nominal tersalur Rp4.188,43 miliar atau 27,90% dari pagu, tercatat tumbuh sebesar 16,54% (*yoy*), didorong oleh percepatan penyaluran komponen DAU sebesar 16,53% (*yoy*) dan DBH sebesar 17,19% (*yoy*). Selain penyaluran DTU, pertumbuhan juga tercatat pada penyaluran DTK sebesar 21,76% (*yoy*), secara nominal tersalur Rp1.231,34 miliar atau 21,81% dari pagu. Hingga 31 Maret 2025 penyaluran DTK sampai hanya tercatat dari penyaluran komponen DAK Non Fisik, sedangkan untuk komponen DAK Fisik belum terdapat penyaluran.

Grafik 2.15. Pagu, Realisasi dan Pertumbuhan Penyaluran TKD berdasarkan DTU, DTK, Dana IF, dan Dana Desa Triwulan I-2024 (miliar rupiah)

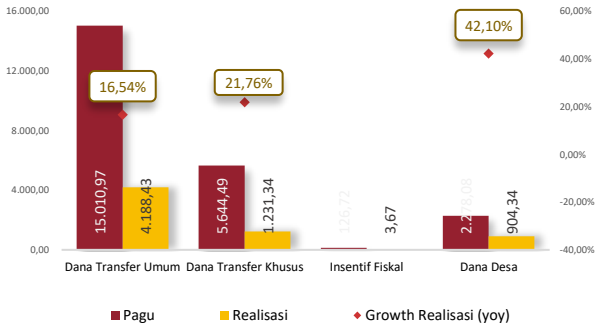

Sumber: OM-SPAN TKD, 2025 (diolah)

Hingga akhir triwulan I TA 2025, realisasi penyaluran Dana Insentif Fiskal baru mencapai Rp3,67 miliar atau setara 2,89% dari total alokasi anggaran. Kinerja ini mencerminkan kontraksi yang cukup tajam, yakni sebesar 65,61% secara tahunan (*yoy*), yang mengindikasikan perlambatan signifikan dalam penyaluran DIF. Di sisi lain, Dana Desa menunjukkan kinerja positif dengan nilai penyaluran sebesar Rp904,34 miliar atau 39,70% dari total alokasi. Capaian ini menggambarkan pertumbuhan penyaluran yang cukup signifikan, yakni 42,10% secara tahunan (*yoy*), dan mencerminkan peningkatan efektivitas distribusi dan serapan dana di tingkat desa.

Kinerja penyaluran TKD secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi dokumen syarat salur yang disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran TKD di tingkat pusat. Untuk mencermati kinerja penyaluran TKD pada masing-masing pemerintah daerah, dapat dilihat melalui persentase penyaluran TKD pada

masing-masing pemerintah daerah serta pertumbuhannya sebagaimana disajikan pada grafik 2.17.

Grafik 2.16. Pagu, Realisasi, dan Penyaluran TKD Triwulan I-2025 per Pemerintah Daerah (miliar Rp, persen)

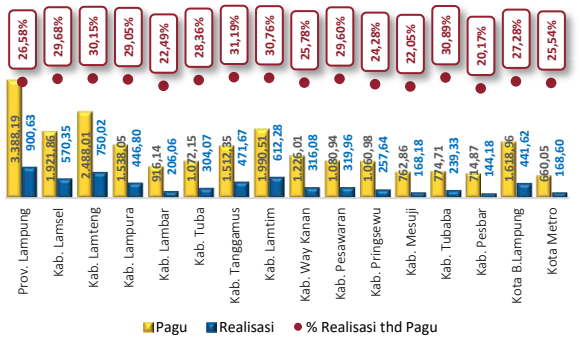

Sumber: OM-SPAN TKD, 2025 (diolah)

Berdasarkan grafik tersebut, sampai dengan 31 Maret 2025, Kabupaten Tanggamus merupakan pemerintah daerah dengan persentase penyaluran TKD terbesar yakni 31,19% dari alokasi, didukung oleh realisasi DAK Non Fisik dan Dana Desa yang cukup baik. Sementara Kabupaten Pesisir Barat merupakan pemerintah daerah dengan persentase penyaluran terendah yakni 20,17% dari pagu dipengaruhi oleh penyaluran Dana Desa yang belum terealisasi.

2.1.2.2.1 Dana Transfer Umum (DTU)

Grafik 2.17. Komponen Penyaluran DTU Triwulan I 2024 dan 2025 (miliar Rp, persen)

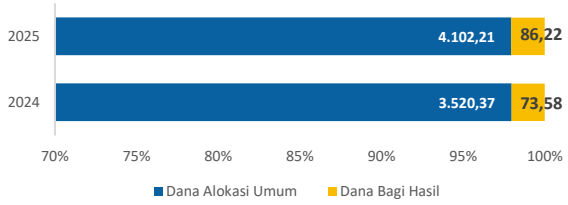

Sumber: OM-SPAN TKD, 2025 (diolah)

Alokasi DTU Tahun 2025 di Provinsi Lampung sebesar Rp15.101,97 miliar, meningkat 2,92% (*yoy*) dari alokasi tahun 2024. Sampai dengan 31 Maret 2025, DTU telah tersalur sebesar Rp4.188,43 miliar atau 27,90% dari pagu, yang terdiri dari komponen DAU dan DBH. Angka penyaluran ini mengalami pertumbuhan secara tahunan sebesar 16,54% (*yoy*), didukung dari percepatan penyaluran kedua komponen belanja baik dari DAU maupun DBH. Penyaluran komponen DAU mendominasi penyaluran DTU yakni sebesar 97,94%. Sedangkan komponen DBH menyumbang kontribusi terhadap penyaluran DTU dengan porsi yang minim, yakni 2,06%.

Grafik 2.18. Pagu, Realisasi, dan Pertumbuhan Penyaluran DTU Triwulan I 2024 dan 2025 (miliar Rp, persen)

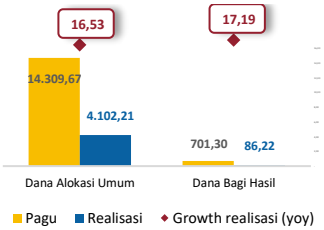

Sumber: OM-SPAN TKD, 2025 (diolah)

Pada Tahun 2025, Alokasi DAU di Provinsi Lampung sebesar Rp14.309,67 miliar, meningkat 2,55% (*yoy*), yang terdiri dari dua jenis DAU yakni DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (*Block Grant*) dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya (*Specific Grant*). DAU yang Ditentukan Penggunaannya terbagi ke dalam beberapa bidang antara lain DAU Penggajian Formasi PPPK, DAU Pendanaan Kelurahan, DAU Bidang Pendidikan, DAU Bidang Kesehatan, dan DAU Bidang Pekerjaan Umum. Rincian alokasi DAU per jenis sebagaimana pada Grafik 2.19.

Sepanjang Bulan Januari hingga Maret 2025, DAU yang telah disalurkan di Provinsi Lampung sebesar Rp4.102,21miliar, atau 28,67% dari pagu, tercatat mengalami peningkatan yakni 16,53% (*yoy*). DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya telah tersalur tepat waktu pada setiap bulannya dengan total nominal salur Rp4.022,33 miliar, juga di dalamnya termasuk potongan DAU pada pemda Tulang Bawang Barat untuk pembayaran kembali pokok pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta potongan DAU pada 12 pemda untuk penyesuaian TKD dan Dana Desa TAYL. Selanjutnya, untuk DAU yang Ditentukan Penggunaannya, secara nominal telah tersalur Rp79,87 miliar yang tersalur hampir di seluruh jenis DAU kecuali Penggajian Formasi PPPK Daerah yang hingga Triwulan I TA 2025 belum mencatat realisasi.

Grafik 2.19. Pagu DAU Per Jenis Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)

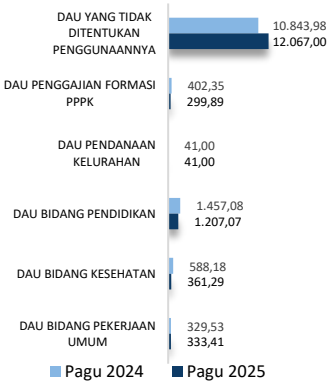

Sumber: OMSPAN TKD, 2025 (diolah)

Selanjutnya, untuk Komponen DBH memiliki alokasi sebesar Rp701,30 miliar, tumbuh 11,29% (*yoy*) yang terdiri dari alokasi DBH Pajak, DBH Sumber Daya Alam (SDA), dan DBH Lainnya. Perhitungan alokasi DBH TA 2025 dilakukan berdasarkan data tahun 2024 yang di proyeksikan sampai semester II, dengan perhitungan alokasi formula dan alokasi kinerja. Jumlah DBH yang telah disalurkan selama Triwulan I TA 2025 sebesar Rp86,22 miliar, atau 12,29%. Jumlah penyaluran ini tumbuh 17,19% (*yoy*) dipengaruhi peningkatan realisasi hampir di semua jenis DBH kecuali PPH, juga seiring kenaikan pagu dari tahun 2024.

Grafik 2.20. Pagu, Realisasi, dan Pertumbuhan Penyaluran DBH Per Jenis Triwulan I-2024 (miliar Rp, persen)

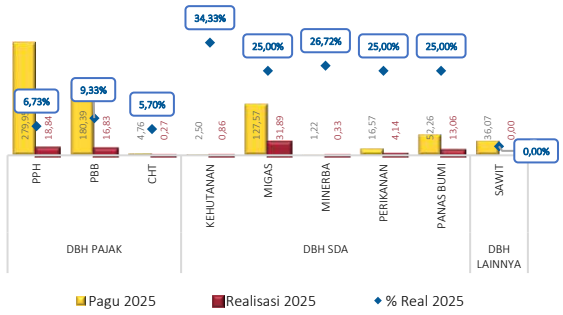

Sumber: OMSPAN TKD, 2025 (diolah)

Alokasi DBH Pajak memiliki porsi terbesar dari total alokasi DBH di Provinsi Lampung. Sampai dengan 31 Maret 2025, DBH PPh telah tersalur Rp18,84 miliar atau 6,73% dari pagu. DBH PBB telah tersalur Rp16,83 miliar atau 9,33% dari pagu. Sementara dari sektor SDA, nominal penyaluran terbesar berasal dari DBH Migas sebesar Rp31,89 miliar atau 25% dari pagu. DBH Panas Bumi tersalur Rp13,06 miliar atau 20% dari pagu. Untuk DBH yang sifatnya *earmarked* diantaranya DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Kehutanan Dana Reboisasi, dan DBH Sawit penyalurannya masih perlu dioptimalkan.

2.1.2.2.2 Dana Transfer Khusus (DTK)

Dalam APBN Provinsi Lampung TA 2025, alokasi DTK mencapai sebesar Rp5.644,49 miliar, meningkat 1,14% (*yoy*), yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non fisik. Sampai dengan 31 Maret 2025, realisasi DTK secara nominal mencapai Rp1.231,34 miliar dengan penyaluran sebesar 21,81% dari pagu, tumbuh positif 21,76% (*yoy*) dibanding tahun lalu utamanya karena percepatan penyaluran komponen DAK Non Fisik.

Grafik 2.21. Pagu, Realisasi, dan Pertumbuhan Penyaluran DTK Triwulan I 2024 dan 2025 (miliar Rp, persen)

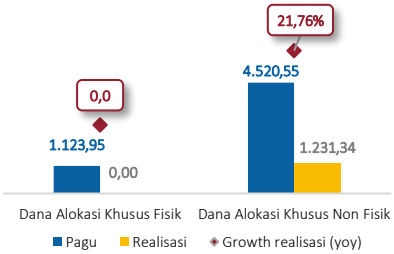

Sumber: OM-SPAN TKD, 2025 (diolah)

Alokasi DAK Fisik TA 2025 di Provinsi Lampung sebesar Rp1.123,95 miliar, tumbuh negatif sebesar 22,68% (*yoy*). Penurunan alokasi pagu DAK Fisik paling signifikan terjadi pada Bidang Pendidikan, Pertanian, Irigasi, selain itu Bidang Perdagangan, Perikanan dan Kelautan, juga Perumahan dan Pemukiman tidak mendapatkan alokasi di TA 2025.

Hingga 31 Maret 2025, belum terdapat penyaluran DAK Fisik pada seluruh pemda di wilayah Provinsi Lampung. Hal ini disebabkan karena saat ini pemerintah daerah dalam proses penyiapan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik, yang di antaranya tahapan penetapan kontrak pengadaan barang dan jasa. Rentang waktu penyaluran DAK Fisik Tahap I paling lambat dilakukan sampai dengan bulan Juli.

Grafik 2.22. Alokasi Pagu DAK Fisik Per Bidang Tahun 2024 dan 2025 (miliar, Rp)

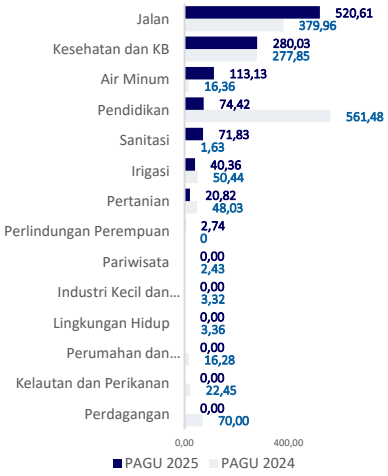

Sumber: OM-SPAN TKD, 2025 (diolah)

Selanjutnya, untuk Komponen DAK Non Fisik, alokasi pagu Tahun 2025 di Provinsi Lampung secara total sebesar Rp4.520,55 miliar atau naik 9,58% (*yoy*) dari alokasi Tahun 2024. DAK Non Fisik di Provinsi Lampung terdiri dari beberapa jenis yang ditunjukkan sebagaimana Tabel 2.5 di bawah.

Tabel 2.6. Pagu, Realisasi, dan Pertumbuhan Penyaluran DAK Non Fisik Per Jenis Tahun 2025 (miliar, Rp)

Jenis	Pagu	Realisasi	% Real thd Pagu	Realisasi 2024	% Growth Realisasi (yoy)
Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	2.121,24	219,27	10,34%	0,00	100,00%
Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	21,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	20,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Dana Bantuan Operasional Sekolah	1.661,17	807,51	48,61%	803,06	0,56%
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	413,98	80,69	19,49%	85,26	-5,36%
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	90,44	36,49	40,34%	31,91	14,34%
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini	122,77	60,45	49,24%	60,52	-0,12%
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	40,05	18,68	46,64%	19,41	-3,79%
Dana Bantuan Operasioanal Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	5,36	2,68	50,00%	2,75	-2,61%
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	6,11	0,00	0,00%	2,55	-100,00%
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	12,15	2,82	23,23%	0,00	0,00%
Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah	5,48	2,74	50,00%	-	100,00%
Total	**4.515,06**	**1.228,60**	**27,21%**	**1.005,46**	**22,19%**

Sumber: OM-SPAN TKD, 2025 (diolah)

Sampai dengan 31 Maret 2025, DAK Non Fisik di Provinsi Lampung telah tersalur Rp1.231,34 miliar atau 27,24% dari pagu. Angka penyaluran ini tercatat meningkat secara tahunan sebesar 21,76% (*yoy*). Peningkatan penyaluran DAK Non Fisik dipengaruhi percepatan penyaluran beberapa jenis DAK Non Fisik di antaranya yaitu Dana Tunjangan Profesi Guru ASN-D, Dana Bantuan Operasional (BOP) Keluarga Berencana, Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah. Namun, di sisi lain, Dana Bantuan Operasional Kesehatan, Dana BOP Pendidikan Kesetaraan, Dana BOP Museum dan Taman Budaya, Dana BOP Pendidikan Anak Usia Dini, serta Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak justru mencatatkan penurunan secara tahunan.

2.1.2.2.3 Dana Insentif Daerah/Insentif Fiskal

Alokasi Dana Insentif Fiskal Provinsi Lampung tahun 2025 sebesar Rp126,72 miliar, seluruhnya merupakan penghargaan atas kinerja tahun sebelumnya yang diberikan kepada 11 pemda. Kriteria penilaian mencakup dukungan terhadap kebijakan nasional, seperti pengendalian inflasi, penggunaan Produk Dalam Negeri, penurunan kemiskinan ekstrem dan *stunting*, serta percepatan realisasi APBD.

Nilai alokasi tahun 2025 menurun 50,09% (*yoy*) karena belum terdapat tambahan atas kinerja tahun berjalan. Hingga 31 Maret 2025, realisasi penyaluran baru mencapai Rp3,67 miliar (2,89% dari pagu), jauh lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu 65,61% (*yoy*). Realisasi ini berasal dari penyaluran kepada Pemda Tulang Bawang, yang masih dipengaruhi oleh proses koordinasi dan kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran.

Grafik 2.23. Pagu dan Realisasi Insentif Fiskal Lampung Tahun 2025 per 31 Maret 2025 (miliar Rp)

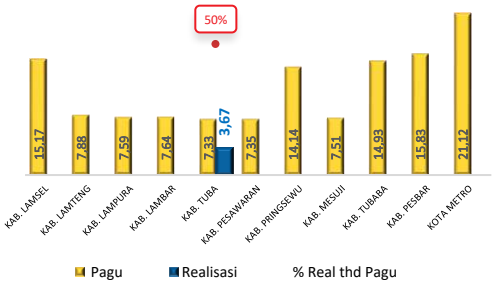

Sumber: OM-SPAN TKD, 2025 (diolah)

2.1.2.2.4 Dana Desa

Pada tahun 2025, pagu Dana Desa terbagi atas dana desa yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*) dengan prioritas utama yang ditujukan untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam

bentuk BLT desa, program ketahanan pangan dan hewani, serta program pencegahan dan penurunan *stunting,* selain itu ada dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya (non-*earmarked*) yang ditujukan untuk mendanai program sektor prioritas di desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa dan/atau penyertaan modal pada BUMDes. Kedua jenis Dana Desa tersebut masing-masing disalurkan dalam dua tahap.

Pagu Dana Desa Tahun 2025 di Provinsi Lampung sebesar Rp2.278,08 miliar, menurun 2,47% (*yoy*). Alokasi ini terdiri dari Dana Desa Reguler sebesar Rp1.180,71 miliar, Dana Desa *Earmarked* Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp163,4 miliar, Dana Desa *Earmarked* Ketahanan Pangan sebesar Rp492,88 miliar, dan Dana Desa *Earmarked* Program Pencegahan dan Penanganan *Stunting* sebesar Rp192,42 miliar. Jenis Dana Desa *Earmarked* di Tahun 2025 juga mengalami pertambahan yaitu Padat Karya, Teknologi dan Informasi, Potensi Desa, dan Perubahan Iklim.

Grafik 2.24. Distribusi Pagu Dana Desa *Earmarked* dan Non-*Earmarked* Tahun 2025 (miliar Rp)

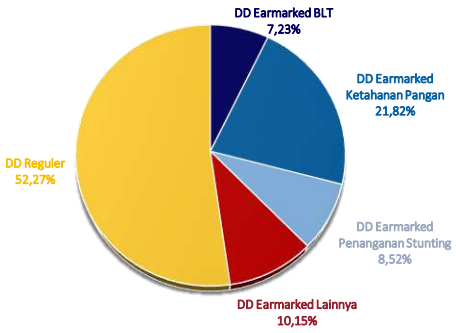

Sumber: OM-SPAN TKD, 2025 (diolah)

Sampai dengan 31 Maret 2025, Dana Desa yang telah tersalurkan di Provinsi Lampung sebesar Rp904,34 miliar yang terdiri dari Penyaluran Dana Desa *Earmarked* sebesar Rp506,46 miliar dan kepada dan Dana Desa Reguler sebesar Rp397,88 miliar. Angka penyaluran ini mencatat peningkatan yang signifikan yakni 42,10% (*yoy*), yang dipengaruhi oleh *redesign* kebijakan penyaluran Dana Desa yang semula dilakukan tiga tahap menjadi dua tahap, pemberian *reward* berupa persentase penyaluran Dana Desa Non *Earmarked* Tahap I yang lebih besar untuk Desa yang berstatus Mandiri, serta didukung oleh peningkatan kepatuhan pemda dalam menyampaikan dokumen syarat salur. Penyaluran Dana Desa Tahap I dilaksanakan paling lambat pada Bulan Juni, sehingga masih terdapat ketersediaan waktu bagi pemda yang masih memiliki desa belum salur Tahap I untuk mengajukan dokumen syarat salur ke KPPN.

Grafik 2.25. Clustering Penyerapan Dana Desa Triwulan I-2025 (miliar Rp, persen)

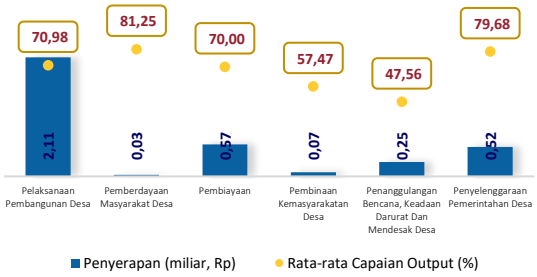

Sumber: OM-SPAN, data sementara diakses 25 Mei 2025 (diolah)

Dari total Dana Desa yang telah tersalur, nominal dana yang telah terserap dan dilaporkan oleh pemda adalah sebesar Rp3,36 miliar. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tercatat memiliki nominal penyerapan tertinggi sebesar Rp2,11 miliar, diantaranya dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana infrastruktur dan transportasi desa, seperti pembangunan jalan usaha tani, prasarana jalan dan jembatan desa, hingga fasilitas penunjang kesehatan desa seperti gedung posyandu dan mobil *ambulance*. Sementara, apabila dicermati dari rata-rata persentase capaian output, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki rata-rata persentase tertinggi yakni 81,25%, diantaranya dimanfaatkan untuk pelatihan keterampilan masyarakat, pelatihan wirausaha dan UMKM, serta penguatan BUMDes dan koperasi desa.

2.1.2.3 Prognosis/*Outlook* Belanja Negara

Proyeksi realisasi Belanja Negara disusun berdasarkan akumulasi proyeksi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD). Proyeksi BPP mengacu pada estimasi Halaman III DIPA dari masing-masing satuan kerja. Sementara itu, proyeksi TKD dihitung menggunakan metode rata-rata eksponensial. Seluruh proyeksi didasarkan pada data historis lima tahun terakhir untuk menjaga konsistensi dan validitas estimasi.

Grafik 2.26. Proyeksi/Outlook Belanja Negara Regional Lampung Tahun 2025 (miliar, Rp)

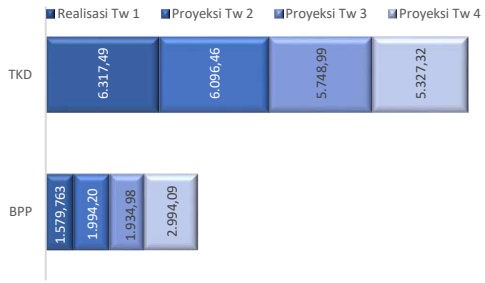

Sumber: OM-SPAN, Halaman III DIPA, ALCo, 2025 (diolah)

Pada Triwulan II, Belanja Negara diperkirakan mencapai Rp8.090,66 miliar, terdiri dari BPP sebesar Rp1.994,20 miliar dan TKD sebesar Rp6.096,46 miliar. Hingga akhir tahun, dengan mempertimbangkan realisasi Triwulan I, total realisasi Belanja Negara diproyeksikan mencapai Rp24.096,04 miliar atau 99,21% dari pagu. Proyeksi ini mencakup BPP sebesar Rp8.503,04 miliar dan TKD sebesar Rp23.490,25 miliar. Pada Triwulan IV, Belanja Negara diperkirakan tetap meningkat, didorong oleh percepatan penyerapan anggaran dan implementasi Langkah-Langkah Akhir Tahun.

2.1.3 Surplus/Defisit APBN

Pada Triwulan I, posisi APBN di Provinsi Lampung mengalami defisit sebesar Rp6.275,82 miliar, atau secara tahunan melebar 15,97% (*yoy*) dari periode yang sama tahun lalu. Melebarnya defisit ini dipengaruhi oleh capaian realisasi Belanja Negara yang tumbuh, namun di sisi Penerimaan Negara mengalami kontraksi.

Grafik 2.27. Surplus/Defisit APBN Regional Lampung Tahun 2023-2024 (miliar, Rp)

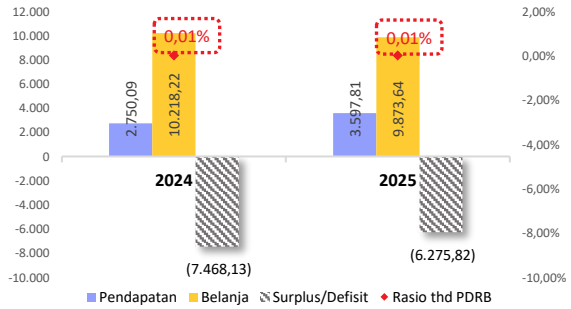

Sumber: OM-SPAN, 2025 (diolah)

Rasio defisit APBN terhadap PDRB pada Triwulan I tercatat sebesar 0,01%, sama dengan rasio pada triwulan I 2024. Stabilnya rasio ini dipengaruhi oleh peningkatan realisasi Pendapatan Negara untuk mendukung program strategis nasional dan produktivitas pertanian, serta penurunan Belanja Negara yang akibat upaya efisiensi anggaran.

2.1.4 Capaian Output Sektoral

Belanja Negara di Bidang Kesehatan dialokasikan untuk menjamin penyelenggaraan layanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan guna mewujudkan masyarakat yang sehat. Pemerintah terus mendorong pemerataan akses terhadap layanan kesehatan dasar. Rincian realisasi Belanja Negara di Bidang Kesehatan pada Triwulan I 2025 disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Capaian Output Strategis Bidang Kesehatan Triwulan I-2024 (miliar Rp, persen)

Uraian	Pagu	Realisasi	% Real	Capaian Output	
				Volume	Satuan
Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9,44	0,46	4,90%	0	paket
Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	5,62	-	0,00%	0	lembaga
Pemutakhiran Pendataan Keluarga	4,23	-	0,00%	0	layanan
Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	2,91	0,01	0,25%	343	orang
Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk (HS)	2,43	0,04	1,73%	0	paket
Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	2,31	0,06	2,52%	0	lembaga
Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	2,28	-	0,00%	0	unit

Sumber: OM-SPAN, 2025 (diolah)

Sementara itu, Belanja di Bidang Pendidikan tetap menjadi fokus utama dalam APBN 2024 sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif menuju Indonesia Maju. Realisasi belanja pada bidang ini selama Triwulan I-2025 telah memberikan sejumlah capaian strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Capaian Output Strategis Bidang Pendidikan Triwulan I 2025 (miliar Rp, persen)

Uraian	Pagu	Realisasi	% Real	Capaian Output	
				Volume	Satuan
Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)	184,38	37,15	20,15%	3429,95	layanan
PTKIN yang meningkat kualitas layanan pendidikannya melalui BLU	164,58	-	0,00%	164	lembaga
Guru Non-PNS penerima Tunjangan Profesi	157,20	27,28	17,35%	48	orang

Uraian	Pagu	Realisasi	% Real	Capaian Output	
				Volume	Satuan
Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU)	109,27	1,99	1,82%	48	layanan
Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (PHLN)	106,82	-	0,00%	0	paket
Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)	88,21	0,66	0,75%	0	paket
Perguruan Tinggi Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN)	84,63	10,86	12,83%	17	orang

Sumber: OM-SPAN, 2025 (diolah)

Pembangunan infrastruktur di Lampung terus dilanjutkan sebagai upaya memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan jaringan sumber daya air untuk mendukung sektor pertanian dalam menghadapi perubahan iklim, serta mendorong pertumbuhan sektor properti. Realisasi Belanja Negara di Bidang Infrastruktur pada Triwulan I-2025 telah menghasilkan sejumlah output strategis yang tercantum dalam Tabel 2.9.

Tabel 2.9. Capaian Output Strategis Bidang Infrastruktur Triwulan I 2025 (miliar Rp, persen)

Uraian	Pagu	Realisasi	% Real	Capaian Output	
				Volume	Satuan
Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM	1,33	0,01	0,40%	0	paket
Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi	1,31	-	0,00%	0	paket
Perencanaan dan Penganggaran Bidang Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	0,64	-	0,00%	0	paket
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	0,60	-	0,00%	0	paket
Infrastruktur Tanggap Darurat	0,54	0,06	10,81%	9	unit
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	0,47	-	0,00%	0	paket
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	0,33	-	0,00%	0	unit

Sumber: OM-SPAN, 2025 (diolah)

2.1.5 Kinerja Penyaluran Kredit Program Pemerintah

Kanwil DJPb Provinsi Lampung juga memiliki peran dalam monitoring dan evaluasi investasi pemerintah antara lain berupa kredit bersubsidi bagi masyarakat. Investasi pemerintah tersebut ditujukan untuk mengakselerasi pembangunan dan perekonomian khususnya di daerah. Kedepannya, diharapkan dengan adanya peran fiskal dalam memberikan modal baik dalam bentuk penerusan pinjaman maupun kredit program kepada para pelaku UMKM, mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya yang lebih besar, serta menghasilkan *multiplier effect* bagi ekonomi regional.

2.1.5.1 Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Realisasi penyaluran KUR di Provinsi Lampung sampai dengan 31 Maret 2025 telah mencapai Rp2.504,98 miliar kepada 47.466 debitur. Nilai penyaluran KUR triwulan I-2025 meningkat sebesar 8,26% (*yoy*) dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi oleh dominasi sektor pertanian dan perdagangan yang merupakan sektor utama di Provinsi Lampung sebagai penerima utama KUR, komitmen perbankan dalam mendukung UMKM, serta pertumbuhan ekonomi regional yang positif.

Grafik 2.28 Tren Penyaluran KUR di Provinsi Lampung Triwulan I Tahun 2023-2025 (miliar rupiah, debitur)

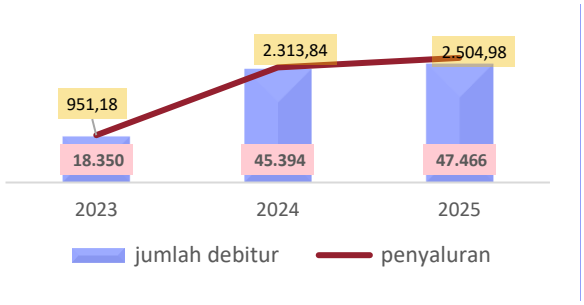

Sumber : SIKP, 2025 (diolah)

Penyaluran KUR triwulan I-2025 berdasarkan skema menunjukkan dominasi skema Mikro, dengan realisasi sebesar Rp1.850,42 miliar kepada 44.506 debitur. Skema ini diikuti oleh skema Kecil sebesar Rp653,03 miliar kepada 2.812 debitur, Supermikro Rp1,36 miliar kepada 143 debitur, dan TKI sebagai yang terendah dengan Rp174 juta kepada 5 debitur.

Skema Mikro tercatat sebagai yang paling diminati dalam tiga tahun terakhir, seiring fleksibilitas dan jangkauannya yang luas bagi pelaku usaha kecil. Sebaliknya, skema TKI mengalami penyaluran terbatas karena kendala struktural seperti kuota nasional yang terbatas, minimnya sosialisasi, tingginya risiko kredit macet akibat sulitnya pemantauan debitur di luar negeri, serta terbatasnya bank yang memiliki kuota untuk menyalurkan KUR dalam skema ini.

Penyaluran KUR di Provinsi Lampung masih didominasi oleh sektor Pertanian dan Perdagangan, yang mencakup 89,65% dari total penyaluran dengan jumlah 42.551 debitur untuk kedua sektor

tersebut. Hal ini seiring dengan peran sektor Pertanian dan Perdagangan sebagai sektor unggulan dalam perekonomian Lampung. Secara spasial, penyaluran tertinggi terdapat di Kabupaten Lampung Tengah yang mencapai Rp601,72 miliar kepada 12.123 debitur, sedangkan penyaluran terendah berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar Rp33,41 miliar untuk 439 debitur. Dari sisi bank penyalur, Bank Rakyat Indonesia (BRI) memiliki kontribusi tertinggi sebesar 85,73% dari total penyaluran, diikuti oleh Bank Mandiri dan BPD Lampung secara berturut-turut 7,03% dan 5,04%.

2.1.5.2 Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Pembiayaan UMi ditargetkan untuk para pelaku UMKM yang masih berskala sangat kecil termasuk di antaranya pedagang kaki lima. Realisasi penyaluran pembiayaan UMi di Lampung hingga 31 Maret 2025 mencapai Rp52,39 miliar kepada 9.253 debitur yang sebagian besar disalurkan melalui PT Penanaman Nasional Madani (PNM) secara *linkage*.

Grafik 2.29 Penyaluran UMi di Lampung Triwulan I Tahun 2023-2025

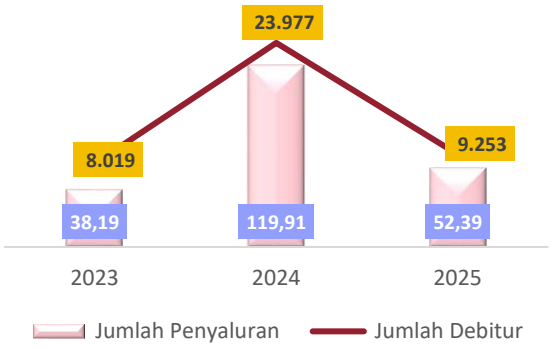

Sumber : SIKP UMi, 2025 (diolah)

Penyaluran UMi di Lampung pada triwulan I-2025 terbesar di Kabupaten Way Kanan sebesar Rp8,88 miliar kepada 1.432 debitur, disusul Lampung Utara dan Lampung Tengah. Sementara itu, di Kota Metro belum terdapat penyaluran. Penurunan penyaluran UMi disebabkan oleh *shifting* pembiayaan oleh masyarakat ke KUR dan mencerminkan meningkatnya kesadaran pelaku usaha mikro terhadap akses pembiayaan dan peningkatan kapasitas usaha serta sinergi pemerintah dengan lembaga penyalur dan OJK dalam sosialisasi program. Di Lampung, UMi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM, memperluas inklusi keuangan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Untuk mendukung hal tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Lampung aktif melakukan sosialisasi dan edukasi, memfasilitasi akses pembiayaan, serta berkoordinasi dengan perbankan dan lembaga keuangan. Selain itu, monitoring dan evaluasi rutin dilakukan guna memastikan efektivitas program, didukung dengan digitalisasi layanan agar proses pengajuan dan pencairan lebih efisien. Langkah-langkah ini diharapkan dapat semakin mengoptimalkan manfaat pembiayaan bagi pelaku usaha di Lampung.

2.1.6 Isu Strategis Pelaksanaan APBN di Daerah

Didukung oleh pertumbuhan Pendapatan Negara yang kuat dan penyerapan Belanja Negara yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, pelaksanaan APBN di Provinsi Lampung hingga 31 Maret 2025 menunjukkan kinerja yang adaptif dalam merespons dinamika ekonomi, mendukung program prioritas nasional, serta berperan sebagai penyangga dalam menghadapi risiko global yang berdampak pada perekonomian regional.

Namun demikian, pelaksanaan APBN di daerah masih menghadapi berbagai tantangan strategis yang perlu mendapatkan perhatian, baik dari sisi Pendapatan Negara maupun Belanja Negara.

Isu Pendapatan Negara

1) *Ketergantungan terhadap Komoditas Ekspor yang Volatile*

Struktur penerimaan perpajakan Lampung masih sangat bergantung pada komoditas unggulan seperti *crude palm oil* (CPO) dan produk turunannya. Ketergantungan ini menyebabkan volatilitas yang tinggi pada penerimaan, terutama ketika terjadi fluktuasi harga di pasar global. Meskipun memberikan windfall jangka pendek saat harga tinggi, namun dalam jangka menengah–panjang menimbulkan kerentanan fiskal.

2) *Implementasi Digitalisasi melalui Coretax*

Transformasi sistem administrasi perpajakan melalui Coretax memberikan peluang besar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan akurasi pengawasan. Namun, proses adaptasi dan integrasi data lintas instansi masih menghadapi tantangan teknis dan sumber daya manusia, terutama di daerah.

3) Optimalisasi PNBP Layanan Publik

Potensi PNBP dari sektor layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi masih belum tergarap secara optimal. Ketiadaan standardisasi biaya layanan dan lemahnya transparansi penggunaan dana menjadi kendala utama dalam menjadikan PNBP sebagai sumber pembiayaan yang berkelanjutan dan akuntabel.

Isu Belanja Negara

1) Kontraksi Belanja Pemerintah Pusat, terutama Belanja Barang dan Modal

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Lampung mengalami kontraksi tajam, dengan Belanja Barang turun sebesar 66,94% dan Belanja Modal sebesar 80,76%. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari kebijakan efisiensi fiskal, namun berdampak pada terhambatnya pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik vital.

2) Menurunnya Kontribusi Belanja Negara terhadap PDRB

Kontribusi Belanja Pemerintah Pusat terhadap PDRB Lampung menurun menjadi hanya 1,30%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan belanja modal dan barang, sehingga mengurangi efek stimulus fiskal terhadap perekonomian daerah.

3) Belum Optimalnya Pemanfaatan Insentif Fiskal (IF)

Realisasi IF hingga akhir Maret 2025 baru mencapai 2,89%. Hal ini menunjukkan bahwa daerah belum sepenuhnya mampu memanfaatkan mekanisme insentif berbasis kinerja fiskal untuk mendorong perbaikan tata kelola dan peningkatan output layanan publik.

4) Ketimpangan Penyaluran dan Realisasi Antar Daerah

Penyaluran Dana Desa dan Transfer ke Daerah (TKD) masih menunjukkan disparitas antar kabupaten/kota. Sebagai contoh, Kabupaten Pesisir Barat mencatatkan persentase penyaluran terendah sebesar 20,17%, terutama akibat keterlambatan dalam kelengkapan dokumen penyaluran.

5) Ketidakseimbangan Komposisi Belanja Pegawai

Komposisi belanja pemerintah pusat di Lampung didominasi oleh belanja pegawai (72,51%), sedangkan alokasi untuk belanja modal dan bantuan sosial hanya 1,76% dan 1,11%. Struktur belanja seperti ini menunjukkan bahwa peran APBN masih sangat besar dalam menjaga stabilitas daya beli dan keberlangsungan layanan dasar, namun belum cukup kuat dalam mendorong transformasi ekonomi berbasis produktivitas.

6) Potensi Keterlambatan Penyaluran DAK Fisik

Potensi keterlambatan penyampaian dokumen syarat salur DAK Fisik tahap I Sub Bidang Kesehatan pada Pemda Kabupaten Pringsewu, akibat dari keterlambatan juknis dari Kementerian Kesehatan yang disinyalir karena adanya efisiensi anggaran.

SUPLEMEN 4
Peluang Investasi Regional Lampung

Kawasan Industri Way Pisang

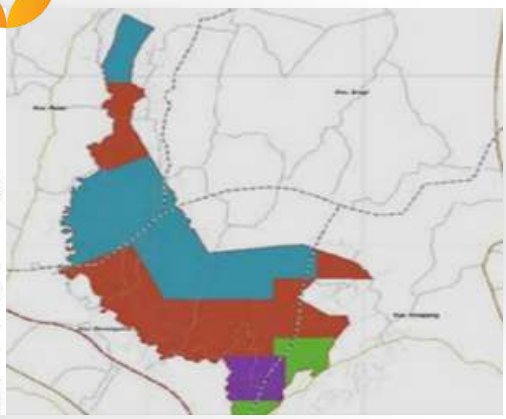

Kawasan Industri Way Pisang dirancang untuk menampung komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan di Lampung Selatan, serta mendukung rencana pembangunan Terminal Agribisnis sebagai pusat distribusi untuk wilayah seperti Banten dan DKI Jakarta. Kawasan ini mencakup 3.500 ha, dengan 460 ha (tahap 1) telah mendapat persetujuan prinsip dari KLHK, dan 3.000 ha (tahap 2 dan 3) masih dalam proses.

Maksud dan Tujuan Pembangunan

- Mendorong percepatan pemerataan industri di Kab Lampung Selatan.
- Memperkuat struktur industri hulu dan hilir berbasis sumber daya alam.
- Meningkatkan pertumbuhan sektor industri nonmigas.
- Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri.
- Membuka peluang investasi, baik domestik maupun asing, di Provinsi Lampung.

Perkiraan Nilai Investasi
Rp401 Miliar

Lokasi yang Strategis

- Dekat Hutan Terdaftar Way Pisang, Kabupaten Lampung Selatan (mencakup Kecamatan Ketapang, Palas/Sragi, dan Penengahan).
- Dekat Tol Trans Sumatra dan Jalan Lintas Nasional.
- Dekat dengan pelabuhan regional dan internasional; pelabuhan pendukung direncanakan akan dibangun. Akses keluar tol terdekat: Simpang Susun Bakauheni (5 km) dan Simpang Susun Kalianda (15 km)

Industri Prospektif

- Industri Agro Hulu
- Industri Makanan (Pemrosesan Makanan)
- Bahan Kimia Dasar Berbasis Minyak & Batu bara
- Logam dan Mineral Bukan Industri Logam
- Industri alat transportasi

Sumber: FOILA (Forum Investasi Lampung)

2.2 PELAKSANAAN APBD

APBD tahun 2025 Regional Lampung menargetkan Pendapatan Daerah sebesar Rp32.481,16 miliar, turun 3,29% dibandingkan target APBD-P tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kontraksi pada beberapa komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Antar Daerah, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Namun, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat diperkirakan tumbuh 1,42% (*yoy*), memberikan dukungan terhadap kapasitas fiskal daerah.

Sejalan dengan penurunan target pendapatan, APBD tahun 2025 mengalokasikan Belanja Daerah sebesar Rp32.527,14 miliar, terkontraksi 4,55% dibandingkan alokasi APBD-P tahun 2024. Penurunan ini mencakup sebagian besar komponen belanja, termasuk Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Belanja Hibah, serta Belanja Subsidi. Namun demikian, beberapa pos belanja mengalami peningkatan, seperti Belanja Pegawai, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Bantuan Keuangan, mencerminkan penyesuaian prioritas fiskal untuk memperkuat ketahanan sosial dan operasional pemerintahan.

Tabel 2.10. I-Account Realisasi APBD Konsolidasi Provinsi Lampung Triwulan I Tahun 2024-2025 (miliar rupiah)

I-Account (dalam Miliar Rp)	TA 2024			TA 2025			*% Growth* (2024-2025)	
	PAGU	REALISASI	%REAL	PAGU	REALISASI	%REAL	PAGU	REALISASI
PENDAPATAN DAERAH	33.585,23	3.892,98	11,59%	32.481,16	5.412,00	16,66%	-3,29%	39,02%
PAD	8.597,61	562,77	6,55%	7.726,73	1.047,54	13,56%	-10,13%	86,14%
Pendapatan Transfer (Pusat)	22.795,13	3.231,99	14,18%	23.119,04	4.278,14	18,50%	1,42%	32,37%
Transfer Antar daerah	2.038,47	98,21	4,82%	1.518,92	71,59	4,71%	-25,49%	-27,11%
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	154,01	0,00	0,00%	116,48	14,74	12,65%	-24,37%	14971186,91%
BELANJA DAERAH	34.076,21	3.804,51	11,16%	32.527,14	3.839,29	11,80%	-4,55%	0,91%
Belanja Operasi	**23.910,91**	**2.950,47**	**12,34%**	**23.600,63**	**3.283,40**	**13,91%**	**-1,30%**	**11,28%**
Belanja Pegawai	12.503,89	1.944,75	15,55%	13.488,35	2.358,60	17,49%	7,87%	21,28%
Belanja Barang dan Jasa	9.235,84	855,87	9,27%	8.941,14	848,47	9,49%	-3,19%	-0,86%
Belanja Bunga	40,42	10,11	25,02%	40,26	6,49	16,13%	-0,38%	-35,80%
Belanja Subsidi	9,65	0,00	0,00%	7,11	0,41	5,72%	-26,34%	
Belanja Hibah	2.096,03	139,15	6,64%	1.095,71	68,81	6,28%	-47,72%	-50,55%
Belanja Bantuan Sosial	25,08	0,58	2,32%	28,06	0,62	2,20%	11,87%	5,85%
Belanja Modal	**4.622,17**	**334,16**	**7,23%**	**3.666,38**	**208,92**	**5,70%**	**-20,68%**	**-37,48%**
Belanja Modal	4.622,17	334,16	7,23%	3.666,38	208,92	5,70%	-20,68%	-37,48%
Belanja Tidak Terduga	**110,84**	**3,20**	**2,89%**	**215,99**	**21,75**	**10,07%**	**94,87%**	**579,38%**
Belanja Tidak Terduga	110,84	3,20	2,89%	215,99	21,75	10,07%	94,87%	579,38%
Belanja Transfer	**5.432,29**	**516,68**	**9,51%**	**5.044,14**	**325,23**	**6,45%**	**-7,15%**	**-37,06%**
Belanja Bagi Hasil	1.968,18	387,51	19,69%	1.551,56	79,96	5,15%	-21,17%	-79,37%
Belanja Bantuan Keuangan	3.464,11	129,17	3,73%	3.492,58	245,27	7,02%	0,82%	89,88%
SURPLUS/ (DEFISIT)	-490,98	88,47	-18,02%	-45,98	1.572,71	-3420,62%	-90,64%	1677,71%
PEMBIAYAAN	490,98	167,03	34,02%	45,98	12,24	26,61%	-90,64%	-92,67%
Penerimaan Pembiayaan	748,90	179,44	23,96%	309,89	61,76	19,93%	-58,62%	-65,58%
Pengeluaran Pembiayaan	257,92	12,41	4,81%	263,92	49,52	18,76%	2,33%	299,10%
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA	0,00	255,50		0,00	1.584,94		0,00%	520,33%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)-TW Lingkup Provinsi Lampung, SIKRI (diolah)

2.2.1 Pendapatan Daerah

Grafik 2.30. Perbandingan Pagu-Realisasi Pendapatan Daerah (miliar rupiah) dan Pertumbuhannya (persen) Triwulan I 2024 dan 2025

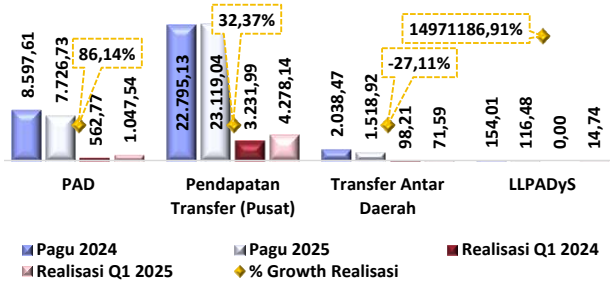

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Meskipun mengalami penurunan target, hingga 31 Maret 2025, Pendapatan Daerah Regional Lampung mencapai Rp5.412,00 miliar atau 16,66% dari target APBD, tumbuh signifikan sebesar 39,02% (*yoy*). Peningkatan ini didorong oleh akselerasi penerimaan pada hampir seluruh komponen pendapatan, termasuk PAD, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Sementara itu, Pendapatan Transfer Antar Daerah terkontraksi 27,11% (*yoy*), terutama sebagai dampak penerapan opsen pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang menggantikan mekanisme bagi hasil PKB dan BBNKB dari provinsi ke kabupaten/kota tahun berjalan dengan skema *split payment*. Kebijakan ini tidak hanya mempercepat penyaluran dana melalui distribusi langsung, tetapi juga meningkatkan kontribusi PAD dengan mengubah status penerimaan dari bagi hasil menjadi Pajak Daerah, sehingga memperkuat struktur pendapatan dan mendorong kemandirian fiskal daerah.

2.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Grafik 2.31. Perbandingan Komposisi PAD Lampung Triwulan I 2024 dan 2025 (miliar rupiah)

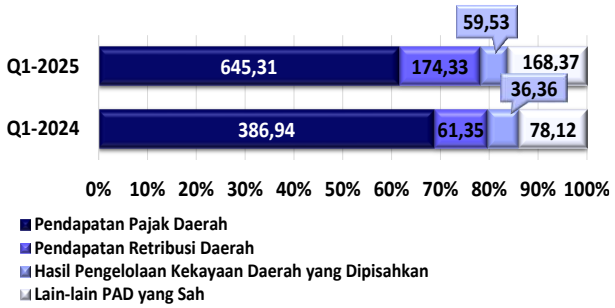

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Sampai dengan 31 Maret 2025, PAD Regional Lampung mencapai Rp1.047,54 miliar atau 13,56% dari target, mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 86,14% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan realisasi pada seluruh komponen utama, yaitu Pajak Daerah yang tumbuh 66,77% (*yoy*), Retribusi Daerah yang melonjak 184,16% (*yoy*), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang meningkat 63,73% (*yoy*), serta Lain-Lain PAD yang Sah yang tumbuh 115,52% (*yoy*).

Sejalan dengan peningkatan ini, kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah juga meningkat, dari 14,46% pada Triwulan I-2024 menjadi 19,36% pada Triwulan I-2025, menunjukkan peran strategis PAD dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Kontribusi Retribusi Daerah terhadap total PAD mengalami peningkatan signifikan, mencapai 16,64% pada Triwulan I-2025, dibandingkan 10,90% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, Pajak Daerah tetap menjadi penyumbang terbesar dengan proporsi 61,60% dari total PAD, mengukuhkan posisinya sebagai komponen utama dalam struktur pendapatan daerah.

2.2.1.2 Rasio Pajak Daerah (*Local Tax Ratio*)

Tabel 2.11. Perbandingan *Local Tax Ratio* Lampung Triwulan I Tahun 2024 dan 2025

Komponen (miliar Rupiah)	Triwulan I-2024	Triwulan I-2025
Pendapatan Pajak Daerah	386,94	645,31
Pendapatan Retribusi Daerah	61,35	174,33
Total Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD)	448,30	819,64
PDRB (ADHB)	112.092,92	121.701,75
Local Tax Ratio (Persen)	0,40	0,67

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, BPS (diolah)

Local Tax Ratio merupakan indikator penting yang mencerminkan kapasitas fiskal daerah dan tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Pada Triwulan I-2025, rasio ini tercatat sebesar 0,67%, meningkat dibandingkan 0,40% pada Triwulan I-2024. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan PDRD sebesar 82,84% (*yoy*) yang melampaui pertumbuhan PDRB 8,57% (*yoy*), meskipun masih jauh di bawah batas ideal yaitu 3%, yang menunjukkan besarnya ketergantungan Lampung terhadap sumber pendapatan lainnya dalam hal ini dana transfer pemerintah pusat. Rendahnya rasio ini juga menunjukkan bahwa potensi penerimaan daerah, khususnya dari sektor perpajakan dan retribusi, belum sepenuhnya dioptimalkan.

Dari sisi sektoral, meski sektor Pertanian menyumbang 24,37% terhadap PDRB Provinsi Lampung, kontribusinya terhadap PDRD masih belum sebanding karena sebagian besar aktivitas dilakukan oleh pelaku usaha kecil dan informal yang belum tercakup dalam basis perpajakan, serta terbatasnya objek pajak dan retribusi yang dapat dipungut dari kegiatan pertanian primer. Sebaliknya, sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi 19,52% terhadap PDRB menunjukkan potensi fiskal yang lebih besar karena memiliki struktur usaha yang lebih formal dan nilai tambah yang tinggi. Oleh karena itu, pengembangan industrialisasi melalui hilirisasi komoditas pertanian, didukung oleh peningkatan investasi dan inovasi di sektor pengolahan, menjadi langkah penting dan strategis untuk memperluas basis perpajakan, meningkatkan kemandirian fiskal daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.2.1.3 Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer pada Triwulan I-2025 menunjukkan perbedaan signifikan antara komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tercatat sebesar Rp4.278,14 miliar atau 18,50% dari target, meningkat 32,37% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Meski tetap menjadi kontributor utama dengan porsi 79,05% dari total Pendapatan Daerah, kontribusi ini sedikit menurun dari 83,02% pada tahun sebelumnya, mencerminkan upaya diversifikasi sumber pendapatan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Grafik 2.32. Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer Lampung Triwulan I Tahun 2024 dan 2025 (miliar rupiah)

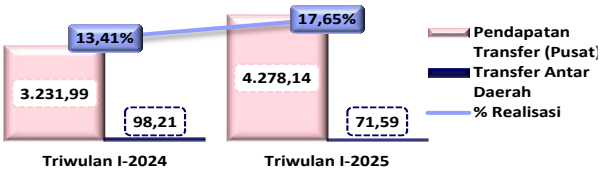

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Sebaliknya, Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami kontraksi signifikan, hanya mencapai Rp71,59 miliar atau 4,71% dari target, turun 27,11% (*yoy*). Penurunan ini salah satunya dipengaruhi oleh implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 yang mengubah mekanisme penerimaan PKB dan BBNKB dari skema bagi hasil menjadi Pajak Daerah Kabupaten/Kota (opsen). Kebijakan ini mempercepat penyaluran dana melalui distribusi langsung dan memperkuat struktur pendapatan daerah, namun mengurangi potensi Pendapatan Transfer Antar Daerah, karena sebagian besar penerimaan kini dicatat langsung sebagai PAD, bukan lagi alokasi bagi hasil dari provinsi.

2.2.1.4 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDyS) mencakup berbagai sumber pendapatan, termasuk Pendapatan Hibah, Dana Darurat, serta Pendapatan Lainnya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Pada Triwulan I-2025, realisasi LLPDyS Provinsi Lampung mencapai Rp14,74 miliar, atau 12,65% dari target, menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2024, yang hampir tidak mencatatkan realisasi pada komponen ini. Kenaikan ini terutama didorong oleh penerimaan dari Pendapatan Hibah serta Pendapatan Lain-lain, termasuk Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), yang menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan LLPDyS pada tahun berjalan.

Grafik 2.33. Perbandingan Realisasi LLPDyS Lampung Triwulan I Tahun 2024 dan 2025 (miliar rupiah)

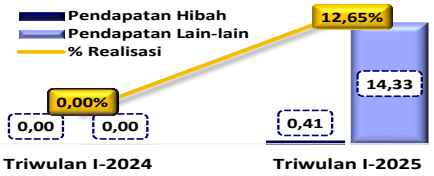

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

2.2.1.5 Analisis Tingkat Kemandirian Daerah

Tingkat kemandirian daerah diukur melalui rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan serta rasio Transfer Pemerintah Pusat (TPP) terhadap total pendapatan. Daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah.

Grafik 2.34. Perbandingan Realisasi PAD (miliar rupiah) dan Rasio Kemandirian Fiskal (persen) Lampung Triwulan I Tahun 2024 dan 2025

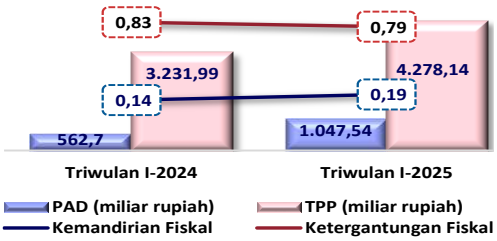

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Secara agregat, Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) regional Lampung pada Triwulan I-2025 tercatat sebesar 0,19 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang sebesar 0,14. Meskipun terjadi peningkatan, nilai ini masih berada dalam kategori Belum Mandiri menurut klasifikasi Sampurna (2018), yang menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah untuk membiayai kebutuhannya secara mandiri masih terbatas.

Tabel 2.12. Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal

Rasio Kemandirian	Kondisi Kemandirian Fiskal
0,00 ≤ IKF <0,25	Belum Mandiri
0,25 ≤ IKF <0,50	Menuju Kemandirian
0,50 ≤ IKF <0,75	Mandiri
0,75 ≤ IKF ≤1,00	Sangat Mandiri

Sumber (Sampurna,2018)

Peningkatan IKF ini sejalan dengan kenaikan PAD yang tumbuh lebih dari 86% (*yoy*), dari Rp562,7 miliar pada Triwulan I-2024 menjadi Rp1.047,54 miliar pada Triwulan I-2025. Namun, rasio ketergantungan fiskal tetap tinggi, meskipun turun dari 0,83 pada Triwulan I-2024 menjadi 0,79 pada Triwulan I-2025, yang menunjukkan sebagian besar pendanaan daerah masih bergantung pada transfer pusat.

Secara spasial, Provinsi Lampung memiliki rasio kemandirian tertinggi di antara pemerintah daerah di Regional Lampung dengan rasio 0,44, berada dalam kategori Menuju Kemandirian. Sementara itu, Kab. Pesisir Barat mencatat rasio kemandirian terendah, yaitu 0,03, mencerminkan tingkat ketergantungan fiskal yang sangat tinggi terhadap dana transfer pusat. Kabupaten Tulang Bawang memiliki tingkat ketergantungan tertinggi dengan rasio 0,97, sementara Provinsi Lampung memiliki tingkat ketergantungan terendah sebesar 0,56.

Grafik 2.35. Rasio Kemandirian Fiskal dan Ketergantungan Fiskal Daerah per Pemda Triwulan I Tahun 2025

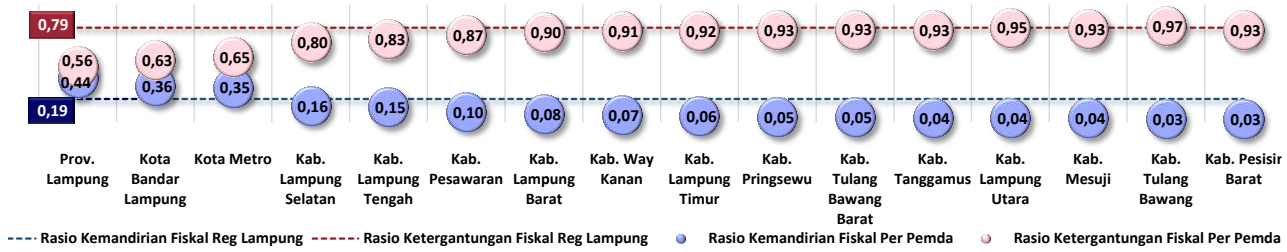

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

2.2.1.6 Prognosis/*Outlook* Pendapatan

Tabel 2.13. Proyeksi Ketercapaian Pendapatan s.d. Akhir Tahun 2025

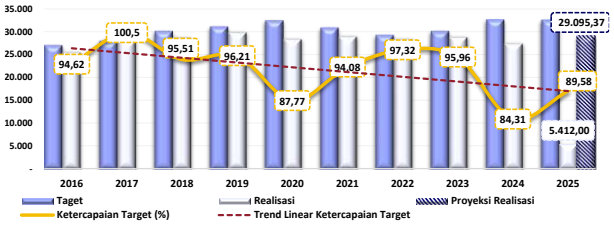

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, DJPK (diolah)

Berdasarkan *tren linear* ketercapaian target selama sembilan tahun terakhir, proyeksi ketercapaian pendapatan daerah Provinsi Lampung pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 89,58% dari total target APBD yang ditetapkan. Dengan target pendapatan daerah sekitar Rp32.481,16 miliar, pendapatan daerah tahun 2025 diproyeksikan mencapai sekitar Rp29.095,37 miliar, mencerminkan peningkatan moderat dibandingkan tahun sebelumnya. Proyeksi ini mempertimbangkan pola historis serta realisasi hingga Triwulan I-2025 yang tercatat sebesar Rp5.412,00 miliar, atau sekitar 16,66% dari total target, meningkat 39,02% (*yoy*). Meskipun demikian, tantangan dalam optimalisasi PAD tetap menjadi perhatian, mengingat rasio ketercapaian target pada tahun 2024 hanya mencapai 84,31%, lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang umumnya berada di atas 90%.

Salah satu faktor yang diperkirakan akan mendorong peningkatan pendapatan pada tahun 2025 adalah penerapan kebijakan *pemutihan* pajak kendaraan bermotor, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur No. G/291/VI.03/HK/2025. Kebijakan ini mencakup pembebasan seluruh pokok tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), termasuk opsen pajak dan pajak progresif untuk kendaraan kedua dan seterusnya yang berlaku mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2025. Insentif ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis penerimaan daerah, serta memperbaiki rasio kemandirian fiskal Provinsi Lampung pada tahun 2025.

2.2.1.7 Rekomendasi Kebijakan Pendapatan

Beberapa rekomendasi kebijakan terkait Pendapatan Daerah di regional Lampung berdasarkan analisis pada bab ini antara lain:

a. *Optimalisasi Pajak Daerah melalui Kebijakan Insentif yang Tepat Sasaran*

Kebijakan *pemutihan* pajak kendaraan bermotor diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis penerimaan daerah. Namun, untuk menjaga keberlanjutan pendapatan daerah, diperlukan langkah strategis yang lebih berfokus pada pembinaan kepatuhan jangka panjang. Pemda perlu memperkuat kualitas pendataan wajib pajak untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data, yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam merancang insentif yang tepat sasaran. Insentif berbasis kinerja, seperti diskon pajak bagi wajib pajak yang konsisten membayar tepat waktu atau pengurangan tarif progresif untuk kendaraan yang mendukung pengurangan emisi karbon, dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat asas keadilan, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada kebijakan *pemutihan*, menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkelanjutan dan berdaya tahan.

b. *Pemanfaatan Potensi Retribusi Daerah dan Pengelolaan Aset Secara Optimal*

Mengingat peningkatan signifikan pada kontribusi retribusi daerah hingga 16,64% dari total PAD pada Triwulan I-2025, Pemda perlu memperkuat pengelolaan aset daerah, termasuk pasar, terminal, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya. Peningkatan kualitas layanan, transparansi tarif, serta penguatan pengawasan terhadap penerimaan retribusi akan memperbesar kontribusi sektor ini terhadap PAD. Selain itu, pengembangan kerja sama dengan pihak swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pengelolaan aset strategis dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan pendapatan daerah.

c. *Peningkatan Kontribusi Sektor Produktif melalui Hilirisasi dan Industrialisasi*

Dengan kontribusi sektor pertanian yang tinggi terhadap PDRB namun rendah terhadap PAD, Pemda Lampung perlu mendorong hilirisasi hasil pertanian dan pengembangan industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. Kebijakan ini dapat mencakup insentif bagi industri hilir, peningkatan infrastruktur penunjang, serta dukungan terhadap inovasi teknologi dan pengembangan pasar ekspor. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga memperluas kesempatan kerja dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

d. *Penguatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk Optimalisasi Transfer Dana*

Mengingat tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat, Pemda perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan kelancaran alokasi dan penyaluran dana transfer. Optimalisasi penggunaan dana transfer melalui perencanaan yang lebih matang, pengawasan ketat, serta peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran akan membantu mengurangi ketergantungan fiskal dan memperbesar ruang fiskal daerah.

2.2.2 Belanja Daerah

Sampai dengan 31 Maret 2025, realisasi Belanja Daerah Regional Lampung mencapai Rp3.839,29 miliar atau 11,80% dari total pagu anggaran. Realisasi ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 0,91% (*yoy*), menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas fiskal meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Grafik 2.36. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Daerah (miliar rupiah) dan Pertumbuhannya (persen) s.d. Triwulan I Tahun 2024 dan 2025

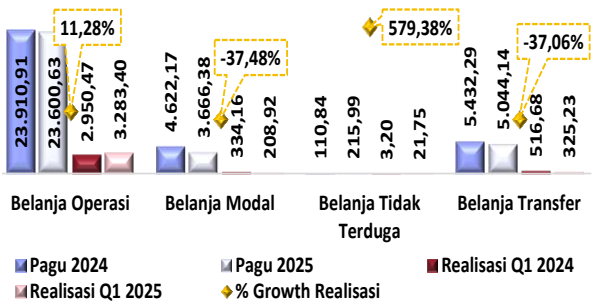

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

2.2.2.1 Berdasarkan Jenis Belanja

Belanja Daerah berdasarkan jenisnya diklasifikasikan dalam empat kategori utama, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pada Triwulan I-2025, realisasi Belanja Daerah Regional Lampung masih didominasi oleh belanja operasi dengan kontribusi mencapai 85,52% dari total realisasi, atau sebesar Rp3.283,40 miliar, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2024, di mana belanja operasi menyumbang 77,55%. Peningkatan tersebut mencerminkan prioritas pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan belanja rutin guna mendukung operasional pemerintahan dan pelayanan publik. Komposisi Belanja Daerah per Pemda menurut jenis belanja dapat dilihat pada grafik 2.36.

Grafik 2.37. Komposisi Belanja Daerah per Pemda (miliar rupiah) Triwulan I-2025

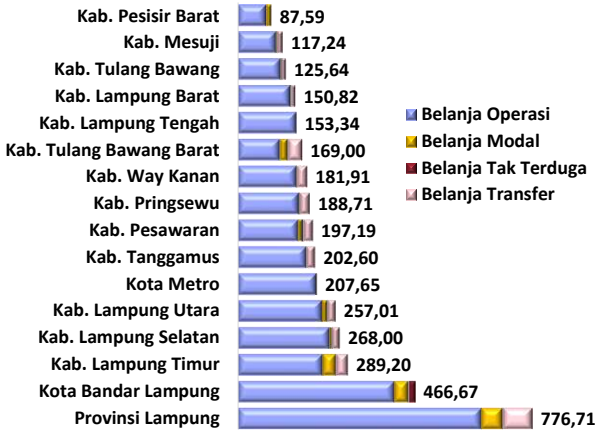

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

2.2.2.1.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi hingga Triwulan I-2025 tercatat sebesar Rp3.283,40 miliar atau 13,91% dari pagu, tumbuh 11,28% (*yoy*). Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan Belanja Pegawai yang mencapai Rp2.358,60 miliar atau 17,49% dari pagu, mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 21,28% (*yoy*). Belanja Pegawai tetap menjadi komponen dominan dalam struktur Belanja Operasi, dengan kontribusi sebesar 71,83% terhadap total Belanja Operasi atau 61,43% dari keseluruhan belanja daerah pada Triwulan I-2025. Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang hanya mencapai 51,12% dari total belanja daerah. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pemerintah daerah wajib menyesuaikan alokasi Belanja Pegawai maksimal 30% dari APBD paling lambat pada tahun anggaran 2027, oleh karena itu diperlukan strategi untuk secara bertahap menurunkan porsi Belanja Pegawai guna memenuhi ketentuan ini tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik.

Grafik 2.38. Perbandingan Realisasi Belanja Operasi tahun Triwulan I Tahun 2024 dan 2025 (miliar rupiah)

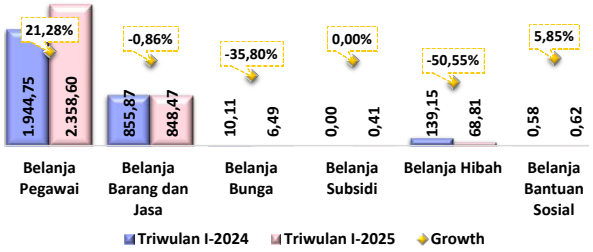

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Sementara itu, Belanja Barang dan Jasa mencatatkan realisasi sebesar Rp848,47 miliar atau 9,49% dari pagu, mengalami kontraksi sebesar 0,86% (*yoy*). Kontribusinya terhadap total Belanja Operasi juga menurun dari 29,01% pada Triwulan I-2024 menjadi 25,84% pada Triwulan I-2025.

Belanja Bunga, meskipun memiliki tingkat realisasi yang relatif tinggi sebesar 16,13% dari pagu, juga mengalami penurunan tajam dengan kontraksi sebesar 35,80% (*yoy*), dari Rp10,11 miliar pada Triwulan I-2024 menjadi Rp6,49 miliar pada periode yang sama tahun 2025.

Belanja Hibah tercatat mengalami kontraksi tajam sebesar 50,55% (*yoy*), dengan realisasi sebesar Rp68,81 miliar pada Triwulan I-2025, antara lain disebabkan oleh tidak dialokasikannya kembali anggaran hibah untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak, yang pada tahun 2024 menjadi salah satu komponen utama dalam Belanja Hibah.

Di sisi lain, Belanja Subsidi mulai terealisasi sebesar Rp0,41 miliar atau 5,72% dari pagu, meskipun kontribusinya terhadap total Belanja Daerah masih relatif kecil. Sementara itu, Belanja Bantuan Sosial mencatat peningkatan 5,85% (*yoy*) menjadi Rp0,62 miliar, mengindikasikan perluasan cakupan

program sosial pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan sosial masyarakat, meskipun porsinya tetap kecil dalam struktur Belanja Operasi.

2.2.2.1.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Daerah Provinsi Lampung hingga Triwulan I-2025 tercatat sebesar Rp208,92 miliar atau 5,70% dari pagu, terkoreksi turun 37,48% (*yoy*). Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya alokasi pagu Belanja Modal pada Tahun 2025, serta kontraksi pada sebagian besar komponen utama Belanja Modal. Meski demikian, rendahnya capaian realisasi ini perlu menjadi perhatian, mengingat Belanja Modal berperan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tetap menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp147,47 miliar atau 70,59% dari total Belanja Modal, meskipun mengalami penurunan signifikan sebesar 31,05% (*yoy*). Sementara itu, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, yang berkontribusi 16,62% terhadap total Belanja Modal, mengalami kontraksi tajam sebesar 65,83% (*yoy*) dengan realisasi hanya mencapai Rp34,71 miliar.

Grafik 2.39. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lampung Triwulan I Tahun 2024 dan 2025 (miliar rupiah)

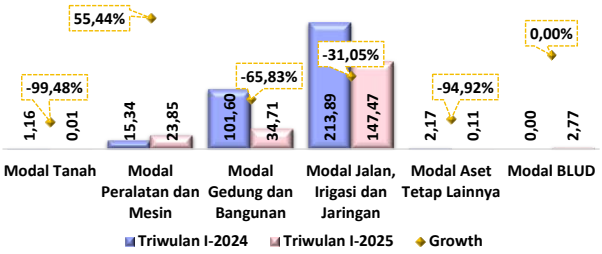

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Di sisi lain, Belanja Modal Peralatan dan Mesin mencatatkan peningkatan signifikan sebesar 55,44% (*yoy*) menjadi Rp23,85 miliar, memberikan kontribusi 11,41% terhadap total Belanja Modal. Meskipun demikian, peningkatan ini belum cukup untuk mendorong kinerja Belanja Modal secara keseluruhan, mengingat kontribusinya yang relatif kecil dibandingkan belanja modal infrastruktur. Sementara itu, Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Modal Aset Lainnya belum mencatatkan realisasi.

2.2.2.1.3 Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga di Provinsi Lampung hingga akhir Triwulan I-2025 tercatat sebesar Rp21,75 miliar atau 10,07% dari pagu, mengalami lonjakan signifikan sebesar 579,38% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 yang hanya mencapai Rp3,20 miliar atau 2,89% dari pagu. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Belanja Tidak Terduga ditujukan untuk keadaan darurat yang mendesak dan tidak terprediksi atau bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, tingginya pertumbuhan Belanja Tidak Terduga perlu diimbangi dengan pengelolaan yang lebih ketat untuk memastikan alokasi ini digunakan secara tepat sasaran dan efisien, serta tidak mengganggu keseimbangan fiskal daerah dalam jangka panjang.

2.2.2.1.4 Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer hingga Triwulan I-2025 tercatat sebesar Rp325,23 miliar atau 6,45% dari pagu, terkontraksi 37,06% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan tajam pada komponen Transfer Bagi Hasil, yang turun hingga 79,37% (*yoy*). Kontraksi ini sebagian besar terjadi pada transfer dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, yang mencatat penurunan signifikan sebesar 79,22%, salah satunya sebagai dampak dari penerapan kebijakan opsen pajak yang mengubah skema pembagian pendapatan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Di sisi lain, komponen Belanja Bantuan Keuangan mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 89,88% (*yoy*), dengan realisasi mencapai Rp245,27 miliar. Peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan alokasi Belanja Bantuan Keuangan dari Kabupaten/Kota ke Desa, yang merupakan salah satu bentuk dukungan untuk memperkuat

kapasitas fiskal di tingkat desa dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah perdesaan.

2.2.2.2 Berdasarkan Fungsi

Berdasarkan fungsinya, Belanja Daerah Provinsi Lampung mencakup sembilan fungsi utama, yaitu Pelayanan Umum, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Lingkungan Hidup, Perumahan dan Fasilitas Umum, Kesehatan, Pariwisata, Pendidikan, serta Perlindungan Sosial. Alokasi terbesar diberikan kepada Fungsi Pelayanan Umum dengan pagu sebesar Rp10.630,92 miliar atau 32,83% dari total anggaran, menunjukkan prioritas untuk mendukung berbagai pelayanan administratif dan operasional pemerintahan. Hingga Triwulan I-2025, realisasi belanja pada fungsi ini mencapai Rp1.229,59 miliar atau 11,57% dari pagu, memberikan kontribusi 32,03% terhadap total realisasi belanja daerah.

Grafik 2.40. Pagu dan Realisasi Belanja per Fungsi Triwulan I Tahun 2025 (miliar rupiah)

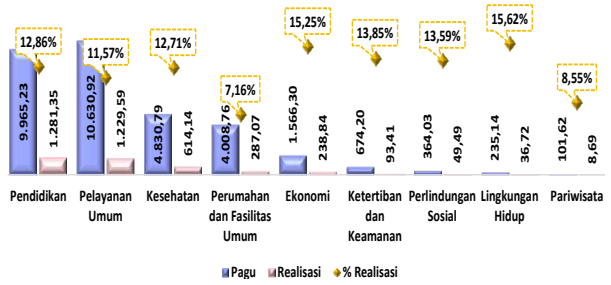

Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung Triwulan I-2025 (diolah)

Fungsi Pendidikan menempati posisi kedua dengan alokasi sebesar Rp9.965,23 miliar atau 30,78% dari total pagu, mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Alokasi ini juga sejalan dengan ketentuan *mandatory spending*, di mana fungsi Pendidikan wajib dialokasikan paling sedikit 20% dari total belanja daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Hingga Triwulan I-2025, realisasi belanja Pendidikan mencapai Rp1.281,35 miliar atau 12,86% dari pagu, menjadikannya penyumbang terbesar dengan kontribusi 33,37% dari total realisasi belanja daerah.

2.2.2.3 Kontribusi Belanja Terhadap PDRB

Belanja daerah merupakan salah satu instrumen fiskal yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui mekanisme pengeluaran pemerintah. Dalam PDRB Pengeluaran, belanja pemerintah tercermin dalam komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang meliputi pengeluaran dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam provinsi tersebut, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat (APBN) yang terkait dengan provinsi, serta Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayah provinsi bersangkutan.

Tabel 2.14. Perbandingan Kontribusi Belanja Daerah terhadap PDRB Triwulan I Tahun 2024 dan 2025

Komponen	Triwulan I-2024	Triwulan I-2025
Realisasi Belanja Daerah (miliar rupiah)	3.804,51	3.839,29
PK-P Triwulan I ADHB (miliar rupiah)	6.383,49	6.402,26
PDRB Triwulan I (miliar rupiah)	112.092,92	121.701,75
Ratio Belanja Daerah terhadap PDRB	**3,39%**	**3,15%**
Kontribusi PK-P pada PDRB ADHB	**5,69%**	**5,26%**

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, BPS (diolah)

Pada Triwulan I-2025, realisasi belanja daerah di Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp3.839,29 miliar atau tumbuh 0,91% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian, rasio belanja daerah terhadap PDRB mengalami penurunan dari 3,39% pada Triwulan I-2024 menjadi 3,15% pada periode yang sama tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung lebih didorong oleh sektor non-pemerintah, khususnya konsumsi rumah tangga.

Kontribusi PK-P terhadap PDRB ADHB juga menurun dari 5,69% menjadi 5,26% pada Triwulan I-2025. Penurunan ini tidak lepas dari perlambatan belanja barang dan jasa, baik di tingkat APBD maupun APBN (sumber: BPS Provinsi Lampung). Kondisi ini sejalan dengan terkontraksinya belanja barang dan jasa, yang dalam realisasi APBD regional Lampung yang juga tercatat turun 0,86% secara tahunan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun belanja pemerintah tetap tumbuh secara nominal, porsi nilainya terhadap perekonomian relatif melemah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas belanja, terutama pada belanja produktif yang memiliki dampak langsung terhadap

peningkatan kapasitas ekonomi daerah, seperti infrastruktur dasar, layanan publik, dan program-program yang mendukung pertumbuhan inklusif.

2.2.2.4 Prognosis/*Outlook* Belanja Daerah

Berdasarkan tren linier ketercapaian belanja selama sembilan tahun terakhir serta realisasi hingga Triwulan I-2025, Belanja Daerah Provinsi Lampung tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp28.701,52 miliar atau setara 88,24% dari pagu. Proyeksi ini menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun terjadi penurunan pagu sebesar 4,55% sebagai dampak dari kebijakan efisiensi belanja. Realisasi pada Triwulan I yang tumbuh sebesar 0,91% (*yoy*) mencerminkan konsistensi pelaksanaan anggaran di tengah terbatasnya ruang fiskal.

Struktur belanja masih akan didominasi oleh Belanja Pegawai, sementara itu, Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa mencatatkan tingkat serapan awal yang relatif rendah, yang menjadi indikasi umum adanya siklus penyerapan belanja yang tertumpuk di semester II. Kondisi ini membuka peluang sekaligus tantangan untuk mengakselerasi pelaksanaan program prioritas secara tepat waktu dan berkualitas, terutama pada belanja yang bersifat produktif dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.

Grafik 2.41. Proyeksi Ketercapaian Belanja s.d. Akhir Tahun 2025

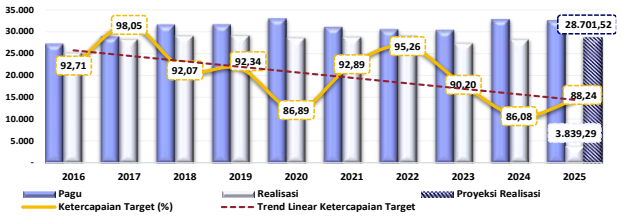

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, DJPK (diolah)

2.2.2.5 Rekomendasi Kebijakan Belanja

Realisasi Belanja Daerah regional Lampung hingga akhir Triwulan-I 2025 menunjukkan kinerja positif, meski alokasi pagu belanja pada tahun ini lebih rendah dibandingkan pada APBD 2024. Beberapa rekomendasi kebijakan dari sisi Belanja Daerah berdasarkan analisis pada bab ini antara lain:

1) *Reorientasi Belanja Menuju Kegiatan yang Produktif dan Berdampak Ekonomi Tinggi*
   Struktur belanja yang masih didominasi oleh Belanja Pegawai perlu diimbangi dengan peningkatan porsi belanja produktif, seperti Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa yang mendorong penciptaan nilai tambah ekonomi. Pemda disarankan memperkuat sinkronisasi perencanaan dan penganggaran agar alokasi anggaran lebih selaras dengan prioritas pembangunan, terutama pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah seperti infrastruktur dasar, konektivitas, maupun pengembangan kawasan industri berbasis komoditas unggulan.
2) *Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Eksekusi Belanja Modal*
   Rendahnya serapan awal Belanja Modal perlu direspons dengan penguatan sistem perencanaan dan pengadaan dini (*early procurement*). Pemda dapat menerapkan sistem kriteria kesiapan proyek dalam tahap perencanaan untuk memastikan kegiatan prioritas sudah siap dilaksanakan sejak awal tahun anggaran. Hal ini akan mendukung percepatan realisasi fisik dan keuangan serta meminimalkan penumpukan belanja pada akhir tahun.
3) *Reformasi Pengelolaan Belanja Pegawai secara Bertahap dan Terukur*
   Sejalan dengan amanat UU HKPD untuk menurunkan porsi Belanja Pegawai hingga maksimal 30% pada 2027, diperlukan strategi transisi yang cermat. Pemda dapat melakukan review formasi dan beban kerja secara berkala, mendorong digitalisasi proses birokrasi, serta memrioritaskan peningkatan produktivitas ASN melalui pelatihan berbasis kebutuhan pelayanan publik. Efisiensi ini dapat menghasilkan ruang fiskal baru bagi program-program prioritas pembangunan.

2.2.3 Perkembangan Surplus/Defisit APBD

Kinerja fiskal Pemerintah Daerah Provinsi Lampung pada Triwulan I-2025 menunjukkan peningkatan surplus yang sangat signifikan, mencapai Rp1.572,71 miliar atau hampir 18 kali lipat

dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Perkembangan keseimbangan umum APBD dapat dianalisis melalui tiga indikator rasio berikut:

a. Rasio Surplus APBD terhadap Total Pendapatan Daerah.

   Rasio surplus terhadap pendapatan meningkat tajam dari 2,27% pada Triwulan I-2024 menjadi 29,06% pada Triwulan I-2025. Peningkatan ini mencerminkan penguatan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai belanja publik. Kenaikan rasio tersebut sejalan dengan lonjakan nominal surplus, yang didorong oleh pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 39,02% (*yoy*), terutama berasal dari peningkatan signifikan pada PAD dan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.

b. Rasio Surplus APBD terhadap Belanja.

   Dari sisi belanja, rasio surplus terhadap total pengeluaran daerah juga meningkat signifikan, dari 2,33% menjadi 40,96%. Hal ini mengindikasikan pelaksanaan anggaran yang lebih hati-hati pada awal tahun, di mana realisasi pendapatan jauh melampaui belanja. Kondisi tersebut mengisyaratkan adanya ruang untuk percepatan belanja pada semester II, guna mendorong efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

c. Rasio Surplus terhadap PDRB

   Rasio surplus terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat dari 0,08% menjadi 1,29%, yang menggambarkan posisi fiskal yang semakin kuat dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kapasitas ekonomi daerah. Meskipun secara nominal relatif kecil terhadap total PDRB, tren peningkatan ini mencerminkan peran fiskal daerah yang semakin signifikan dalam menopang pertumbuhan ekonomi regional.

Secara keseluruhan, perbaikan rasio fiskal ini mencerminkan penguatan kondisi kas daerah di awal tahun serta menunjukkan ruang fiskal yang lebih luas untuk mendorong belanja produktif di paruh kedua tahun anggaran. Namun, akselerasi belanja tetap diperlukan agar surplus yang tinggi di awal tahun tidak berimplikasi pada rendahnya kinerja pembangunan daerah.

Tabel 2.15. Perkembangan Rasio Surplus/Defisit APBD Regional Lampung Triwulan I Tahun 2024 dan 2025

Periode	Surplus / Defisit (miliar rupiah)	Surplus terhadap Pendapatan	Surplus terhadap Belanja	Surplus terhadap PDRB
Triwulan I-2024	88,47	2,27%	2,33%	0,08%
Triwulan I-2025	1.572,71	29,06%	40,96%	1,29%

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, BPS (diolah)

Sementara itu, keseimbangan primer APBD di regional Lampung juga menunjukkan angka positif sebesar Rp1.579,20 miliar setelah mengeluarkan komponen bunga. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal yang diambil pemerintah daerah bersifat kontraktif yang mana belanja daerah lebih rendah dibandingkan dengan pendapatannya.

Tabel 2.16. Perkembangan Keseimbangan Umum dan Primer Regional Lampung Triwulan I Tahun 2024 dan 2025

Periode	Pendapatan APBD	Belanja APBD	Belanja Bunga	Keseimbangan Umum	Keseimbangan Primer
Triwulan I-2024	3.892,98	3.804,51	10,11	88,47	98,58
Triwulan I-2025	5.412,00	3.839,29	6,49	1.572,71	1.579,20

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

2.2.4 Pembiayaan Daerah

Pada Triwulan I-2025, pembiayaan netto mengalami penurunan tajam sebesar 92,67% (*yoy*), disebabkan oleh turunnya penerimaan pembiayaan menjadi Rp61,76 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan meningkat signifikan hingga Rp49,52 miliar. Struktur penerimaan pembiayaan menunjukkan diversifikasi yang lebih luas, tidak hanya bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya, tetapi juga dari pinjaman dalam negeri dan penerimaan kembali piutang daerah.

Grafik 2.42.Perbandingan Realisasi Pembiayaan Daerah Lampung Triwulan I-2024 dan 2025 (miliar rupiah)

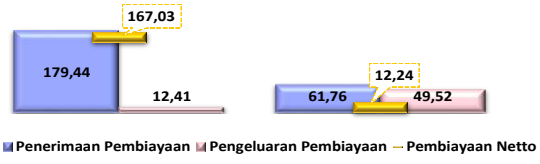

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Peningkatan pengeluaran pembiayaan terutama dialokasikan untuk pembayaran pokok pinjaman dalam negeri sebesar Rp37,19 miliar dan penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp12,33 miliar. Pembiayaan diarahkan secara strategis untuk menutup defisit, memperkuat fiskal, dan mendukung peran BUMD dalam pembangunan daerah.

SUPLEMEN 5

Analisis Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG)

Hingga 31 Maret 2025, jumlah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung mencapai 97.687 orang, sementara jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebanyak 34 unit.

Analisis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan *Framework Moore's Strategic Triangle*

Dasar Hukum
- SK Deputi Bidang Penyaluran BGN No 2 Tahun 2024 tentang Juknis Operasional MBG
- SK BKN Nomor 13 Tahun 2024
- ST BGN Nomor SGAS.01/03.02/01/2025
- Serta peraturan lainnya

- Tujuan program MBG mendukung upaya peningkatan gizi anak dan kelompok rentan serta mendukung ekonomi melalui peningkatan *economic demand* di daerah.
- Sasaran program lebih luas dibanding program Percepatan Penurunan Stunting (PPS), sehingga perlu memastikan akurasi sasaran.
- Legitimasi diperkuat oleh dasar hukum, dengan masih diperlukannya peningkatan koordinasi lintas sektoral di daerah untuk efisiensi pelaksanaan program.

Legitimacy and Support

Analytical Framework: Moore's Public Value Strategic Triangle (1995)

Operational Capacity

- Belum seluruh wilayah memiliki akses terhadap bahan pangan bergizi dan penyedia yang memenuhi standar.
- Tantangan dalam pengelolaan operasional mencakup kapasitas SDM, serta kapasitas untuk memenuhi 3.000-4.000 porsi per hari per SPPG.
- Kapasitas belum dapat sepenuhnya menjangkau kelompok paling rentan dan daerah terjauh
- Terdapat risiko *cash flow* pelaksanaan program apabila SPPG belum memanfaatkan Virtual Account.

Public Value

- MBG memiliki potensi menciptakan nilai publik melalui perbaikan gizi dan penguatan program sosial.
- Dapat dipertimbangkan harmonisasi dengan program lain (PKH, BPNT, sanitasi, dll.) untuk meningkatkan potensi efektivitas jangka panjang.
- Isu keterbatasan kapasitas fiskal dapat memengaruhi keberlanjutan program dan dampak jangka panjang.
- Dampak jangka panjang perlu dipastikan melalui monitoring dan evaluasi kebijakan.

Referensi: Sampling SPPG Lampung (diolah)

2.3 PROGRES IMPLEMENTASI PROGRAM PENYALURAN MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

2.3.1 Pendahuluan

Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul merupakan prioritas utama dalam memperkuat daya saing bangsa dan mewujudkan visi Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan. Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menempatkan pengembangan SDM sebagai salah satu fokus utama, dengan keyakinan bahwa kualitas manusia yang baik adalah kunci keberhasilan pembangunan nasional. Untuk mendukung agenda ini, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah diluncurkan. Inisiatif ini tidak hanya menargetkan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan perputaran ekonomi lokal dan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Program MBG memiliki tujuan ganda, pertama, memastikan nutrisi yang cukup bagi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, seperti ibu hamil dan balita. Kedua, memperkuat ekonomi daerah dengan melibatkan petani, peternak, dan nelayan sebagai pemasok utama bahan pangan. Dengan pendekatan tersebut, program ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas gizi masyarakat tetapi juga menciptakan efek berganda dalam penguatan ekonomi daerah melalui peningkatan pendapatan pelaku usaha kecil dan penguatan rantai pasok pangan lokal.

Sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 untuk membentuk generasi emas, program MBG bertujuan untuk memastikan generasi muda Indonesia memiliki gizi yang cukup untuk tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan produktif. Berdasarkan proyeksi demografi, Indonesia akan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045, sehingga investasi dalam gizi sejak dini akan menjadi fondasi penting untuk menciptakan SDM unggul yang siap bersaing di tingkat global.

Data dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun angka stunting telah menurun, prevalensinya masih berada di angka 21,5%. Pemerintah menargetkan penurunan angka ini menjadi 14% pada tahun 2024 (Kemenkes, 2024). Selain stunting, masalah gizi buruk juga menjadi perhatian serius, dengan sekitar 3,8% anak balita di Indonesia mengalami gizi buruk (Kemenkes, 2024). Situasi ini berpotensi menghambat perkembangan kognitif, fisik, dan produktivitas generasi muda di masa depan, sehingga membutuhkan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan.

Bab ini akan membahas perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di regional Lampung, termasuk narasi implementasi di lapangan, indikasi awal dampak program terhadap berbagai indikator ekonomi dan sosial, serta isu-isu yang muncul selama pelaksanaan pada periode Triwulan I 2025. Analisis ini didasarkan pada data operasional dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta rilis resmi indikator ekonomi terkait, dengan tujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai efektivitas program secara proyektif.

2.3.1.1 *Overview* Proses Pelaksanaan MBG

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Regional Lampung didasarkan pada sejumlah regulasi yang memberikan kerangka hukum yang jelas untuk program ini. Dasar hukum utama mencakup Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN), yang menetapkan BGN sebagai badan koordinator dalam pemenuhan gizi nasional. Selain itu, operasionalisasi program ini diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan (SK) Deputi Bidang Penyaluran BGN Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan MBG, serta SK BKN Nomor 13 Tahun 2024 yang mengatur aspek manajemen sumber daya manusia. Untuk memperkuat pengawasan di lapangan, BGN juga menerbitkan Surat Tugas (ST) Nomor SGAS.01/03.02/01/2025, yang memberikan panduan teknis kepada unit operasional di tingkat daerah. Selanjutnya, petunjuk teknis terus diperluas untuk mencakup aspek standar kebersihan, keamanan pangan, pengelolaan bahan baku, dan perbaikan tata kelola lainnya.

Dari sisi pelaksanaan, BGN bertanggung jawab sebagai koordinator utama yang mengelola berbagai pihak terkait untuk memastikan kelancaran program. Fungsi BGN mencakup koordinasi dengan berbagai aktor, perumusan kebijakan teknis untuk memastikan standar kualitas pangan dan efisiensi distribusi, serta penetapan kebijakan teknis terkait pengelolaan rantai pasok dan standar kualitas makanan.

Untuk mendukung implementasi di lapangan, BGN meluncurkan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yang bertugas mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana teknis. SPPG bertanggung jawab memastikan komposisi nilai gizi pada makanan yang disalurkan sesuai standar.

Struktur organisasi SPPG terdiri dari beberapa fungsi utama, termasuk koordinator lapangan, ahli gizi, dan akuntan. Dalam pelaksanaan tugasnya, SPPG juga mengoordinasikan distribusi, bekerja sama dengan mitra seperti mitra UMKM, TNI, kepolisian, dan *supplier* untuk memastikan kualitas serta ketepatan waktu penyaluran. Koordinator lapangan berperan dalam mengelola operasional sehari-hari, sementara ahli gizi memastikan komposisi nutrisi sesuai standar, dan akuntan bertanggung jawab atas pencatatan keuangan serta pelaporan penggunaan anggaran. Program MBG dimulai sebagai proyek percontohan pada Agustus 2024, dan secara nasional pada Januari 2025, setelah serangkaian persiapan, termasuk perekrutan SPPI Batch 1 pada September 2024 dan Batch 2 pada November 2024.

Dari segi penerima manfaat, program MBG menargetkan peserta didik dari tingkat SD hingga SMA atau setara, serta kelompok rentan yang membutuhkan tambahan asupan gizi. Kriteria penerima manfaat termasuk sekolah yang terdaftar dalam DAPODIK Kemendikdasmen atau EMIS Kemenag, dengan lokasi maksimal 6 km atau waktu tempuh sekitar 30 menit dari SPPG, untuk memastikan efisiensi distribusi.

Dari sisi anggaran, setiap porsi makanan dialokasikan antara Rp8.000 – Rp10.000, dengan kandungan kalori yang bervariasi tergantung kelompok usia, yaitu 300-400 kkal untuk tingkat TK hingga kelas 3 SD, dan 700-800 kkal untuk kelas 4 SD hingga SMA, serta perbedaan untuk kaum rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

2.3.2 Progres Pelaksanaan MBG di Regional Lampung

2.3.2.1 Progres Implementasi

Sampai dengan 31 Maret 2025, implementasi program Makanan Bergizi (MBG) di Provinsi Lampung telah menjangkau 13 Kabupaten/Kota yang ada, dengan dukungan dari 34 SPPG yang tersebar di 34 kelurahan, serta memberikan manfaat kepada total 97.687 penerima.

Grafik 2.43. Jumlah SPPG Berdasarkan Kab/Kota (Per 31 Maret 2025)

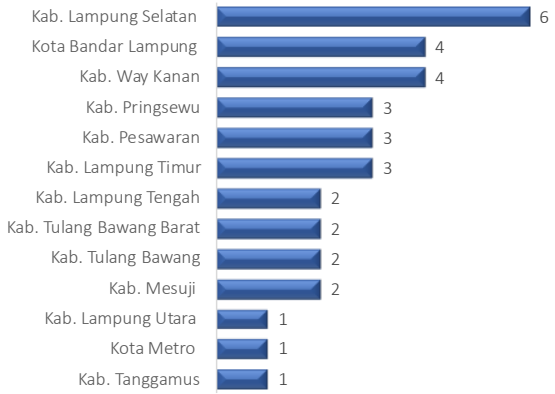

Sumber: Badan Gizi Nasional (BGN), 2025

Sampai dengan saat ini, telah terdapat 13 Kabupaten/Kota yang sudah memiliki SPPG pada beberapa kelurahannya. Hingga 31 Maret 2025, total SPPG di regional Lampung mencapai 34 SPPG. Dengan satu SPPG mencakup 3 pegawai yaitu SPPI, ahli gizi, dan akuntan, artinya total pegawai BGN melalui SPPG yang telah bertugas di Lampung adalah sebanyak 102 orang.

Kabupaten Lampung Selatan memiliki jumlah SPPG tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, yaitu sebanyak 6 unit. Sedangkan, tiga wilayah memiliki jumlah SPPG paling sedikit yaitu 1 unit berada pada Kabupaten Lampung Utara, Kota Metro, dan Kabupaten Tanggamus.

Ke depan, wilayah dengan jumlah SPPG yang lebih sedikit (terutama yang hanya memiliki 1 atau 2 unit) mungkin memerlukan perhatian lebih dalam hal pengembangan dan perluasan program MBG. Pertumbuhan jumlah SPPG akan semakin banyak karena sesuai dengan ketentuan radius Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dimana berkisar maksimal 6 kilometer atau waktu tempuh maksimal 30 menit dari SPPG ke penerima manfaat. Namun, tergantung pada jumlah siswa yang akan dilayani dan kapasitas dapur SPPG, dalam beberapa kasus, radius dapat diperkecil jika jumlah siswa di dalam radius tersebut melebihi kapasitas.

Hingga triwulan I 2025, telah terdapat total penerima manfaat MBG di regional Lampung sebanyak 97.687 orang. Kabupaten Lampung

Selatan mencatatkan jumlah penerima Makanan Bergizi (MBG) tertinggi secara signifikan dibandingkan dengan wilayah lainnya, dengan angka mencapai 15.429 penerima. Posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Kabupaten Lampung Timur (10.466 penerima) dan Kabupaten Pringsewu (10.373 penerima), yang memiliki jumlah penerima yang relatif berdekatan.

Grafik 2.44. Jumlah Penerima MBG Berdasarkan Kabupaten/Kota (Per 31 Maret 2025)

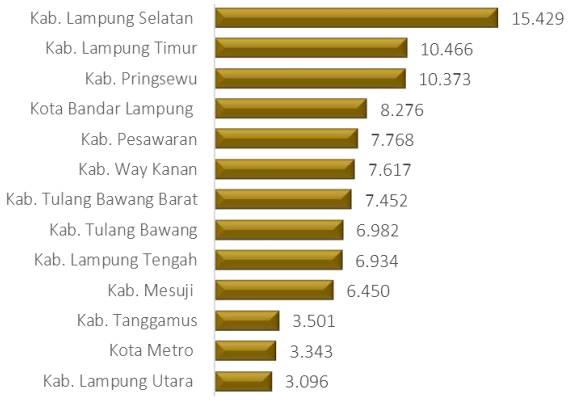

Sumber: Badan Gizi Nasional (BGN), 2025

Di sisi lain, beberapa wilayah memiliki jumlah penerima MBG yang masih cukup rendah. Jumlah penerima MBG paling sedikit tercatat di Kabupaten Tanggamus (3.501 penerima), Kota Metro (3.343 penerima), dan Kabupaten Lampung Utara (3.096 penerima).

Grafik 2.45. Porsi Jumlah Penerima MBG berdasarkan Kategori Penerima (Per 31 Maret 2025)

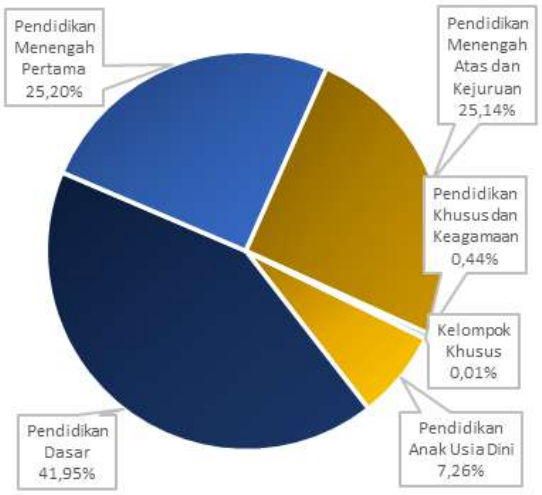

Sumber: Badan Gizi Nasional, 2025

Ke depan, kesesuaian jumlah penerima MBG antar wilayah dengan analisis kebutuhan riil penerima manfaat menjadi salah satu indikator yang krusial dalam mengevaluasi efektivitas dan jangkauan program MBG di berbagai kabupaten/kota di regional Lampung.

Hingga 31 Maret 2025, Pendidikan Dasar mendominasi jumlah penerima MBG di Lampung dengan porsi terbesar, yaitu 41,95%. Ini menunjukkan bahwa mayoritas penerima program MBG berasal dari jenjang pendidikan dasar. Pendidikan Menengah Pertama (25,20%) dan Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan (25,14%) memiliki porsi yang hampir sama besar dan menempati urutan kedua dan ketiga sebagai kategori penerima MBG.

Pendidikan Anak Usia Dini memiliki porsi yang lebih kecil, yaitu 7,26%. Pendidikan Khusus dan Keagamaan serta Kelompok Khusus memiliki porsi penerima MBG yang sangat kecil, masing-masing 0,44% dan 0,01%.

Data mengindikasikan bahwa program MBG di Lampung masih memiliki fokus utama pada anak usia sekolah, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa selama masa sekolah.

Tabel 2.17. Jumlah Penerima Manfaat MBG Berdasarkan Detail Jenis Penerima (Per 31 Maret 2025)

Kategori	Jumlah (orang)
A. Balita dan Pendidikan Usia Dini	**7.089**
Balita	9
PAUD	1.137
RA (Raudhatul Athfal)	380
TK (Taman Kanak-kanak)	5.563
B. Pendidikan Dasar	**40.981**
SD 1-3	18.011
SD 4-6	20.017
MI 1-3 (Madrasah Ibtidaiyah)	1.648
MI 4-6	1.305
C. Pendidikan Menengah Pertama	**24.619**
SMP	21.845
MTs (Madrasah Tsanawiyah)	2.774
D. Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan	**24.558**
SMA	13.068
SMK	10.658
MA (Madrasah Aliyah)	641

Kategori	Jumlah (orang)
MAK (Madrasah Aliyah Kejuruan)	191
E. Pendidikan Khusus dan Keagamaan	**434**
SLB (Sekolah Luar Biasa)	52
PONPES (Pondok Pesantren)	382
F. Kelompok Khusus	**6**
BUMIL (Ibu Hamil)	6
Total Keseluruhan	97.687

Sumber: Badan Gizi Nasional (BGN), 2025

Kategori Pendidikan Dasar mendominasi jumlah penerima dengan 40.981 orang, atau sekitar 42% dari total penerima. Sebagian besar penerima pada jenjang ini berada di Sekolah Dasar (SD), terutama pada kelas 1-3 (18.011 orang) dan kelas 4-6 (20.017 orang). Madrasah Ibtidaiyah (MI) juga berkontribusi dengan total 2.953 siswa.

Kategori Pendidikan Menengah Pertama mencakup 24.619 penerima, dengan mayoritas siswa berasal dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 21.845 orang, diikuti oleh siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 2.774 orang.

Jumlah penerima pada Kategori Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan juga cukup signifikan, yaitu 24.558 orang. Distribusinya meliputi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 13.068 orang, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 10.658 orang, Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 641 orang, dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) sebanyak 191 orang.

Kategori Balita dan Pendidikan Usia Dini mencatat 7.089 penerima. Sebagian besar penerima pada kategori ini adalah siswa Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 5.563 orang, diikuti oleh siswa PAUD lainnya (1.137 orang), Raudhatul Athfal (RA) sebanyak 380 orang, dan sejumlah kecil Balita (9 orang).

Jumlah penerima pada Kategori Pendidikan Khusus dan Keagamaan relatif kecil, yaitu 434 orang, dengan mayoritas berasal dari Pondok Pesantren (PONPES) sebanyak 382 orang dan siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) sebanyak 52 orang. Sedangkan, kategori Kelompok Khusus memiliki jumlah penerima paling sedikit, hanya 6 orang, yang semuanya merupakan Ibu Hamil (BUMIL).

2.3.3 Analisis Indikasi Awal Dampak Program MBG Terhadap Outcome Jangka Pendek

2.3.3.1 Tinjauan Literatur Dampak Program Makan Bergizi

Studi terkini menyoroti dampak signifikan program makanan bergizi gratis di sekolah terhadap kesehatan dan perkembangan anak. Inisiatif pemberian makanan di sekolah terbukti dapat meningkatkan status gizi, termasuk peningkatan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan penurunan prevalensi anemia di kalangan siswa sekolah dasar (Desiani & Syafiq, 2025). Program-program ini juga secara konseptual memiliki efek spillover positif pada sektor pertanian, yang berpotensi meningkatkan permintaan produk lokal dan memperkuat pasar petani (Dwijayanti, 2024).

Penerapan pola makan bergizi di pusat-pusat pendidikan anak usia dini telah menunjukkan manfaat bagi kecerdasan anak, meskipun ada tantangan dalam pelaksanaannya (Susnita & Iftitah, 2024). Lebih jauh lagi, menyediakan makanan kaya nutrisi yang tinggi protein, vitamin, dan mineral memainkan peran penting dalam mencegah stunting pada anak-anak (Amalika, et al., 2023). Temuan-temuan ini menggarisbawahi pentingnya program makanan bergizi gratis dalam meningkatkan kesehatan anak-anak, perkembangan kognitif, dan kesejahteraan secara keseluruhan, sementara juga berpotensi menguntungkan sektor-sektor terkait seperti pertanian.

Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, bagian ini akan mencoba mengukur perkiraan dampak awal atas realisasi MBG terhadap beberapa indikator terkait di regional Lampung.

2.3.3.2 Asumsi dan Prinsip Kehati-hatian Dalam Interpretasi Analisis Dampak Awal

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dampak awal dari realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap beberapa indikator ekonomi utama di regional Lampung. Data dan perspektif yang digunakan mencakup triwulan I 2025 (periode Januari s.d. Maret 2025), di mana variabel

independen adalah nilai rupiah realisasi MBG setiap bulan, dan variabel dependen adalah berbagai indikator ekonomi. Seluruh data telah ditransformasikan ke dalam bentuk Logaritma Natural (ln), sehingga koefisien regresi dapat diinterpretasikan sebagai elastisitas. Dengan demikian, perubahan 1% pada variabel independen (realisasi MBG) akan berasosiasi dengan perubahan sebesar koefisien (dalam %) pada variabel dependen.

Penting untuk ditekankan bahwa ***analisis ini bersifat preliminer dan mengidentifikasi asosiasi statistik, bukan hubungan kausalitas definitif***. Periode observasi yang singkat (tiga bulan, yang berdasarkan derajat bebas F-statistik (df=1,4) tampaknya merepresentasikan 6 titik data dalam periode tersebut) membatasi generalisasi temuan. Asumsi ***ceteris paribus*** berlaku, yang berarti analisis menganggap faktor-faktor lain di luar realisasi MBG yang dapat memengaruhi outcome bersifat konstan selama periode observasi. Lebih lanjut, realisasi MBG diasumsikan sebagai produk dari delta (setiap tambahan/pertumbuhan) jumlah penerima manfaat dikalikan dengan rata-rata pengeluaran anggaran sebesar Rp10.000 per orang.

Asumsi yang digunakan

Bulan	Pertumbuhan Penerima Manfaat	Standar Biaya (asumsi rata-rata observasi)	Jumlah Hari Sekolah	Total Pengeluaran per bulan
Jan	16.359	Rp10.000	19	Rp3,10 M
Feb	45.379	Rp10.000	20	Rp9,07 M
Mar	35.949	Rp10.000	21	Rp7,54 M

Model regresi log-linear

$$\ln(Y) = \beta_0 + \beta_1 \ln(X) + \epsilon,$$

di mana:

Y = variabel dependen (NTP / Inflasi / lainnya)

X = realisasi MBG,

β_0 *= intersep*

β_1 *= koefisien kemiringan (elastisitas)*

ϵ *= error term*

Hasil analisis regresi log-linear sederhana disajikan dengan memperhatikan signifikansi statistik (p-value < 0.05) dan koefisien determinasi (R^2). Seluruh model telah melalui uji normalitas residual dan tidak ada *outlier* yang terdeteksi, dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk.

2.3.3.3 Dampak Awal MBG terhadap Pertanian

2.3.3.3.1 Dampak Awal MBG terhadap NTP Secara Umum

$$\ln(\hat{Y}) = -23.2566 + 1.3162\ln(X)$$

X predicted Y, R2 = .97, F(1,4) = 134.02, p < .001.

β = 1.32, p < .001, α =-23.26, p = .030.

Source	DF	Sum of Square	Mean Square	F Statistic (df_1,df_2)	P-value
Regression (between $\hat{y}_i$ and $\bar{y}$)	1	10525.3471	10525.3471	134.0156 (1,4)	0.0003181
Residual (between y_i and $\hat{y}_i$)	4	314.1529	78.5382		
Total (between y_i and $\bar{y}$)	5	10839.5	2167.9		

Dampak awal menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan realisasi MBG sebesar 1% diasosiasikan terhadap peningkatan NTP sebesar 1,3162%. Hasil analisis awal menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi dampak terhadap Nilai Tukar Petani (NTP). Model regresi menunjukkan bahwa, secara ceteris paribus, 97,1% variabilitas NTP dapat dijelaskan oleh MBG, dengan hubungan langsung yang kuat (koefisien korelasi 0,9854), namun hal ini menunjukkan potensi model *overfitting* dikarenakan data masih sangat terbatas. Model memenuhi asumsi normalitas residual dan tidak terdapat *outlier*.

2.3.3.3.2 Dampak Awal Realisasi MBG terhadap NTP Tanaman Pangan

$$\ln(\hat{Y}) = 36.2228 + 0.767\ln(X)$$

X predicted Y, R2 = .99, F(1,4) = 283.05, p < .001.

β = .77, p < .001, α = 36.22, p = .901.

Source	DF	Sum of Square	Mean Square	F Statistic (df_1,df_2)	P-value
Regression (between $\hat{y}_i$ and $\bar{y}$)	1	63488838.1353	63488838.1353	283.0522 (1,4)	0.00007316
Residual (between y_i and $\hat{y}_i$)	4	897203.198	224300.7995		
Total (between y_i and $\bar{y}$)	5	64386041.3333	12877208.2667		

Indikasi awal menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan realisasi MBG sebesar 1% diasosiasikan terhadap peningkatan NTP Tanaman Pangan sebesar 0,767%. Hasil analisis awal

mengindikasikan adanya potensi dampak positif dan signifikan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan. Model regresi menjelaskan 98,6% variasi NTP Tanaman Pangan, dengan korelasi yang sangat kuat (0,993), namun hal ini juga mengindikasikan kemungkinan *overfitting* mengingat data yang masih terbatas. Meskipun model memenuhi asumsi normalitas residual dan tidak ditemukan *outlier*, hasil ini perlu ditafsirkan secara hati-hati hingga tersedia data yang lebih luas dan robust.

2.3.3.4 Dampak Awal MBG terhadap Peternakan

2.3.3.4.1 Dampak Awal Realisasi MBG terhadap NTP Peternakan

$$Ln(\hat{Y}) = 35.682 + 0.714ln(X)$$

X predicted Y, R2 = .99, F(1,4) = 263.59, p < .001.

β = .71, p < .001, α = 35.68, p = .899.

Source	DF	Sum of Square	Mean Square	F Statistic (df_1,df_2)	P-value
Regression (between $\hat{y}_i$ and $\bar{y}$)	1	55017683.3995	55017683.3995	263.5904 (1,4)	0.00008421
Residual (between y_i and $\hat{y}_i$)	4	834896.6005	208724.1501		
Total (between y_i and $\bar{y}$)	5	55852580	11170516		

Dampak awal menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan realisasi MBG sebesar 1% diasosiasikan terhadap peningkatan NTP Peternakan sebesar 0,714%. Hasil analisis awal mengindikasikan potensi dampak positif dan signifikan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan. Model regresi menjelaskan 98,5% variasi NTP Peternakan, dengan korelasi yang sangat kuat (0,9925), namun tingginya nilai ini juga mengindikasikan kemungkinan overfitting karena keterbatasan jumlah data. Model memenuhi asumsi normalitas residual dan tidak ditemukan outlier, namun hasil ini tetap perlu ditafsirkan secara hati-hati hingga tersedia data yang lebih representatif.

2.3.3.5 Dampak Awal Program MBG terhadap Nilai Tukar Nelayan

2.3.3.5.1 Dampak Awal Realisasi MBG terhadap NTP Perikanan Tangkap

$$Ln(\hat{Y}) = 41.7568 + 0.8564ln(X)$$

X predicted Y, R^2 = .99, $F(1,4)$ = 263.98, p < .001.

β = .86, p < .001, α = 41.76, p = .901.

Source	DF	Sum of Square	Mean Square	F Statistic (df_1,df_2)	P-value
Regression (between $\hat{y}_i$ and $\bar{y}$)	1	79169861.402	79169861.402	263.9831 (1,4)	0.00008397
Residual (between y_i and $\hat{y}_i$)	4	1199619.9314	299904.9828		
Total (between y_i and $\bar{y}$)	5	80369481.3333	16073896.2667		

Hasil awal menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan realisasi MBG sebesar 1% diasosiasikan terhadap peningkatan NTP Perikanan Tangkap sebesar 0,8564%. Hasil analisis awal mengindikasikan potensi dampak positif dan signifikan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) Perikanan Tangkap. Model regresi menjelaskan 98,5% variasi NTP, dengan korelasi yang sangat kuat (0,9925), namun besarnya nilai ini juga membuka kemungkinan overfitting akibat keterbatasan data. Model memenuhi asumsi normalitas residual dan tidak ditemukan outlier, namun interpretasi hasil tetap perlu dilakukan secara hati-hati hingga tersedia data yang lebih memadai.

2.3.3.5.2 Dampak Awal Realisasi MBG terhadap NTP Perikanan Budidaya

$$Ln(\hat{Y}) = 35.6816 + 0.667ln(X)$$

X predicted Y, R^2 = .98, $F(1,4)$ = 240.33, p < .001.

β = .67, p < .001, α = 35.68, p = .897.

Source	DF	Sum of Square	Mean Square	F Statistic (df_1,df_2)	P-value
Regression (between $\hat{y}_i$ and $\bar{y}$)	1	48021404.4212	48021404.4212	240.3272 (1,4)	0.0001011
Residual (between y_i and $\hat{y}_i$)	4	799267.0788	199816.7697		
Total (between y_i and $\bar{y}$)	5	48820671.5	9764134.3		

Indikasi awal menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan realisasi MBG sebesar 1% diasosiasikan terhadap peningkatan NTP Perikanan Budidaya sebesar 0,667%. Hasil analisis awal mengindikasikan potensi dampak positif dan signifikan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) Perikanan Budidaya. Model regresi menjelaskan 98,4% variasi NTP, dengan korelasi yang sangat kuat (0,9918), namun tingginya nilai ini juga mengindikasikan kemungkinan overfitting karena keterbatasan jumlah data. Model telah memenuhi asumsi normalitas residual dan tidak ditemukan outlier,

namun interpretasi hasil tetap perlu dilakukan secara hati-hati hingga tersedia data yang lebih luas dan representatif.

2.3.3.6 Dampak Awal Program MBG terhadap Inflasi/ Kenaikan Harga

2.3.3.6.1 Dampak Awal Realisasi MBG terhadap Inflasi (diukur dengan IHK secara umum)

$$Ln(\hat{Y}) = 48.2964 + 0.7943ln(X)$$

X predicted Y, R2 = .98, F(1,4) = 191.72, p < .001.

β = .79, p < .001, α = 48.3, p = .895.

Source	DF	Sum of Square	Mean Square	F Statistic (df_1,df_2)	P-value
Regression (between $\hat{y}_i$ and $\bar{y}$)	1	68094831.149	68094831.149	191.7227 (1,4)	0.0001577
Residual (between y_i and $\hat{y}_i$)	4	1420694.1843	355173.5461		
Total (between y_i and $\bar{y}$)	5	69515525.3333	13903105.0667		

Dampak awal menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan realisasi MBG sebesar 1% diasosiasikan terhadap peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 0,7943%. Hasil analisis awal mengindikasikan potensi dampak positif dan signifikan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap laju inflasi umum. Model regresi menjelaskan 98% variasi inflasi, dengan korelasi yang sangat kuat (0,9897), namun tingginya nilai ini juga menunjukkan kemungkinan overfitting akibat keterbatasan data. Model telah memenuhi asumsi normalitas residual dan tidak ditemukan outlier, tetapi hasil ini perlu ditafsirkan secara hati-hati hingga tersedia data yang lebih komprehensif.

2.3.3.6.2 Dampak Awal Realisasi MBG terhadap Inflasi (diukur dengan IHK makanan, minuman, tembakau)

$$Ln(\hat{Y}) = 53.5222 + 0.8774ln(X)$$

X predicted Y, R2 = .98, F(1,4) = 188.38, p < .001.

β = .88, p < .001, α = 53.52, p = .896.

Source	DF	Sum of Square	Mean Square	F Statistic (df_1,df_2)	P-value
Regression (between $\hat{y}_i$ and $\bar{y}$)	1	83096608.1339	83096608.1339	188.3763 (1,4)	0.0001633
Residual (between y_i and $\hat{y}_i$)	4	1764480.6994	441120.1748		
Total (between y_i and $\bar{y}$)	5	84861088.8333	16972217.7667		

Dampak awal menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan realisasi MBG sebesar 1% diasosiasikan dengan peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,8774%. Hasil analisis awal mengindikasikan dampak positif dan signifikan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap inflasi pada kelompok tersebut. Model regresi menjelaskan 97,9% variasi inflasi, dengan korelasi yang sangat kuat (0,9895), namun tingginya nilai ini juga mengindikasikan potensi overfitting akibat keterbatasan data. Model memenuhi asumsi normalitas residual dan tidak ditemukan outlier, sehingga hasil ini perlu ditafsirkan secara hati-hati sampai data yang lebih lengkap seiring berjalannya waktu.

2.3.3.7 Overview Keseluruhan Dampak MBG Terhadap Permintaan dan Penawaran Agregat

Pemberian program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung, meskipun dalam fase awal implementasi (Januari-Maret 2025) dan dengan keterbatasan data yang menuntut interpretasi hati-hati, mengindikasikan adanya dampak awal makroekonomi yang multi-sektoral.

Dari perspektif permintaan, pertumbuhan realisasi MBG yang secara substantif meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk pangan, cenderung mendorong peningkatan agregat permintaan pasar pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan lokal di Lampung. Hal ini terefleksi dari asosiasi positif dan signifikan antara realisasi MBG dengan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) untuk tanaman pangan, peternakan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya, menunjukkan adanya transmisi stimulus permintaan ke peningkatan pendapatan relatif produsen di sektor primer.

Namun demikian, stimulus permintaan ini, dalam konteks keterbatasan elastisitas penawaran jangka pendek dari sektor-sektor tersebut, juga berpotensi menciptakan tekanan inflasi. Analisis awal mengindikasikan asosiasi positif dan signifikan antara realisasi MBG dengan peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) secara umum dan khususnya pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Ini mengimplikasikan bahwa peningkatan uang beredar (melalui pengeluaran pemerintah untuk

program MBG) yang masuk ke sistem ekonomi Lampung dapat memicu kenaikan harga jika kapasitas produksi domestik tidak segera beradaptasi untuk memenuhi lonjakan permintaan tersebut.

Oleh karena itu, sementara program MBG berpotensi menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan produsen lokal, implikasinya terhadap stabilitas harga perlu dimitigasi dengan strategi peningkatan penawaran dan efisiensi rantai pasok agar tidak memicu inflasi yang berlebihan.

2.3.4 Isu Strategis Pelaksanaan MBG di Lampung

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung merupakan inisiatif strategis untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan kelompok rentan, serta memberikan stimulus positif bagi ekonomi lokal. Namun, dalam implementasinya, program ini masih menghadapi beberapa isu strategis yang memerlukan perhatian dan penanganan cermat demi optimalisasi dampak.

1) Isu Desain Program dan Keselarasan Kebijakan

Cakupan program MBG yang memiliki spektrum penerima manfaat yang lebih luas meliputi siswa dari jenjang SD hingga SMA dan kaum rentan menimbulkan tantangan dalam penentuan sasaran presisi. Perbedaan fokus dengan Program Percepatan Penurunan Stunting (PPS), yang secara spesifik menargetkan 1000 hari pertama kehidupan, berpotensi mengurangi efektivitas MBG dalam hal intervensi stunting secara langsung. Selain itu, tingkat dukungan instansi di daerah terhadap pelaksanaan MBG di berbagai wilayah belum menunjukkan pemerataan, dikarenakan tata kelola tersentralisasi oleh BGN yang secara mungkin dapat memengaruhi kolaborasi kebijakan di daerah.

2) Isu Operasional dan Logistik

Dari sisi operasional, program MBG menghadapi beberapa kendala terkait pemenuhan kebutuhan gizi yang memadai dan diversifikasi pangan yang optimal. Ketersediaan susu sebagai komponen nutrisi esensial masih belum merata di seluruh lokasi implementasi. Tantangan lain mencakup kesulitan menemukan penyedia dapur atau supplier yang memenuhi standar kualitas dan kebersihan yang ketat. Lebih lanjut, isu administrasi seperti keterlambatan pembayaran gaji pegawai dan reimbursement pengeluaran vendor menjadi beban tambahan bagi penyelenggara, berisiko mengganggu kelancaran operasional. Aksesibilitas program juga masih terbatas, dengan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Lampung belum sepenuhnya terjangkau, dan jumlah penerima manfaat dari kelompok rentan yang masih minim.

3) Isu Dampak Sosio-Ekonomi dan Fiskal

MBG berpotensi mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin untuk pangan, sehingga memungkinkan realokasi dana rumah tangga miskin untuk pendidikan dan kesehatan. Optimalisasi manfaat ini bergantung pada integrasi program dengan jaring pengaman sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Untuk mencapai dampak jangka panjang dalam penurunan stunting dan peningkatan kesejahteraan, MBG dapat diintegrasikan dengan upaya komprehensif yang mengatasi akar masalah seperti kemiskinan struktural, akses air bersih, dan sanitasi yang layak. Kendati demikian, program ini juga berpotensi menimbulkan tekanan fiskal pada APBN/APBD, sehingga perlu perhitungan matang dalam keberlanjutan pembiayaannya.

4) Isu Risiko dan Mitigasi

Pelaksanaan program MBG juga dihadapkan pada sejumlah risiko yang memerlukan strategi mitigasi. Risiko mencakup keterbatasan bahan pangan di daerah sehingga potensi penggunaan makanan olahan dengan kandungan ultra-processed food (UPF) menjadi meningkat, meskipun kecukupan gizi secara keseluruhan masih terjaga. Risiko pengadaan bahan pangan juga bisa muncul karena belum semua agregator bahan pangan lokal seperti BUMDes dan koperasi menjadi supplier. Meskipun tidak terdapat masalah serius terkait keamanan pangan dan aksesibilitas ke lokasi, keterlambatan distribusi, *hygiene* makanan dan pengelolaan

limbah pasca makan perlu tetap menjadi perhatian. Penanganan proaktif terhadap risiko-risiko ini menjadi kunci untuk memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan program MBG di masa mendatang.

2.3.5 Simpulan dan Rekomendasi

Simpulan

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung pada Triwulan I 2025 menunjukkan komitmen pemerintah dalam peningkatan kualitas gizi dan stimulasi ekonomi lokal.

Meskipun masih dalam tahap awal dan memerlukan kehati-hatian dalam interpretasi data, indikasi awal menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan realisasi MBG berasosiasi positif dengan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Hal ini mengisyaratkan adanya potensi peningkatan permintaan domestik dan pendapatan bagi produsen primer di Lampung. Namun, dari perspektif makroekonomi, peningkatan pengeluaran ini juga terasosiasi positif dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) secara umum dan kelompok makanan, minuman, tembakau, mengindikasikan potensi tekanan inflasi jika penawaran agregat tidak dapat mengimbangi lonjakan permintaan.

Secara operasional, hingga 31 Maret 2025, program MBG telah menjangkau 13 kabupaten/kota dengan 34 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 97.687 penerima manfaat, didominasi oleh jenjang pendidikan dasar. Namun, terdapat disparitas cakupan antar wilayah dan fokus utama pada siswa sekolah, dengan proporsi kelompok rentan (balita dan ibu hamil) yang masih sangat minim.

Beberapa isu strategis muncul, termasuk tantangan dalam desain program dan keselarasan kebijakan (seperti perbedaan fokus dengan Program Percepatan Stunting), isu operasional dan logistik (ketersediaan susu, standar dapur/supplier, komunikasi, keterlambatan pembayaran, dan keterbatasan jangkauan di wilayah 3T), isu dampak sosio-ekonomi dan fiskal (ketergantungan pada integrasi program lain dan potensi tekanan pada APBN/APBD), serta isu risiko dan mitigasi (sasaran, penggunaan ultra-processed food, belum memaksimalkan pengadaan dari agregator lokal, dan pengelolaan limbah). Isu-isu tersebut memerlukan penanganan proaktif dan berkelanjutan untuk memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan program.

Rekomendasi

Berangkat dari simpulan di atas, beberapa rekomendasi konstruktif dapat diajukan untuk mengoptimalkan implementasi Program MBG di Lampung:

1) *Evaluasi Berkala Desain Program dan Penguatan Keselarasan Kebijakan*
   a) BGN dapat melakukan evaluasi mendalam terhadap kriteria dan prioritas penerima manfaat untuk memastikan cakupan yang lebih proporsional, khususnya peningkatan fokus pada kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil.
   b) BGN, Kemensos, dan Dinas Sosial di daerah dapat meningkatkan koordinasi dan integrasi MBG dengan program kesehatan dan jaring pengaman sosial yang telah ada (misalnya PPS, PKH, BPNT) untuk menciptakan dampak kumulatif yang lebih besar dalam peningkatan gizi dan kesejahteraan.
2) *Perbaikan Operasional dan Penguatan Rantai Pasok Lokal*
   a) SPPG dapat mengimplementasikan standar gizi yang lebih rinci dan berbasis data untuk setiap porsi makanan, termasuk upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan variasi pangan lokal, terutama susu dan sumber protein lainnya.
   b) Pemerintah Desa, Kementerian Koperasi, dan Kementerian UMKM dapat memfasilitasi BUMDes, koperasi, serta UMKM lokal untuk memenuhi standar kualitas, kebersihan, dan sertifikasi yang diperlukan agar dapat menjadi pemasok utama bahan pangan. Hal ni dapat

dilakukan melalui program pelatihan, pendampingan, dan bantuan sertifikasi.

c) BGN agar membangun sistem logistik yang lebih efisien untuk memastikan ketepatan waktu distribusi makanan, terutama di wilayah 3T yang masih minim jangkauan. Ini dapat melibatkan kolaborasi lebih erat dengan TNI/Polri dan jaringan distribusi lokal.

d) Setiap SPPG di Lampung agar dapat segera memanfaatkan fitur Virtual Account untuk mengatasi permasalahan keterlambatan pembayaran gaji dan reimbursement vendor untuk menjaga motivasi dan kelancaran operasional.

3) *Manajemen Dampak Ekonomi dan Fiskal*

a) TPID dan BGN agar terus mengembangkan strategi mitigasi inflasi yang proaktif, seperti pemantauan harga bahan pangan secara berkala, mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian/ peternakan/ perikanan lokal, dan diversifikasi sumber pengadaan untuk menjaga stabilitas harga.

b) Pemerintah Pusat agar melakukan analisis kapasitas fiskal daerah secara cermat dan mempertimbangkan skema pembiayaan yang berkelanjutan dan tidak membebani APBD secara signifikan dalam jangka panjang.

c) BGN dan Kementerian Sosial agar mengembangkan program edukasi keuangan bagi rumah tangga penerima manfaat untuk mengoptimalkan realokasi dana yang dihemat dari pengeluaran pangan akibat dari MBG.

4) *Manajemen Risiko dan Peningkatan Transparansi*

a) SPPG, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial di regional Lampung agar terus berkoordinasi dan meningkatkan akurasi dan validasi data penerima manfaat secara berkala untuk meminimalkan risiko ketidaktepatan sasaran.

b) SPPG agar memperketat pengawasan terhadap kualitas bahan baku dan proses pengolahan makanan untuk memastikan standar higienis dan nutrisi terpenuhi, serta meminimalkan penggunaan ultra-processed food.

c) BGN agar mengembangkan sistem pelaporan yang transparan dan *real-time* mengenai seluruh aspek pelaksanaan program, mulai dari pengadaan, distribusi, hingga dampak, untuk mendukung akuntabilitas dan pengambilan keputusan berbasis data.

SUPLEMEN 6
Pemanfaatan Dana Desa

Success Story Desa Bumi Daya

Desa Bumi Daya terletak di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Berbagai prestasi telah diukir oleh desa ini, antara lain:

- Status Zero Stunting
- Juara 1 Lomba Desa Tingkat Provinsi Lampung 2024
- Juara 3 Lomba Desa dan Kelurahan Regional I Tingkat Nasional 2024
- Inovasi seperti Pelayanan PMI Purna dan *Smart Village*
- Program unggulan Desa Inklusi Keuangan dan Desa Nabung Saham

Pada tahun 2025, alokasi Dana Desa yang diterima desa ini sebesar **Rp1.422.304.000,-** dengan realisasi penyaluran senilai **Rp853.382.400,-** per Maret 2025 atau sebesar 60 persen dari alokasi.

Kebermanfaatan penggunaan dana desa ini tercermin dari pemberdayaan masyarakat desa yang telah dilakukan. Pemerintah Desa telah melakukan normalisasi embung pertanian yang salah satu manfaatnya adalah memastikan ketersediaan air untuk mengairi lahan pertanian. Kegiatan ini sejalan dengan latar belakang pekerjaan sebagian besar warganya (23,2 persen) sebagai petani.

Selain itu pemberdayaan masyarakat desa juga menyasar para purna PMI. Mereka didukung untuk berperan serta mengubah perekonomian desa dengan berbagai bisnis, di antaranya budidaya ikan air tawar, abon lele, budidaya porang, jahe merah, dan lain-lain. Harapan ke depannya melalui berbagai produk yang dikembangkan di Desa Bumi Daya dapat memenuhi target komoditas ekspor.

Pemerintah desa juga terus berusaha meningkatkan pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan melalui peningkatan sarana/prasarana posyandu, PAUD, perpustakaan desa, serta pemberian insentif bagi guru mengaji dan tenaga pendidik PAUD sehingga masyarakat desa dapat memiliki kualitas hidup yang semakin baik.

Budidaya porang 4 Ha oleh PMI purna

Sosialisasi Desa Inklusi Keuangan bersama OJK dan BEI

Penyediaan Sarpras PAUD Desa

Sumber: Laporan ALCo Kanwil DJPb Provinsi Lampung

BAB 3

ANALISIS TEMATIK: PENGEMBANGAN KOPERASI DI DAERAH

> “Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di Desa”
>
> **-Mohammad Hatta-**

BAB 3 ANALISIS PERAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI DI LAMPUNG

3.1 PENDAHULUAN

Koperasi merupakan entitas ekonomi berbasis keanggotaan yang tumbuh dari semangat kebersamaan, gotong royong, dan kemandirian. Di Indonesia, koperasi telah lama menjadi salah satu pilar penggerak ekonomi kerakyatan, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal dan pasar. Peran koperasi tidak hanya mencakup penyediaan layanan ekonomi bagi anggotanya, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal. Oleh karena itu, keberadaan koperasi sangat relevan dalam konteks pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun demikian, di tengah dinamika transformasi ekonomi dan sosial, koperasi di berbagai daerah menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perubahan pola konsumsi, persaingan dari entitas usaha besar dan digital, serta perkembangan teknologi yang cepat menjadi faktor eksternal yang menuntut koperasi untuk lebih adaptif. Di sisi lain, tantangan internal seperti lemahnya tata kelola, minimnya literasi keuangan dan digital, rendahnya partisipasi anggota, serta keterbatasan dalam mengakses pembiayaan dan pasar, turut menghambat kapasitas koperasi untuk berkembang secara optimal. Hal ini menandakan perlunya perhatian khusus terhadap revitalisasi dan modernisasi koperasi, agar tetap relevan dan berdaya saing dalam lanskap ekonomi saat ini.

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah memberikan berbagai bentuk dukungan terhadap pengembangan koperasi. Kebijakan strategis, intervensi anggaran melalui program-program kementerian/lembaga, serta Transfer Ke Daerah (TKD) dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik, merupakan langkah konkret yang menunjukkan komitmen terhadap penguatan koperasi. Namun demikian, efektivitas dukungan tersebut masih menghadapi tantangan implementatif di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi atas capaian program, mengidentifikasi kesenjangan, serta merumuskan strategi baru yang lebih kontekstual, responsif, dan berdampak nyata bagi penguatan koperasi di daerah.

Bab ini disusun sebagai bentuk kontribusi analitis terhadap pengembangan koperasi di daerah. Analisis mencakup perkembangan kinerja koperasi selama periode 2021–2023, bentuk dukungan pemerintah hingga tahun 2024, tantangan utama yang dihadapi koperasi daerah, serta rekomendasi strategi pengembangan koperasi yang komprehensif dan aplikatif. Dengan pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan analisis ini dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi perumusan kebijakan dan implementasi program pemberdayaan koperasi yang lebih efektif di tingkat daerah.

3.2 PERKEMBANGAN KONDISI KOPERASI DI REGIONAL LAMPUNG PERIODE 2021-2023

Secara nasional, pada 2023, tercatat sebanyak 130.119 koperasi aktif di seluruh Indonesia. Koperasi-koperasi tersebut menaungi lebih dari 28,9 juta anggota dan melibatkan 660 ribu tenaga kerja. Secara finansial, koperasi secara total telah mengelola bauran modal antara modal sendiri sebesar Rp104,94 triliun dan modal luar sebesar Rp149,24 triliun, dengan total aset mencapai Rp275,06 triliun. Kegiatan usaha koperasi menghasilkan volume usaha sebesar Rp197,93 triliun dan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp7,99 triliun. Data ini mencerminkan peran penting koperasi dan potensinya dalam menggerakkan perekonomian secara nasional (Kemenkop, 2025).

Sedangkan pada level regional, dari data tahun 2023 tersebut, provinsi Lampung menunjukkan *share* 1,74% dari total jumlah koperasi aktif secara nasional, dengan *share* 1,69% dari total volume usaha koperasi secara nasional (Kemenkop, 2025).

Adapun detail dari kondisi koperasi di Lampung adalah sebagai berikut.

Grafik 3.1. Perkembangan Koperasi Aktif di Lampung 2021-2023

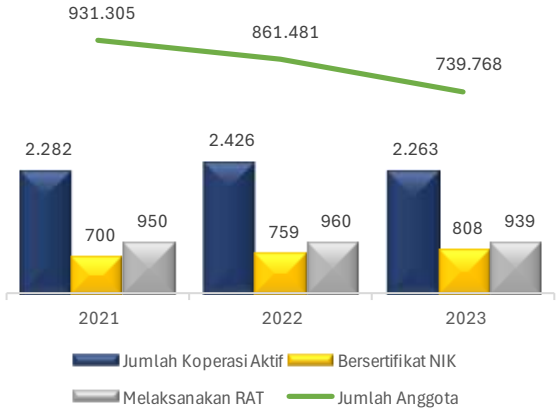

Sumber: https://www.kemenkopukm.go.id/data-koperasi (diolah)

Berdasarkan grafik Perkembangan Koperasi Aktif di Lampung 2021-2023, terlihat bahwa jumlah koperasi aktif di Lampung cenderung fluktuatif. Meskipun sempat meningkat dari 2.282 unit pada tahun 2021 menjadi 2.426 unit pada tahun 2022, jumlahnya kemudian menurun kembali menjadi 2.263 unit pada tahun 2023. Sejalan dengan penurunan jumlah koperasi aktif di tahun 2023, jumlah anggota koperasi juga mengalami tren penurunan, dari 931.305 anggota di tahun 2021 menjadi 739.768 anggota di tahun 2023. Di sisi lain, proporsi koperasi yang telah bersertifikat NIK dan melaksanakan RAT walaupun masih jauh dari jumlah koperasi aktifnya namun menunjukkan perkembangan positif, dengan peningkatan jumlah koperasi bersertifikat NIK dari 700 unit di tahun 2021 menjadi 808 unit di tahun 2023, serta peningkatan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT dari 950 unit di tahun 2021 menjadi 939 unit di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan adanya upaya peningkatan kualitas dan tata kelola koperasi meskipun jumlahnya menurun dan masih perlunya peningkatan tata kelola koperasi dalam aspek legal.

Grafik 3.2. Perkembangan Komposisi Modal Koperasi di Lampung 2021-2023 (dalam Rp Miliar)

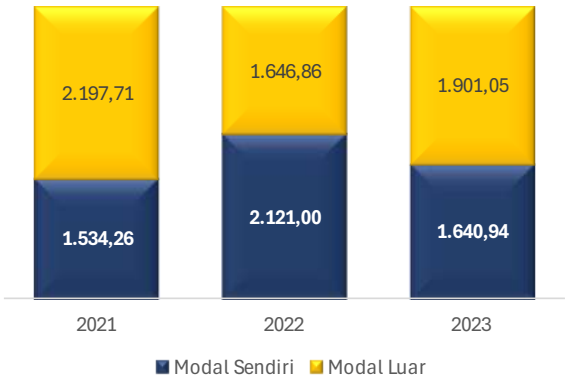

Sumber: https://www.kemenkopukm.go.id/data-koperasi (diolah)

Berdasarkan grafik Perkembangan Komposisi Modal Koperasi di Lampung 2021-2023, terlihat bahwa total modal koperasi di Lampung juga menunjukkan fluktuasi sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2021, total modal mencapai Rp3.731,97 miliar (Rp1.534,26 miliar modal sendiri dan Rp2.197,71 miliar modal luar). Pada tahun 2022, terjadi peningkatan total modal menjadi Rp3.767,86 miliar, dengan kontribusi modal sendiri yang dominan sebesar Rp2.121,00 miliar dan modal luar sebesar Rp1.646,86 miliar, menandakan pergeseran proporsi ke arah kemandirian modal. Namun, pada tahun 2023, total modal menurun menjadi Rp3.542,00 miliar. Penurunan total modal di tahun 2023 ini patut menjadi perhatian, meskipun komposisi modal sendiri masih menunjukkan tingkat resiliensi, namun struktur permodalan dari luar juga penting untuk menunjukkan adanya minat investasi pada usaha koperasi di Lampung.

Grafik 3.3. Perkembangan Aset, Volume Usaha, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi di Lampung 2021-2023 (dalam Rp Miliar)

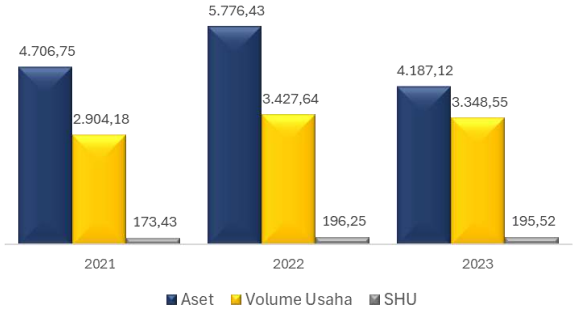

Sumber: https://www.kemenkopukm.go.id/data-koperasi (diolah)

Berdasarkan grafik Perkembangan Aset, Volume Usaha, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi di Lampung 2021-2023, terlihat adanya tren yang bervariasi namun cenderung positif pada kinerja keuangan koperasi di Lampung. Aset koperasi menunjukkan pertumbuhan signifikan dari Rp4.706,75 miliar pada tahun 2021 menjadi puncaknya Rp5.776,43 miliar pada tahun 2022, sebelum sedikit menurun menjadi Rp4.187,12 miliar pada tahun 2023. Senada dengan aset, volume usaha juga mengalami peningkatan dari Rp2.904,18 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp3.427,64 miliar pada tahun 2022, kemudian turun menjadi Rp3.348,55 miliar pada tahun 2023. Meskipun demikian, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari Rp173,43 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp196,25 miliar pada tahun 2022, dan tetap stabil di angka Rp195,52 miliar pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa, meskipun terjadi fluktuasi pada aset dan volume usaha, koperasi di Lampung masih *concern* dalam mempertahankan profitabilitasnya bagi anggota, yang tercermin dari SHU yang relatif stabil dan cenderung meningkat.

3.3 DUKUNGAN PEMERINTAH BAGI KOPERASI DI REGIONAL LAMPUNG

Dukungan pemerintah merupakan faktor krusial dalam mendorong penguatan dan pengembangan koperasi di daerah, termasuk di Regional Lampung. Seiring dengan pentingnya peran koperasi dalam pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan, berbagai kebijakan strategis telah diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi tumbuh kembangnya koperasi. Dukungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan dan regulasi, tetapi juga melalui alokasi belanja kementerian/lembaga, Transfer Ke Daerah (TKD) terutama Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik, serta dukungan dari APBD. Selain itu, pemerintah juga memberikan akses pembiayaan melalui skema khusus bagi koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan akses terhadap sumber daya produktif. Oleh karena itu, bagian ini akan mengulas mengenai bentuk, perkembangan, dan capaian dukungan pemerintah terhadap pengembangan koperasi di Regional Lampung periode 2021-2024.

3.3.1 Kebijakan Pemerintah terkait Pengembangan Koperasi

Komitmen pemerintah dalam memperkuat koperasi sebagai bagian dari penggerak ekonomi nasional tercermin dalam berbagai regulasi, dimulai dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menjadi dasar hukum utama pengembangan koperasi di Indonesia. Penguatan tersebut dilanjutkan melalui UU No. 6 Tahun 2023 yang menetapkan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang, serta PP No. 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi serta UMKM. Selain itu, PP No. 5 Tahun 2021 mendukung penyederhanaan proses perizinan berbasis risiko bagi pelaku usaha termasuk koperasi. Di tingkat teknis, Permenkop dan UKM No. 8 Tahun 2021 memperkenalkan model koperasi multi pihak, Permenkop dan UKM No. 8 Tahun 2023 mengatur usaha simpan pinjam koperasi, dan Permenkop dan UKM No. 2 Tahun 2024 menetapkan kebijakan akuntansi koperasi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola koperasi.

Selanjutnya, dalam rangka merespons dinamika ekonomi dan tantangan global, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan strategis seperti *Grand Design* Perkoperasian Nasional, *Roadmap* Perkoperasian, serta program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menempatkan koperasi sebagai bagian integral dari pengembangan sektor UMKM. Kementerian Koperasi juga terus mendorong reformasi koperasi, yang mencakup revitalisasi kelembagaan, transformasi digital, penguatan akuntabilitas tata kelola, serta peningkatan akses terhadap pembiayaan dan pasar.

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengembangkan berbagai regulasi teknis seperti Peraturan Menteri Koperasi yang mengatur pembentukan koperasi modern,

penyusunan laporan keuangan koperasi berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), serta penguatan fungsi pengawasan koperasi. Strategi pembinaan koperasi juga diarahkan pada sektor-sektor produktif, seperti pertanian, perikanan, dan industri pengolahan, sehingga koperasi dapat menjadi kekuatan ekonomi lokal yang berdaya saing tinggi.

Dengan semakin besarnya tantangan yang dihadapi koperasi di era digital dan kompetisi global, arah kebijakan ke depan terus difokuskan pada pengembangan koperasi berbasis inovasi dan teknologi, peningkatan literasi digital dan keuangan, serta integrasi koperasi dalam rantai pasok industri. Dukungan kebijakan ini diharapkan tidak hanya memperkuat koperasi sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai motor penggerak inklusi ekonomi dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

3.3.2 Dukungan Belanja Kementerian/Lembaga

Grafik 3.4. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Pendukung Koperasi di Lampung 2021-2024 (Rp Miliar)

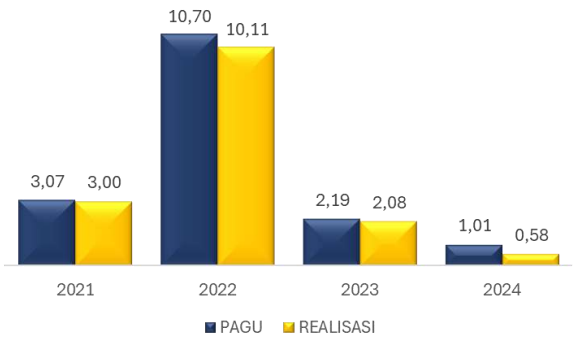

Sumber: SINTESA (diolah)

Perkembangan realisasi belanja Pemerintah Pusat di Lampung khususnya untuk Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi selama periode 2021-2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada 2021, pagu anggaran sebesar sekitar Rp3,07 miliar dengan realisasi mencapai 97,59%. Tahun 2022 terjadi lonjakan pagu anggaran hingga Rp10,7 miliar (pertumbuhan 248,06%) dengan realisasi Rp10,1 miliar (atau 94,48% dari pagu), menandakan peningkatan fokus dan alokasi dana akibat dari kebijakan pemerintah yang mengalokasikan peningkatan anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi UMKM pasca pandemi Covid-19 yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan berbagai insentif membantu UMKM bangkit dari keterpurukan.

Namun demikian, pada 2023-2024 terjadi penurunan drastis pada pagu anggaran masing-masing sebesar 79,55% dan 53,75%. Pada 2024 realisasi yang hanya mencapai 57,78% terhadap pagu. Secara total, sepanjang empat tahun tersebut, realisasi mencapai 92,91% dari pagu total sekitar Rp17 miliar, tetapi tren penurunan alokasi dan realisasi pada dua tahun terakhir menunjukkan tantangan dalam kesinambungan pendanaan program koperasi dan UKM di Lampung.

Tabel 3.1. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Pendukung Koperasi di Lampung 2021-2024 Per Jenis Kegiatan (Rp Miliar)

Kegiatan	2021	2022	2023	2024
Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah	3.073,49	234,17	458,88	1.011,83
Pendampingan dan Peningkatan SDM Usaha Mikro	-	697,76	-	-
Penguatan Rantai Pasok Usaha Mikro	-	-	1.728,74	-
Pengembangan SDM Perkoperasian & Jabatan Fungsional	-	2.293,55	-	-
Pemetaan Data, Analisis dan Pengkajian	-	7.472,12	-	-

Sumber: SINTESA (diolah)

Secara lebih detail, perkembangan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) untuk mendukung koperasi di Lampung (2021-2024) menunjukkan pergeseran fokus yang signifikan antar jenis kegiatan. Pada 2021 dan 2024, jenis kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di daerah menjadi prioritas utama dengan alokasi masing-masing Rp3,07 miliar dan Rp1,01 miliar, meski sempat shifting prioritas jenis kegiatan pada 2022. Sedangkan, tahun 2022 menonjol dengan alokasi besar pada pemetaan data (Rp7,47 miliar) dan pengembangan SDM perkoperasian (Rp2,29 miliar), serta pendampingan SDM usaha mikro (Rp698 juta). Sementara itu, 2023 fokus pada penguatan rantai pasok usaha mikro (Rp1,73 miliar). Pola ini mencerminkan strategi pemerintah yang adaptif dalam mengalokasikan

anggaran, bergeser dari pemberdayaan langsung ke penguatan data, SDM dan rantai pasok, yang juga penting untuk meningkatkan efektivitas program koperasi dan UMKM di Lampung.

3.3.3 Dukungan Belanja Transfer Ke Daerah

Grafik 3.5. Perkembangan TKD (DAK Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas KUMK) di Lampung Periode 2023-2024 (Rp Miliar)

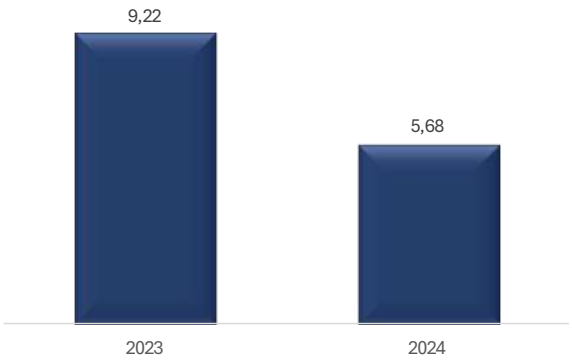

Sumber: OM-SPAN TKD (diolah)

Total DAK Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK di Lampung menunjukkan penurunan signifikan dari tahun 2023 ke 2024, yaitu dari Rp9,21 miliar menjadi Rp 5,67 miliar. Secara keseluruhan, total dana yang disalurkan selama dua tahun tersebut adalah Rp14,89 miliar.

Tabel 3.2. Perkembangan TKD (DAK Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas KUMK) di Lampung Periode 2023-2024 Per Pemda (Rp juta)

Pemerintah Daerah	2023	2024
Provinsi Lampung	3.487,83	4.749,66
Kab. Lampung Barat	417,48	514,56
Kab. Lampung Timur	385,82	415,33
Kab. Tulang Bawang Barat	318,37	-
Kab. Tanggamus	377,51	-
Kota Bandar Lampung	389,36	-
Kab. Lampung Tengah	327,86	-
Kab. Lampung Utara	401,25	-
Kab. Tulang Bawang	420,37	-
Kab. Mesuji	318,37	-
Kab. Way Kanan	470,88	-
Kab. Pesawaran	449,73	-
Kota Metro	410,79	-
Kab. Lampung Selatan	345,57	-
Kab. Pringsewu	307,89	-
Kab. Pesisir Barat	389,91	-
Total Salur	9.219,00	5.679,55

Sumber: OM-SPAN TKD (diolah)

Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh hilangnya alokasi dana untuk sebagian besar kabupaten/kota di tahun 2024, di mana hanya Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Lampung Timur yang masih menerima dana. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pergeseran fokus sektor prioritas dalam desain DAK Non Fisik yang disepakati oleh pemerintah pusat dan daerah. Meskipun demikian, pada tahun 2024, Provinsi Lampung mengalami peningkatan alokasi dana yang cukup substansial dari Rp3,48 miliar pada 2023 menjadi Rp4,74 miliar pada 2024.

3.3.4 Dukungan Belanja APBD

Grafik 3.6. Perkembangan Belanja APBD Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM di Lampung 2023-2024 (Rp Miliar)

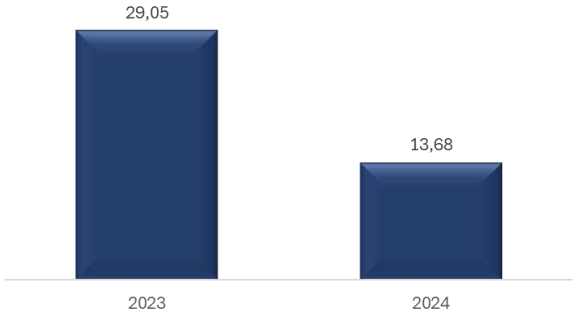

Sumber: GFS, SIKRI (diolah)

Belanja APBD untuk urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan UKM di Lampung mengalami kontraksi cukup tajam sebesar 52,9% dari Rp29,05 miliar pada 2023 menjadi Rp13,68 miliar pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan berkurangnya prioritas APBD terhadap pengembangan koperasi dan pelaku UMKM. Pergeseran prioritas tersebut dapat berdampak pada terbatasnya program pembinaan, akses pembiayaan, serta peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UMKM yang menjadi kewenangan di daerah. Penguatan sektor koperasi dan UMKM perlu dipastikan tetap berkelanjutan, terutama sebagai *buffer* tekanan ekonomi dan kebutuhan pemulihan pasca pandemi.

Grafik 3.7. Perkembangan Belanja APBD Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM di Lampung 2023-2024 Per Pemda (Rp Juta)

Pemerintah Daerah	2023	2024
Provinsi Lampung	9.783,95	7.196,31
Kota Metro	1.561,28	1.142,88
Kab. Way Kanan	1.708,45	895,54
Kab. Lampung Barat	7.584,10	817,62
Kab. Lampung Selatan	1.559,80	721,11
Kab. Lampung Timur	692,71	571,02
Kab. Pesisir Barat	771,32	446,69
Kab. Pringsewu	610,75	413,97
Kab. Lampung Utara	421,02	339,39
Kab. Tulang Bawang	690,47	298,00
Kab. Pesawaran	782,91	259,85
Kota Bandar Lampung	416,58	226,39
Kab. Lampung Tengah	464,54	191,94

Pemerintah Daerah	2023	2024
Kab. Mesuji	1.255,49	81,60
Kab. Tulang Bawang Barat	378,15	70,00
Kab. Tanggamus	371,92	5,56
Total	29.053,44	13.677,84

Sumber: GFS, SIKRI (diolah)

Secara detail berdasarkan pemerintah daerah, penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Lampung Barat, dengan penurunan belanja dari Rp7,58 miliar menjadi hanya Rp817 juta (turun 89,2%), sementara pada tahun 2024, Kabupaten Tanggamus menunjukkan anggaran terkait koperasi yang sangat kecil sebesar Rp5,56 juta. Hanya Provinsi Lampung yang masih memiliki proporsi terbesar (52,6% dari total pagu terkait koperasi antar daerah), meskipun juga mengalami penurunan. Penurunan ini dapat mengindikasikan lemahnya kapasitas fiskal daerah terhadap penguatan koperasi dan UMKM. Dalam konteks pemulihan ekonomi dan penguatan ekonomi inklusif, tren ini perlu menjadi perhatian strategis untuk memastikan bahwa peran koperasi dan UMKM sebagai penopang ekonomi daerah tetap mendapat dukungan yang memadai dan berkelanjutan.

3.3.5 Dukungan Pemerintah Lainnya Melalui Kredit Bersubsidi

Grafik 3.8. Penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) oleh Koperasi yang Mendapatkan Subsidi Pemerintah di Lampung 2021-2024 (Rp miliar)

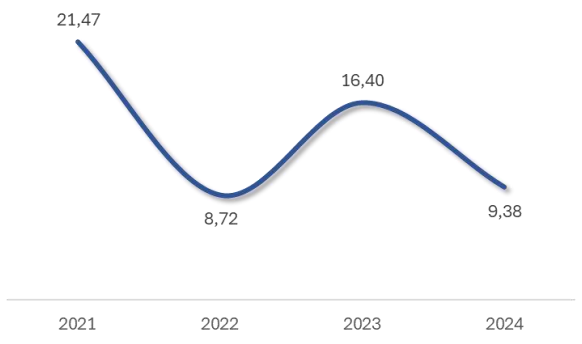

Sumber: SIKP-UMI (diolah)

Penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) oleh koperasi penerima subsidi pemerintah di Lampung selama periode 2021–2024 juga menunjukkan pola yang variatif, dengan tren cenderung menurun. Pada 2021, penyaluran mencapai Rp21,47 miliar, kemudian turun signifikan menjadi Rp8,72 miliar pada 2022. Meskipun sempat meningkat ke Rp16,40 miliar pada 2023, angka ini kembali turun menjadi Rp9,38 miliar pada 2024. Penurunan penyaluran pada 2024 juga dapat menjadi sinyal perlunya penguatan kelembagaan dan dukungan teknis bagi koperasi agar dapat menjalankan fungsi intermediasi keuangan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

3.4 TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DI DAERAH

Pengembangan koperasi di Lampung masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi secara bertahap dan terukur, antara lain (Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, 2025):

1) Tantangan Kelembagaan

Pengembangan koperasi di daerah masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian, khususnya dalam aspek kelembagaan. Sebagian koperasi belum memiliki kelengkapan dokumen legalitas dan peraturan internal seperti AD/ART, SOP, dan dokumen pendukung lainnya. Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) juga belum dilaksanakan secara konsisten, dan beberapa koperasi belum memiliki domisili tetap, yang dapat memengaruhi stabilitas operasional. Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi masih menjadi kebutuhan, terutama dalam hal kompetensi pengelolaan dan pemahaman regulasi. Keterlibatan generasi muda, seperti Gen Z dan milenial, juga masih terbatas, sehingga perlu strategi yang tepat untuk mendorong partisipasi aktif dari kelompok usia tersebut.

2) Tantangan Usaha

Dalam aspek usaha, tantangan utama yang dihadapi adalah belum teridentifikasinya fokus usaha atau *core business* yang jelas pada beberapa koperasi. Kegiatan koperasi di sektor riil masih berkembang secara terbatas, dengan kecenderungan berfokus pada Unit Simpan Pinjam (USP) saja. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan usaha masih belum optimal, yang berpotensi membatasi efisiensi dan jangkauan layanan koperasi. Permodalan juga perlu menjadi perhatian, karena masih terdapat keterbatasan dalam

menghimpun dana yang memadai untuk pengembangan usaha. Di samping itu, perlu penyesuaian agar kegiatan usaha koperasi semakin relevan dengan kebutuhan ekonomi anggotanya.

Persaingan dengan pelaku usaha swasta, khususnya yang memiliki skala lebih besar dan akses terhadap teknologi yang lebih maju, juga menjadi tantangan tersendiri. Layanan keuangan mikro, ritel modern, serta platform digital yang berkembang pesat secara nasional dan di wilayah Lampung menawarkan alternatif yang lebih cepat dan efisien bagi masyarakat. Dalam konteks ini, koperasi dituntut untuk melakukan inovasi dan adaptasi, termasuk dalam pemanfaatan *digital marketing* dan *digital services*. Namun, belum semua koperasi mampu mengoperasikan teknologi secara optimal, baik karena keterbatasan infrastruktur maupun karena literasi digital yang masih rendah di kalangan pengurus dan anggota terutama di pedesaan.

3) Tantangan Keuangan

Dari sisi keuangan, proses pencatatan dan pelaporan keuangan pada sejumlah koperasi masih dilakukan secara manual, yang dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan data keuangan. Praktik analisis keuangan juga belum sepenuhnya diterapkan secara terstruktur, dan penyusunan laporan keuangan masih memerlukan penyesuaian dengan standar yang berlaku, seperti PSAK (SAK ETAP). Audit keuangan, baik internal maupun eksternal, belum menjadi bagian rutin dalam pengelolaan koperasi, begitu pula dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang masih perlu ditingkatkan. Penguatan aspek keuangan ini penting untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan koperasi di masa mendatang.

3.5 STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI DI DAERAH

Dalam implementasi pengembangan koperasi di regional Lampung, beberapa strategi telah dilaksanakan yang mencakup (Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, 2025):

1) Pendirian Koperasi

Strategi pengembangan koperasi dilakukan secara menyeluruh dimulai dari tahap pendirian koperasi. Upaya ini meliputi sosialisasi dan penyuluhan kepada kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi, pendampingan dalam penyusunan Anggaran Dasar, fasilitasi pembuatan akta pendirian, serta penyediaan buku-buku organisasi koperasi. Langkah-langkah ini bertujuan membentuk fondasi kelembagaan koperasi yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2) Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi juga menjadi prioritas utama, antara lain melalui pelatihan dan pendidikan yang didanai dari DAK dan APBD provinsi. Selain itu, dilaksanakan kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk uji kompetensi, serta uji kelayakan dan kepatutan bagi pengurus koperasi simpan pinjam. Pendampingan administrasi dan pemanfaatan dana pendidikan koperasi untuk pelatihan anggota juga merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas pengelola koperasi.

3) Penguatan Tata Kelola Koperasi

Penguatan tata kelola koperasi mencakup aspek kelembagaan, manajemen, dan keuangan. Di bidang kelembagaan, strategi difokuskan pada peningkatan kesadaran hukum, penyusunan AD/ART, penyediaan sarana pendukung, serta pembentukan struktur organisasi yang baik. Dari sisi manajemen, dilakukan penyusunan SOP, pengendalian risiko, dan penerapan prinsip manajemen yang baik. Sementara itu, aspek keuangan difokuskan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan keuangan yang sehat, serta pemanfaatan aplikasi keuangan koperasi.

4) Pengawasan dan Perlindungan Koperasi

Pengawasan dan perlindungan koperasi dilakukan melalui pengawasan rutin dan sewaktu-waktu, baik secara *onsite* maupun *offsite*. Kegiatan ini mencakup pemeriksaan sarana prasarana, klarifikasi dokumen, hingga pelaporan hasil pemeriksaan.

Proses ini juga mencakup pemantauan penerapan sanksi administratif. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, pelaksanaan pengawasan koperasi dapat didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi, sehingga proses pemantauan dapat dilakukan secara lebih akurat dan berkelanjutan.

3.6 POTENSI PENGEMBANGAN KOPERASI DESA / KELURAHAN MERAH PUTIH

3.6.1 Latar Belakang Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih

Salah satu latar belakang utama pembentukan Koperasi Desa Merah Putih adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yang menegaskan bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Selain itu, dengan 56% penduduk Indonesia berada di perkotaan dan 44% di pedesaan (BPS, 2025), fenomena urbanisasi yang menyebabkan kekurangan SDM di desa dan peningkatan jumlah pekerjaan unskilled menjadikan masyarakat desa semakin tertinggal. Persentase kemiskinan di desa pada September 2024 mencapai 11,34% (BPS), menunjukkan disparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Dengan 75.266 desa sebagai garda terdepan pemerintahan, pembentukan koperasi ini juga strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, serta mengungkit sektor pangan yang krusial bagi inflasi dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

3.6.2 Tujuan dan Manfaat Pembentukan

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki beragam tujuan strategis yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan-tujuan ini mencakup penciptaan lapangan kerja, pemberian pelayanan secara sistematis dan cepat, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi. Selain itu, koperasi ini diharapkan mampu memodernisasi sistem perkoperasian, menekan harga di tingkat konsumen, dan meningkatkan harga di tingkat petani hingga harga normal tanaman pangan atau kesejahteraan petani naik. Koperasi juga bertujuan untuk menekan pergerakan tengkulak dan memperpendek rantai pasok, sehingga dapat meningkatkan inklusi keuangan dan berperan sebagai akselerator, konsolidator, serta agregator Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada akhirnya, seluruh upaya ini ditujukan untuk menekan tingkat kemiskinan ekstrem di pedesaan.

3.6.3 Dasar Hukum dan Tata Kelola

Dasar hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diatur oleh Inpres Nomor 9 Tahun 2025 yang menginstruksikan 13 Menteri, 3 Kepala Lembaga, serta Gubernur dan Bupati/Walikota untuk memfasilitasi pembentukan 80.000 koperasi melalui koordinasi komprehensif, pendampingan, penyelarasan program, dan pengawasan. Tata kelolanya diperkuat dengan Kepres Nomor 9 Tahun 2025 yang membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, bertugas mengkoordinasikan kebijakan, memastikan pembentukan koperasi, menyusun petunjuk teknis, mengembangkan potensi, memberikan pendampingan, serta mengkoordinasikan rencana bisnis termasuk infrastruktur pendukung seperti kantor, gudang, dan layanan kesehatan, dengan pendanaan dari APBN dan APBD, dan sumber pendanaan lainnya yang sah.

3.6.4 *Timeline* dan Target

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki target dan lini masa yang jelas. Batas akhir pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus untuk pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah 31 Mei 2025. Selanjutnya, pada tanggal 30 Juni 2025, menjadi batas akhir pendaftaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang memiliki Akta Notaris ke dalam aplikasi layanan pengesahan akta/Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Target utama adalah terbentuknya kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada tanggal 12 Juli

2025. Puncak dari rangkaian ini adalah launching operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara nasional yang akan dilaksanakan pada 28 Oktober 2025.

3.6.5 Model Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Secara nasional, pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mengusung tiga pendekatan utama. Pertama, membangun koperasi baru di desa yang belum memiliki Koperasi Unit Desa (KUD), Kospinra, koperasi produksi, atau koperasi lainnya—terdapat lebih dari 64 ribu desa dalam kategori ini. Kedua, mengembangkan koperasi yang sudah ada, khususnya dari 176 ribu koperasi aktif nasional, termasuk 51 ribu koperasi di desa yang masih memiliki potensi penguatan kelembagaan dan unit usaha. Ketiga, revitalisasi koperasi tidak aktif, dengan fokus pada 4.615 KUD nonaktif dan 62 ribu BUMDes yang dapat menjadi mitra strategis dalam menghidupkan kembali aktivitas ekonomi koperasi di desa.

3.6.6 Progres Persiapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Lampung

Grafik 3.9. Progress Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih di Lampung Hingga 13 Mei 2025

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, 2025

Hingga 13 Mei 2025, dari total target 2.651 desa/kelurahan di Lampung, sebanyak 1.486 desa/kelurahan (56,05%) telah melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Hal ini menunjukkan percepatan dan progres signifikan dalam rangka pembentukan koperasi tersebut di regional Lampung. Sampai dengan 13 Mei 2025, progres pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Lampung bervariasi, dengan Tanggamus dan Lampung Utara hampir mencapai target, sementara beberapa kabupaten seperti Mesuji, Pesawaran, Tulang Bawang Barat, dan Pesisir Barat masih memerlukan upaya signifikan untuk memenuhi target yang ditetapkan.

3.6.7 Potensi Sektor Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Lampung

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Lampung memiliki potensi besar untuk mendukung perekonomian lokal dan memberdayakan masyarakat setempat, terutama mengingat keberadaan lebih dari 2.651 desa dan kelurahan di Provinsi Lampung dengan beragam potensi sumber daya alam dan manusia. Sebagai lembaga ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip gotong royong dan demokrasi ekonomi, koperasi ini dapat memainkan peran vital dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, terutama bagi kelompok rentan seperti petani kopi di Lampung Barat, petani lada di Lampung Utara, nelayan di pesisir Timur, serta pelaku UMKM industri kreatif di Bandar Lampung. Dengan pemanfaatan potensi pertanian seperti singkong, jagung, dan kelapa sawit, atau komoditas perikanan dan perkebunan yang melimpah, koperasi ini berpotensi mengembangkan produk lokal, meningkatkan akses pasar bagi produk unggulan Lampung, serta menyediakan layanan keuangan yang lebih inklusif dan efisien bagi anggotanya di seluruh pelosok desa.

Selain itu, potensi pengembangan koperasi ini juga didorong oleh adanya program pemerintah yang mendukung pemberdayaan ekonomi desa, seperti subsidi bunga pinjaman dan bantuan pelatihan manajerial, yang dapat diakses di Lampung. Dengan adanya pelatihan dan pendampingan yang tepat, koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Lampung

dapat memperkuat kapasitas manajerialnya, sehingga mampu meningkatkan skala usaha, efisiensi operasional, dan daya saing di pasar yang lebih luas, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Terlebih, sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi Lampung, serta industri kreatif dan pariwisata yang terus berkembang di wilayah seperti Pesisir Barat dan Lampung Selatan, membuka peluang besar bagi koperasi untuk berkolaborasi dengan sektor-sektor tersebut, menciptakan sinergi yang saling menguntungkan, dan menghasilkan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat desa.

3.7 Simpulan dan Rekomendasi

Simpulan

Koperasi di Lampung menunjukkan peran dalam lanskap perekonomian regional, meski mengalami fluktuasi dalam jumlah koperasi aktif dan anggota, serta penurunan total modal pada tahun 2023. Meskipun demikian, kinerja aset dan volume usaha menunjukkan pola yang bervariasi cenderung positif, dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang stabil dan cenderung meningkat, mengindikasikan kemampuan koperasi dalam mempertahankan profitabilitas operasionalnya bagi anggota.

Dukungan pemerintah, baik dari tingkat pusat maupun daerah, telah terefleksi melalui berbagai kebijakan dan alokasi anggaran, termasuk peningkatan belanja pada tahun 2022 sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Namun, analisis data menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam alokasi belanja kementerian/lembaga, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada periode 2023–2024. Penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) oleh koperasi juga menunjukkan tren menurun, menandakan potensi tantangan dalam keberlanjutan dukungan finansial.

Secara internal, koperasi di Lampung masih menghadapi tantangan kelembagaan, meliputi kelengkapan legalitas, konsistensi pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta kapabilitas sumber daya manusia dan partisipasi generasi muda. Dalam aspek usaha, koperasi cenderung belum memiliki fokus bisnis yang jelas dan masih didominasi oleh unit simpan pinjam, serta pemanfaatan teknologi digital yang belum optimal menghambat daya saing. Tantangan keuangan meliputi pencatatan manual, minimnya analisis keuangan terstruktur, dan belum rutinnya audit.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengimplementasikan strategi yang mencakup sosialisasi pendirian koperasi, peningkatan kapasitas SDM, penguatan tata kelola, serta pengawasan dan perlindungan koperasi.

Inisiatif strategis seperti program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2025, memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Progres pembentukan koperasi ini di Lampung hingga Mei 2025 menunjukkan percepatan yang signifikan. Hingga 13 Mei 2025, 1.486 dari 2.651 desa/kelurahan di Lampung (56,05%) telah melaksanakan Musyawarah Desa Khusus.

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi terkait strategi pengembangan koperasi di regional Lampung adalah sebagai berikut:

1) *Penguatan Keberlanjutan Dukungan Fiskal*
   Diperlukan perumusan strategi jangka panjang untuk memastikan dukungan finansial yang berkelanjutan bagi koperasi, terutama mengingat tren penurunan alokasi anggaran dari pemerintah pusat dan daerah.
2) *Penguatan Keberlanjutan Dukungan Fiskal*
   a) Kementerian Koperasi serta Dinas Koperasi dan UMKM agar mendorong koperasi untuk memastikan kelengkapan seluruh dokumen legalitas dan kepatuhan terhadap peraturan internal, serta konsistensi dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) guna menciptakan stabilitas dan akuntabilitas operasional.

b) Kementerian Koperasi serta Dinas Koperasi dan UMKM di daerah mengintensifkan program pelatihan dan pendidikan bagi pengurus dan anggota koperasi, dengan fokus pada literasi keuangan dan digital. Penting juga untuk mengembangkan strategi yang efektif guna menarik dan meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pengelolaan dan pengembangan koperasi.

c) Kementerian Koperasi serta Dinas Koperasi dan UMKM agar mendorong koperasi untuk mengidentifikasi dan mengembangkan fokus usaha (*core business*) yang lebih spesifik dan bervariasi di sektor riil, di luar unit simpan pinjam. Koperasi juga perlu didukung dan didampingi dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam operasional, pemasaran, dan penyediaan layanan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

3) *Optimalisasi Implementasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*

a) Kementerian Koperasi serta Dinas Koperasi dan UMKM perlu memitigasi risiko keberlanjutan bisnis dengan cara memastikan bahwa Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) secara aktif melibatkan masyarakat dalam identifikasi potensi lokal dan penentuan fokus bisnis koperasi yang jelas, guna membangun desain bisnis yang benar-benar berkelanjutan ke depan.

b) Kementerian Koperasi serta Dinas Koperasi dan UMKM agar memastikan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara efektif memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang beragam di Lampung, seperti sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif, untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang optimal bagi anggotanya.

c) Kementerian Koperasi serta Dinas Koperasi dan UMKM mendorong kolaborasi yang kuat dan terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, koperasi, sektor swasta, dan masyarakat. Sinergi ini krusial untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan koperasi, terutama dalam memfasilitasi akses terhadap pasar, pembiayaan, dan program peningkatan kapasitas.

d) Kementerian Koperasi, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Pemerintah Desa agar dapat memperpendek rantai pasok dan meningkatkan nilai tambah bagi produk-produk desa, sekaligus memperkuat inklusi keuangan di tingkat akar rumput. Dengan demikian, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi motor penggerak ekonomi kolektif, memberdayakan pelaku usaha kecil dan BUMDes yang ada, sehingga dapat memitigasi risiko saturasi pasar antara Koperasi, BUMDes, dan UMKM di daerah itu sendiri.

e) Kementerian Koperasi, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Pemerintah Desa agar dapat memastikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menekan pergerakan tengkulak dan meningkatkan kesejahteraan petani/ pelaku usaha, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang lebih kuat dan berkelanjutan.

BAB 4
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

> Jangan pernah menyerah dan putus asa untuk selalu mencintai negeri kita ini
>
> **-Sri Mulyani-**

BAB 4 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 KESIMPULAN

4.1.1 *Outlook* Makroekonomi Regional Lampung

1) Secara *year-on-year*, kinerja ekonomi Lampung triwulan I 2025 tumbuh solid sebesar 5,47%(*yoy*), mencatatkan pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Capaian ini juga lebih tinggi dari nasional (4,87%) dan Sumatera (4,84%). Kinerja positif ini menjadikan Lampung sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tahunan tertinggi di Pulau Sumatera. Pertumbuhan ini didorong pertumbuhan jasa lainnya 9,66% seiring dengan pembukaan destinasi wisata baru, seperti *Kyokko Beach*, kemudian disusul Industri Pengolahan (8,79%) serta Transportasi dan Pergudangan (8,20%). Dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 12,96% seiring dengan peningkatan volume dan nilai ekspor komoditas utama seperti CPO dan Kopi serta rempah-rempah, diikuti pengeluaran LNPRT yang tumbuh 5,06%.
2) Secara *quarter-to-quarter*, ekonomi Lampung triwulan I 2025 terkontraksi 1,11%, membaik dibanding kontraksi 1,24% pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, Sumatera terkontraksi 1,34% lebih dalam dibandingkan Lampung, namun nasional yang mencatat kontraksi 0,98%. Kontraksi terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,65% akibat penurunan penyaluran gas kota. Dari sisi pengeluaran, kontraksi terbesar tercatat pada Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) seiring penurunan realisasi belanja barang dan jasa, baik pada APBN maupun APBD.
3) Pada Triwulan I 2025, PDRB Lampung tercatat sebesar Rp121,70 triliun (ADHB) dan Rp69,56 triliun (ADHK), meningkat signifikan dari Rp58,15 triliun pada periode yang sama tahun 2021. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil yang ditopang oleh peningkatan volume output, bukan sekadar faktor harga, sehingga mencerminkan pertumbuhan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Berdasarkan lapangan usaha, struktur PDRB masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi 24,37%. Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi komponen terbesar dengan porsi 64,79% terhadap total PDRB ADHB.
4) Inflasi di Provinsi Lampung menunjukkan tren menurun. Pada Maret 2024, inflasi tahunan tercatat sebesar 1,58% (*yoy*), lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 1,03%. Rata-rata inflasi bulanan triwulan I 2025 tercatat 0,20% (*mtm*). Inflasi di Lampung, sebagaimana di wilayah lain di Indonesia, bersifat musiman dan cenderung meningkat pada periode tertentu seperti Ramadan, Idulfitri, Natal, Tahun Baru, dan awal tahun ajaran baru khususnya pada kelompok makanan dan pendidikan. Setelah Idulfitri, inflasi bulanan biasanya melandai seiring normalisasi konsumsi masyarakat. Secara keseluruhan, tekanan inflasi triwulan I 2025 terutama berasal dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, khususnya bawang merah, akibat pasokan terbatas dari sentra produksi di Jawa Tengah (Brebes) karena hasil panen yang rendah, keterbatasan biaya petani, dan cuaca buruk.
5) Selama Januari 2022 hingga Maret 2025, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS mengalami tren depresiasi, dari Rp14.335,24 menjadi Rp16.456,16. Pelemahan ini mendorong daya saing ekspor, namun juga menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha, terutama terkait pembiayaan impor dan fluktuasi biaya produksi. Meski Rupiah cenderung melemah pada triwulan I 2025, tekanan terhadap nilai impor dalam Rupiah tidak menghambat permintaan, terutama untuk barang konsumsi dan bahan baku. Hal ini mencerminkan kuatnya permintaan domestik dan aktivitas industri,

yang tercermin dari impor Lampung pada triwulan I 2025 yang tetap tumbuh 39,53% (*qtq*).

6) Ketegangan perdagangan global meningkat sejak diberlakukannya kebijakan *Tarif Trump* 2.0 oleh Amerika Serikat pada Februari 2025, yang memicu serangkaian retaliasi tarif dari Tiongkok, Kanada, dan negara mitra dagang lainnya. Kondisi ini mencerminkan kerentanan sistem perdagangan global terhadap kebijakan unilateral, terutama terhadap negara-negara dengan surplus perdagangan terhadap AS, termasuk Indonesia. Di Provinsi Lampung, sebagai daerah yang bergantung pada ekspor komoditas seperti CPO, fluktuasi harga menjadi tantangan utama yang berpotensi menekan pendapatan daerah dan menurunkan daya saing produk unggulan di pasar global.
7) Pada Februari 2025, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Lampung mencapai 71,16%, lebih tinggi dibandingkan nasional (70,6%) dan rata-rata Sumatera (68,57%), mencerminkan tingginya keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi. Tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan SD ke bawah dan terserap terutama di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan mayoritas bekerja di sektor informal. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 4,07% dari 4,12% pada Februari 2024, menunjukkan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan penguatan ketahanan ekonomi daerah seiring meningkatnya aktivitas ekonomi.
8) Pada Triwulan I 2025, NTP Lampung mencapai 133,28 atau naik 10,53% (*yoy*), lebih tinggi dari nasional (123,62) namun masih di bawah rata-rata Sumatera (149,11). Pemerintah Provinsi terus mendorong kesejahteraan petani melalui subsidi, KUR, KPB, asuransi tani, dan stabilisasi harga komoditas, termasuk penetapan harga dasar singkong sebesar Rp1.350/kg. Di sektor perikanan, berbagai program budidaya dan penguatan kelembagaan dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan, termasuk pengembangan benih bening lobster (BBL) yang melibatkan 2.079 nelayan.
9) Pada triwulan I 2025, Nilai Tukar Nelayan (NTN) atau NTP subsektor perikanan tangkap di Lampung rata-rata tercatat sebesar 113,56, berada diatas rata-rata NTN nasional (103,38) dan regional Sumatera (107,30). Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui kebijakan strategis yang mendukung produktivitas dan keberlanjutan sektor perikanan. Langkah konkret meliputi pembangunan empat SPBN di berbagai lokasi. Selain itu, program Asuransi Nelayan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan melindungi nelayan dari risiko kerja, sementara akses pembiayaan melalui KUR memperkuat kapasitas usaha. Kombinasi infrastruktur, perlindungan sosial, dan permodalan ini membangun ekosistem perikanan yang tangguh dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kelautan.

4.1.2 Kinerja Fiskal Regional Lampung

4.1.2.1 Kinerja APBN

1) Kinerja APBN Regional Lampung triwulan I-2025 mengukirkan kinerja awal tahun yang positif dan mencerminkan peran strategis kebijakan fiskal yang tetap responsif dan adaptif, dengan pendapatan yang tumbuh di tengah volatilitas harga komoditas serta belanja negara yang terealisasi secara efisien dan optimal untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung program prioritas pemerintah yang memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.
2) Realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp2.705,16 miliar, tercapai 24,32% dari target dan berhasil tumbuh signifikan 44,68% (*yoy*). Hal ini didorong pertumbuhan kinerja Penerimaan Perpajakan (55,67%, *yoy*) yang mengalami pertumbuhan pada Pajak Perdagangan Internasional (435,56%, *yoy*) khususnya komponen Bea Keluar. Hal ini dikarenakan peningkatan ekspor akibat dari

permintaan dan perubahan harga global. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mencatatkan pertumbuhan 8,22% (*yoy*) didorong pertumbuhan PNBP Lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

3) Realisasi Belanja Negara sebesar Rp7.907,44 miliar, tercapai 24,88% dari pagu, tumbuh 3,34% (*yoy*). Hal ini didorong penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) yang mencatatkan pertumbuhan double digit 20,48% (*yoy*) dan percepatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Insentif Fiskal serta Dana Desa. Sementara itu, Belanja Pemerintah Pusat terkontraksi 34,17% (*yoy*) seiring kebijakan efisiensi anggaran. Belanja Barang dan Belanja Modal terkontraksi masing-masing 66,94% dan 80,76% (*yoy*).
4) Defisit anggaran regional Lampung hingga 31 Maret 2025 tercatat sebesar Rp5.202,28 miliar, menyempit sebesar 10,03% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan defisit ini mencerminkan kinerja positif penerimaan Bea Keluar serta pengelolaan belanja yang lebih efisien. Defisit menggambarkan peran APBN sebagai peredam gejolak (shock absorber) atas dampak ketidakpastian perekonomian global untuk menjaga daya beli masyarakat Lampung.
5) Hingga 31 Maret 2025, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Lampung mencapai Rp2.504,98 miliar kepada 47.466 debitur, tumbuh 8,26% (*yoy*). Sementara itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp52,39 miliar kepada 9.253 debitur. Hal ini mencerminkan bahwa peran kredit bersubsidi dari pemerintah terus memperluas akses keuangan inklusif serta mendorong pertumbuhan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi di regional Lampung.
6) Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Lampung hingga 31 Maret 2025 mencapai Rp2.504,98 miliar, tumbuh 8,26% (*yoy*), dan disalurkan kepada 47.466 debitur. Pertumbuhan ini didorong oleh dominasi pelaku usaha di sektor pertanian dan perdagangan, dan dukungan aktif perbankan dalam pembiayaan UMKM, serta pertumbuhan ekonomi yang positif. Selain itu, terdapat pembiayaan UMi turut memperluas akses keuangan bagi pelaku usaha khususnya pelaku UMKM yang masih berskala ultra mikro (*non-bankable*), dengan penyaluran sebesar Rp52,39 miliar kepada 9.253 debitur.

4.1.2.2 Kinerja APBD

1) Pendapatan Daerah Regional Lampung mencapai Rp5.412,00 miliar atau 16,66% dari target, mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 39,02% (*yoy*). Kinerja positif ini didorong oleh peningkatan sebagian besar komponen pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (tumbuh 86,14% *yoy*), Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat (32,37% *yoy*), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (naik signifikan). Sementara, Transfer Antar Daerah terkontraksi 27,11%.
2) Realisasi PAD mencapai Rp1.047,54 miliar atau 13,56% dari target, tumbuh signifikan sebesar 86,14% (*yoy*), dengan pertumbuhan tertinggi pada Retribusi Daerah (184,16% *yoy*), diikuti Pajak Daerah (66,77% *yoy*), dan Lain-Lain PAD yang Sah (115,52% *yoy*). Meskipun demikian, rasio pajak daerah pada Triwulan I-2025 masih rendah di angka 0,67%, mencerminkan bahwa potensi fiskal dari PDRD, khususnya sektor-sektor seperti pertanian sebagai penopang utama PDRB Lampung, belum sepenuhnya dimanfaatkan.
3) Pendapatan Daerah Regional Lampung hingga Triwulan I-2025 masih sangat bergantung pada dana transfer pusat yang menyumbang 79,05% dari total pendapatan. Meskipun terjadi peningkatan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) dari 0,14 menjadi 0,19, nilainya masih berada dalam kategori “Belum Mandiri", sehingga diperlukan diversifikasi sumber pendapatan, khususnya melalui optimalisasi PAD dan pemanfaatan potensi fiskal dari sektor produktif seperti industri pengolahan.

4) Realisasi Belanja Daerah mencapai Rp3.839,29 miliar atau 11,80% dari pagu, tumbuh 0,91% (*yoy*), dengan struktur yang masih didominasi oleh Belanja Operasi sebesar Rp3.283,40 miliar (85,52% dari total belanja). Belanja Pegawai mendominasi Belanja Operasi dengan kontribusi 71,83%, mengalami kenaikan signifikan 21,28% (*yoy*), yang perlu dikelola secara bertahap untuk menyesuaikan dengan ketentuan proporsi belanja pegawai sebagaimana UUHKPD.
5) Belanja Modal sebesar Rp208,92 miliar hanya mencapai 5,70% dari pagu dan terkoreksi 37,48% (*yoy*), menunjukkan perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan produktif di semester II. Belanja Barang dan Jasa juga mencatat kontraksi 0,86% (*yoy*). Di sisi lain, realisasi Belanja Transfer turun signifikan 37,06% (*yoy*), terutama karena penurunan Transfer Bagi Hasil.
6) Belanja tertinggi berdasarkan fungsi adalah pada Pelayanan Umum sebesar Rp10.630,92 miliar atau 32,83%, sementara belanja terendah adalah pada Pariwisata sebesar Rp8,69 miliar atau 8,55% dari pagu.
7) Meskipun belanja daerah tumbuh secara nominal sebesar 0,91% (*yoy*), kontribusinya terhadap PDRB menurun, dengan rasio belanja terhadap PDRB turun dari 3,39% menjadi 3,15% dan kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) menurun dari 5,69% menjadi 5,26%. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh perlambatan realisasi belanja barang dan jasa, baik dari APBD maupun APBN, yang turut melemahkan daya ungkit fiskal terhadap perekonomian. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih banyak digerakkan oleh sektor rumah tangga, sehingga efektivitas belanja publik, khususnya belanja produktif yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, perlu terus ditingkatkan.
8) APBD Lampung mencatat surplus keseimbangan umum sebesar Rp1.572,71 miliar dan keseimbangan primer sebesar Rp1.579,20 miliar, menunjukkan kebijakan fiskal yang kontraktif. Namun, pembiayaan netto justru menurun tajam 92,67% (*yoy*), disebabkan oleh penurunan penerimaan pembiayaan menjadi Rp61,76 miliar dan meningkatnya pengeluaran pembiayaan menjadi Rp49,52 miliar, utamanya untuk pembayaran pokok pinjaman dan penyertaan modal BUMD. Hal ini mencerminkan arah pembiayaan yang lebih strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mendukung pembangunan daerah.

4.1.3 Progres Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung selama Triwulan I 2025 mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong perbaikan kualitas gizi serta menggerakkan perekonomian daerah.
2) Walaupun masih berada pada tahap awal dan memerlukan kehati-hatian dalam membaca data, indikasi awal menunjukkan adanya hubungan positif antara peningkatan realisasi MBG dengan kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) di subsektor pertanian, peternakan, dan perikanan, termasuk dinamika harga komoditas. Temuan ini menunjukkan potensi peningkatan permintaan domestik dan pendapatan bagi produsen primer di Lampung. Namun demikian, dari sisi makroekonomi, peningkatan belanja akibat program ini juga berkorelasi dengan naiknya Indeks Harga Konsumen (IHK), khususnya pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yang menandakan adanya potensi tekanan inflasi jika suplai tidak mampu memenuhi lonjakan permintaan.
3) Dari sisi pelaksanaan, hingga 31 Maret 2025, program ini telah mencakup 13 kabupaten/kota, melalui 34 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan total 97.687 penerima manfaat yang mayoritas berasal dari jenjang pendidikan dasar. Meski demikian, terdapat ketimpangan cakupan antarwilayah, serta keterbatasan jangkauan kepada kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil yang masih tergolong rendah.

4) Untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan program, diperlukan upaya mitigasi yang proaktif dan berkelanjutan terhadap berbagai permasalahan yang muncul. Tantangan strategis mencakup aspek perencanaan dan harmonisasi kebijakan (misalnya perbedaan fokus dengan Program Percepatan Penurunan Stunting), persoalan operasional dan logistik (terkait ketersediaan susu, standar dapur atau pemasok, komunikasi, keterlambatan pembayaran, serta akses ke wilayah 3T), dampak sosial-ekonomi dan fiskal (seperti ketergantungan terhadap program lain serta potensi tekanan pada APBN dan APBD), serta risiko-risiko lainnya (misalnya sasaran program, penggunaan makanan ultra-proses, keterbatasan pengadaan dari agregator lokal, dan pengelolaan limbah makanan).

4.1.4 Analisis atas Strategi dan Peran Koperasi

1) Peran koperasi dalam struktur ekonomi regional Lampung tercermin dari keberadaan sekitar 2.476 koperasi pada tahun 2023, berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. Meski mengalami penurunan jumlah koperasi aktif, anggota, dan nilai modal, indikator kinerja lainnya seperti total aset dan volume usaha menunjukkan kecenderungan meningkat. Selain itu, Sisa Hasil Usaha (SHU) tetap stabil dan bahkan mengalami peningkatan, menandakan kemampuan koperasi dalam menjaga profitabilitas operasionalnya bagi para anggotanya.
2) Dukungan fiskal dari pemerintah pusat dan daerah mengalami penurunan menjelang 2025. Walaupun terjadi lonjakan belanja pada 2022 dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), alokasi anggaran dari kementerian/lembaga, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik, dan APBD mengalami penurunan cukup tajam selama periode 2023–2024.
3) Dari sisi internal, koperasi secara nasional maupun di Lampung masih dihadapkan pada beberapa tantangan mendasar. Tantangan kelembagaan meliputi legalitas yang belum lengkap, pelaksanaan RAT yang tidak konsisten, serta keterbatasan kapasitas SDM dan rendahnya keterlibatan generasi muda. Dalam aspek usaha, banyak koperasi belum memiliki arah bisnis yang terfokus dan masih didominasi unit simpan pinjam, ditambah dengan keterbatasan dalam adopsi teknologi digital yang melemahkan daya saing. Tantangan keuangan yang dihadapi antara lain pencatatan manual, kurangnya analisis keuangan yang sistematis, dan belum konsistennya proses audit.
4) Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah menerapkan sejumlah strategi untuk memperkuat koperasi di wilayahnya. Upaya ini mencakup sosialisasi prosedur pendirian koperasi, pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM bagi pengelola dan anggota, penguatan sistem tata kelola guna menjamin akuntabilitas dan transparansi, serta pengembangan sistem pengawasan dan perlindungan hukum terhadap koperasi.
5) Program strategis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebagaimana diamanatkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, dirancang sebagai upaya transformasi kelembagaan ekonomi di tingkat desa yang berorientasi pada penguatan kemandirian dan daya saing masyarakat perdesaan. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa, tetapi juga secara konkret diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, mendorong hilirisasi produk lokal, serta menekan angka kemiskinan secara struktural melalui optimalisasi potensi lokal dan partisipasi komunitas.

4.2 REKOMENDASI

4.2.1 Rekomendasi terkait Makroekonomi dan Fiskal

1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) agar bekerja sama dengan Ditjen Perdagangan Luar

Negeri, dalam pembukaan pasar alternatif ekspor melalui perjanjian dagang bilateral, promosi produk unggulan daerah, dan diplomasi ekonomi untuk mewaspadai risiko penurunan Bea Keluar dan Bea Masuk di Lampung akibat dampak tarif resiprokal AS serta proyeksi penurunan Harga Batu Bara, Crude Palm Oil (CPO), dan Kopi.

2) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dapat melakukan analisis *stress test* terhadap penerimaan bea masuk dan bea keluar yang terkait dengan kebijakan pembatasan impor beras dan gula. Pengujian ini dapat mencakup berbagai skenario, termasuk penurunan harga beras global, perubahan volume impor, dan dampak kebijakan perdagangan lainnya, guna memastikan kesiapan fiskal dan kebijakan mitigasi yang efektif secara regional.
3) Pemerintah daerah dapat meningkatkan Pajak Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan langsung untuk belanja daerah, salah satunya melalui upaya peningkatan investasi swasta di sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), seperti hilirisasi industri asbes, batu tulis, dolomit, pasir, kerikil, marmer, dan tanah liat.
4) Kementerian Kesehatan agar memberikan pendampingan atas kendala teknis keterbatasan vendor pengadaan pembangunan Labkesda pada Kabupaten Pringsewu, untuk mengejar keterlambatan realisasi DAK Fisik tahap I Sub Bidang Kesehatan.
5) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang mencakup Kanwil DJPb Provinsi Lampung, OJK Lampung, Pemerintah Daerah, dan Perbankan agar terus mendorong realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berbasis Klaster dan Kredit Usaha Alat Mesin Pertanian (Alsintan) untuk mendorong produktivitas pertanian dan perkebunan di regional Lampung. Realisasi pembiayaan KUR dan Alsintan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi, menekan biaya tanam, serta mendorong transformasi pertanian dari tradisional ke mekanis dan berbasis pasar.
6) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pangan strategis melalui strategi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif).
7) Tim Percepatan Pengelolaan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bersama BI, DJPK, Kanwil DJPb Lampung, dan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung agar dapat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi perpajakan dan retribusi daerah melalui perluasan kanal digital, pemutakhiran basis data perpajakan, serta integrasi sistem pembayaran daerah.
8) Forum Investasi Lampung (FOILA) agar diperkuat perannya sebagai wadah strategis dalam mengintegrasikan promosi investasi, fasilitasi proyek prioritas, dan penyelesaian hambatan investasi di daerah. Forum ini dapat melibatkan secara aktif pelaku usaha, asosiasi industri, BUMD, serta lembaga *Special Mission Vehicles* (SMV) pembiayaan pembangunan di Kemenkeu seperti PT. SMI, PT. PII, PT. SMF, PT. LPEI, PT. GDE, untuk menciptakan ekosistem investasi yang kreatif serta mampu memanfaatkan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership*.
9) Untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang lebih sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perlu dilakukan peningkatan harmonisasi antara KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) dengan KEM-PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal). Harmonisasi ini penting untuk memastikan bahwa arah belanja pembangunan daerah sejalan dengan sasaran pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian prioritas RKP dan APBN secara komplementer.

4.2.2 Terkait Progres Program Makan Bergizi Gratis

10) BGN dapat melakukan evaluasi mendalam terhadap kriteria dan prioritas penerima manfaat untuk memastikan cakupan yang lebih proporsional, khususnya peningkatan fokus pada kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil.
11) BGN, Kemensos, dan Dinas Sosial di daerah dapat meningkatkan koordinasi dan integrasi MBG dengan program kesehatan dan jaring pengaman sosial yang telah ada (misalnya PPS, PKH, BPNT) untuk menciptakan dampak kumulatif yang lebih besar dalam peningkatan gizi dan kesejahteraan.
12) SPPG dapat mengimplementasikan standar gizi yang lebih rinci dan berbasis data untuk setiap porsi makanan, termasuk upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan variasi pangan lokal, terutama susu dan sumber protein lainnya.
13) Pemerintah Desa, Kementerian Koperasi, dan Kementerian UMKM dapat memfasilitasi BUMDes, koperasi, serta UMKM lokal untuk memenuhi standar kualitas, kebersihan, dan sertifikasi yang diperlukan agar dapat menjadi pemasok utama bahan pangan. Hal ni dapat dilakukan melalui program pelatihan, pendampingan, dan bantuan sertifikasi.
14) BGN agar membangun sistem logistik yang lebih efisien untuk memastikan ketepatan waktu distribusi makanan, terutama di wilayah 3T yang masih minim jangkauan. Ini dapat melibatkan kolaborasi lebih erat dengan TNI/Polri dan jaringan distribusi lokal.
15) Setiap SPPG di Lampung agar dapat segera memanfaatkan fitur Virtual Account untuk mengatasi permasalahan keterlambatan pembayaran gaji dan reimbursement vendor untuk menjaga motivasi dan kelancaran operasional.
16) TPID dan BGN agar terus mengembangkan strategi mitigasi inflasi yang proaktif, seperti pemantauan harga bahan pangan secara berkala, mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian/ peternakan/ perikanan lokal, dan diversifikasi sumber pengadaan untuk menjaga stabilitas harga.
17) Pemerintah Pusat agar melakukan analisis kapasitas fiskal daerah secara cermat dan mempertimbangkan skema pembiayaan yang berkelanjutan dan tidak membebani APBD secara signifikan dalam jangka panjang.
18) BGN dan Kementerian Sosial agar mengembangkan program edukasi keuangan bagi rumah tangga penerima manfaat untuk mengoptimalkan realokasi dana yang dihemat dari pengeluaran pangan akibat dari MBG.
19) SPPG, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial di regional Lampung agar terus berkoordinasi dan meningkatkan akurasi dan validasi data penerima manfaat secara berkala untuk meminimalkan risiko ketidaktepatan sasaran.
20) SPPG agar memperketat pengawasan terhadap kualitas bahan baku dan proses pengolahan makanan untuk memastikan standar higienis dan nutrisi terpenuhi, serta meminimalkan penggunaan ultra-processed food.
21) BGN agar mengembangkan sistem pelaporan yang transparan dan real-time mengenai seluruh aspek pelaksanaan program, mulai dari pengadaan, distribusi, hingga dampak, untuk mendukung akuntabilitas dan pengambilan keputusan berbasis data.

4.2.3 Terkait Strategi dan Pengembangan Koperasi

22) Diperlukan perumusan strategi jangka panjang untuk memastikan dukungan finansial yang berkelanjutan bagi koperasi, terutama mengingat tren penurunan alokasi anggaran dari pemerintah pusat dan daerah.
23) Kementerian Koperasi serta Dinas Koperasi dan UMKM agar mendorong koperasi untuk memastikan kelengkapan seluruh dokumen legalitas dan kepatuhan terhadap peraturan internal, serta konsistensi dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) guna menciptakan stabilitas dan akuntabilitas operasional.

24) Kementerian Koperasi serta Dinas Koperasi dan UMKM di daerah mengintensifkan program pelatihan dan pendidikan bagi pengurus dan anggota koperasi, dengan fokus pada literasi keuangan dan digital. Penting juga untuk mengembangkan strategi yang efektif guna menarik dan meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pengelolaan dan pengembangan koperasi.
25) Kementerian Koperasi serta Dinas Koperasi dan UMKM agar mendorong koperasi untuk mengidentifikasi dan mengembangkan fokus usaha (core business) yang lebih spesifik dan bervariasi di sektor riil, di luar unit simpan pinjam. Koperasi juga perlu didukung dan didampingi dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam operasional, pemasaran, dan penyediaan layanan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.
26) Kementerian Koperasi serta Dinas Koperasi dan UMKM perlu memitigasi risiko keberlanjutan bisnis dengan cara memastikan bahwa Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) secara aktif melibatkan masyarakat dalam identifikasi potensi lokal dan penentuan fokus bisnis koperasi yang jelas, guna membangun desain bisnis yang benar-benar berkelanjutan ke depan.
27) Kementerian Koperasi serta Dinas Koperasi dan UMKM agar memastikan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara efektif memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang beragam di Lampung, seperti sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif, untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang optimal bagi anggotanya.
28) Kementerian Koperasi serta Dinas Koperasi dan UMKM mendorong kolaborasi yang kuat dan terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, koperasi, sektor swasta, dan masyarakat. Sinergi ini krusial untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan koperasi, terutama dalam memfasilitasi akses terhadap pasar, pembiayaan, dan program peningkatan kapasitas.
29) Kementerian Koperasi, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Pemerintah Desa agar dapat memperpendek rantai pasok dan meningkatkan nilai tambah bagi produk-produk desa, sekaligus memperkuat inklusi keuangan di tingkat akar rumput. Dengan demikian, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi motor penggerak ekonomi kolektif, memberdayakan pelaku usaha kecil dan BUMDes yang ada, sehingga dapat memitigasi risiko saturasi pasar antara Koperasi, BUMDes, dan UMKM di daerah itu sendiri.
30) Kementerian Koperasi, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Pemerintah Desa agar dapat memastikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menekan pergerakan tengkulak dan meningkatkan kesejahteraan petani/ pelaku usaha, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Aplikasi MONSAKTI, https://monsakti.kemenkeu.go.id/

Aplikasi OMSPAN, https://spanint.kemenkeu.go.id/

Aplikasi OM-SPAN TKD, https://spanint.kemenkeu.go.id/tkd/#/home/login

Aplikasi SIKD *Next Generation*, https://sikd.kemenkeu.go.id/tkd/alokasi/realisasi

Aplikasi SINTESA, http://sintesa.kemenkeu.go.id/

Aplikasi SATUDJA, https://satudja.kemenkeu.go.id/

Aplikasi SIKP, https://sikp.kemenkeu.go.id/login

Aplikasi SIKPUMi, https://sikp.umi.kemenkeu.go.id/

Amalika, L. S. (2023). Stunting Eksplorasi Pola Pemberian Makan Balita Stunting dan Balita Non Stunting berdasarkan Perspektif Sosio-kultural di Desa Legung Barat. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 9(2), 209-220.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Berita Resmi Statistik*. Retrieved from https://lampung.bps.go.id/

Badan Pusat Statistik. (2025). *Berita Resmi Statistik*. Diambil kembali dari https://www.bps.go.id/

Desiani, N. &. (2025). Efektivitas Program Makan Gratis pada Status Gizi Siswa Sekolah Dasar: Tinjauan Sistematis. Malahayati Nursing Journal, 7(1), 27-48.

Dwijayanti, A. (2024). Policy Spillover: Analisis Jaringan Dampak Kebijakan Makan Siang Bergizi Gratis terhadap Sektor Pertanian. Jurnal Administrasi Publik, 20(2), 281-308.

Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat. (Triwulan I 2025). *Data dan Realisasi Penerimaan Bea Cukai di Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Kementerian Keuangan.

Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. (Triwulan I 2025). *Data dan Realisasi Penerimaan PNBP Kekayaan Negara di Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Kementerian Keuangan.

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. (Triwulan I 2025). *Data dan Realisasi Perpajakan di Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Kementerian Keuangan.

Kanwil DJPb Provinsi Lampung. (2024). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah (LKPD-TW) Provinsi Lampung.* Bandar Lampung: Kanwil DJPb Provinsi Lampung.

Kanwil DJPb Provinsi Lampung. (Triwulan I 2025). Laporan ALCo Regional Lampung. Bandar Lampung: Kanwil DJPb Provinsi Lampung.

Kanwil DJPb Provinsi Lampung. (Triwulan I 2025). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah (LKPD-TW) Provinsi Lampung.* Bandar Lampung: Kanwil DJPb Provinsi Lampung.

Kementerian Dalam Negeri. (2025). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Keuangan. (2025). Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah: https://djpk.kemenkeu.go.id/

Pemerintah Provinsi Lampung. (2025). Keputusan Gubernur No. G/291/VI.03/HK/2025 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Atas Pokok Tunggakan Dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor.

Daftar Pustaka

Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pemerintah Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Susnita, Y. I. (2024). Penerapan Pola Makan Bergizi untuk Kecerdasan Anak Usia Dini di PAUD Ramah Anak. Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 350-365.

Daftar Istilah

Andil inflasi

Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, dan ditetapkan dengan undang-undang.

Bea

Pungutan yang dikenakan atas keluar masuknya barang/komoditas yang berkaitan yang masuk dan keluar daerah pabean. Pungutan bea ini bersifat wajib dan dikenakan pada produk hasil ekspor dan impor. Bea yang dikenakan atas barang impor disebut bea masuk, dan bea yang dikenakan atas barang keluar disebut bea keluar. Bea sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti ongkos.

BI 7 Days Reverse Repo Rate

Suku bunga referensi kebijakan moneter dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur setiap bulannya.

BMN

Barang Milik Negara. Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BPP

Belanja Pemerintah Pusat. Bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk menyelenggarakan tugas pemerintah pusat.

Cukai

Pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai. Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik berikut: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

DAK

Dana Alokasi Khusus. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAU

Dana Alokasi Umum. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

DBH

Dana Bagi Hasil. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Desa

Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

DTK

Dana Transfer Khusus. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DTU

Dana Transfer Umum. Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Insentif fiskal

Dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan kinerja tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang, dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan nasional.

KPB

Kartu Petani Berjaya (KPB) merupakan program yang disalurkan oleh Provinsi Lampung untuk mendistribusikan pupuk subsidi kepada petani. Selain untuk penebusan pupuk, kartu ini juga dapat digunakan untuk: Informasi laporan keuangan usaha, Peminjaman KUR, Kepastian pemasaran hasil panen.

KPBU

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum.

KPPN

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab menyalurkan dana dari kas negara ke berbagai satuan kerja.

Koperasi

Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum

Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

LKPD-TW

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah yang mencakup Laporan Keuangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

LKPK-TW

Laporan yang disusun dengan cara mengkonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah (LKPD-TW).

Local Taxing Power

Salah satu pilar dalam penyusunan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang memberikan panduan bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Local Tax Ratio

Perbandingan antara total penerimaan pajak maupun retribusi daerah dengan angka Produk Regional Domestik Bruto.

MTM

Month to month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

PBB

Pajak Bumi dan Bangunan. PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Mulai 1 Januari 2014, PBB pedesaan dan Perkotaan

merupakan pajak daerah. Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.

PDRB

Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.

PPN

Pajak Pertambahan Nilai. Pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

PPh

Pajak Penghasilan. Pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

TKD

Transfer ke Daerah. Dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi fiskal.

TPAK

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja, baik yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan.

TPT

Tingkat Pengangguran Terbuka. Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

SiKPA

Sisa Kurang Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA dapat digunakan kembali pada tahun berikutnya.

SiLPA

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA dapat digunakan kembali pada tahun berikutnya.

QTQ

Quarter to Quarter. Perbandingan antara data suatu triwulan dengan triwulan sebelumnya.

YOY

Year on year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

YTD

Year to date. perbandingan antara data kumulatif dari awal tahun hingga tanggal tertentu pada tahun berjalan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Terima kasih pembaca. Sampaikan kritik dan saran Anda untuk meningkatkan kualitas Kajian Fiskal Regional Lampung dengan *scan barcode* di bawah ini:

Atau klik tautan dibawah ini:

https://forms.office.com/r/tpPLHK8ffE?origin=lprLink

Laporan Kajian Fiskal Regional (KFR) Kanwil DJPb Provinsi Lampung Triwulan I 2025

Jalan Cut Mutia Nomor 23A, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung
https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/lampung/id/